

FORUM DISKUSI **DENPASAR 12**

BERKOMPETISI BUKAN BERMUSUHAN

Dr. Lestari Moerdijat, S.S., M.M.
Wakil Ketua MPR RI

FORUM DISKUSI **DENPASAR 12**

BERKOMPETISI BUKAN BERMUSUHAN

BERKOMPETISI BUKAN BERMUSUHAN

Pengagas:

Dr. Lestari Moerdijat, S.S., M.M.

Penulis:

Kleden Suban, Gantyo Koespradono, dan Hilarius U. Gani, Ade Siregar (Koordinator)

Cover:

Briyanbodo Hendro

Editor Bahasa:

Adang Iskandar

Desain Grafis:

Yogje

Diterbitkan oleh:

Media Indonesia Publishing

Cetakan I, September 2024

UU 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

FORUM DISKUSI **DENPASAR 12**

**BERKOMPETISI
BUKAN
BERMUSUHAN**

Sekapur Sirih

BUKU berisi perbincangan mengenai demokrasi ini diangkat dari rangkaian panjang Forum Diskusi Denpasar 12 yang digelar setiap hari Rabu mulai pukul 14.00 WIB. Inilah diskusi kepublikan yang diprakarsai Wakil Ketua MPR RI Dr. Lestari Moerdijat, S.S., M.M. dan diselenggarakan secara virtual dari rumah dinas Jalan Denpasar Raya No. 12, Jakarta. Rumah itu ialah rumah dinasny rakyat, rumah tempat kita ‘membedah persoalan bangsa’.

Bab I berisi topik Menyambut Pesta Demokrasi 2024. Di sini disajikan pandangan Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustopa, anggota Dewan Pers Dr. Asep Setiawan, M.A., serta anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini.

Bab II berisi topik Perubahan Sistem Pemilu dan Dampaknya bagi Demokrasi Indonesia. Di sini dipaparkan pendapat Feri Amsari, S.H., M.H., LL.M, Direktur Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas; Philips J Vermonte, Ph.D., Dekan FISIP Universitas Islam Internasional Indonesia; Almas Ghaliya Putri Sjafrina dari Indonesia Corruption Watch (ICW); Abdul Kohar, wartawan *Media Indonesia*; serta Dr. Atang Irawan, S.H., M.Hum., Staf Khusus Wakil Ketua MPR RI Bidang Penyerapan Aspirasi Masyarakat dan Daerah.

Bab III menampilkan topik Pilkada Ditunda atau Lanjut?. Topik ini menjawab pertanyaan, apakah pilkada ditunda atau lanjut di masa pandemi covid-19? Di sini dikemukakan pandangan Dirjen Otonomi

Daerah Kementerian Dalam Negeri Akmal Malik, Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari, S.H., M.Si., Ph.D., Komisioner Bawaslu RI Fritz Edward Siregar, S.H., LL.M., Ph.D., Sekjen Pengurus Besar Nahdlatul Ulama K.H. Dr. Ir. Helmi Faizal Zaini, Sekretaris Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Rohim Ghazali, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustopa, peneliti dari lembaga survei Indikator Hendro Prasetyo, anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Dra. Ir. Hj. Eni Sumarni, M.Kes., Ketua Teritorial Pemenangan Pemilu Partai NasDem Wilayah Sumatra Willy Aditya, dan pakar hukum tata negara Universitas Pasundan Dr. Atang Irawan, S.H., M.Hum.

Bab IV berisi topik Mengantisipasi Hoaks di Tahun Pemilu. Di sini dipaparkan pendapat Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika Dr. Usman Kansong, S.Sos., M.Si., pakar komunikasi politik dan dosen komunikasi Universitas Airlangga Dr. Drs. Suko Widodo, M.Si., Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini, serta Sekjen Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI)-CEO Tempo Digital Wahyu Dhyatmika.

Bab V menyajikan topik Menuntaskan Agenda Politik di 2022. Di sini disajikan pemikiran anggota Panitia Seleksi Calon Anggota KPU RI yang juga pakar politik dari FISIP Unair Airlangga Pribadi, Ph.D., anggota DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Irma Suryani, pakar hukum tata negara Dr. Atang Irawan, S.H., M.Hum., Kepala Departemen Perubahan Politik dan Sosial CSIS Arya Fernandez, Ketua DPP Partai NasDem Bidang Pemilih Pemula dan Milenial Lathifa Al Anshori, serta Founder Total Politik Arie Putra.

Bab VI membahas topik Badan Budaya untuk Partai Politik. Di sini disajikan pendapat Ketua Bidang Perempuan dan Anak DPP Partai NasDem Amelia Anggraini, Ketua Koordinator Bidang Kebijakan Publik dan Isu Strategis DPP Partai NasDem Suyoto, Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel, Dirjen Kebudayaan Kemendikbudristek Hilmar Farid, sesepuh Kampung Riwil Tatak Prihantoro, serta anggota Komisi I DPR RI Muhammad Farhan.

Bab VII berisi topik Gerakan Budaya dan Partai Politik. Di sini dipaparkan pemikiran anggota DPR RI Muhammad Farhan, pekerja seni Christine Hakim, budayawan Sujiwo Tejo, dan praktisi permuseuman dan cagar budaya Punto A. Sidarto.

Semua pemikiran itu dirangkum oleh Gantyo Koespradono, Kleden Suban, dan Hillarius U. Gani. Melalui *zooming*, Ade Siregar bersama ketiga perangkum melakukan sistematika naskah dan pemeriksaan akhir naskah.

Penentuan topik, pemilihan pembicara dan penanggap dilakukan Wakil Ketua MPR RI Dr. Lestari Moerdijat, S.S., M.M. bersama sebuah tim yang dikoordinasikan Arief Adi Wibowo, S.Si., M.T.

Tim itu terdiri atas Staf Khusus Wakil Ketua MPR Dr. Atang Irawan, S.H., M.Hum. dan Drs. Muchtar Luthfi Mutty, M.Si., serta Tenaga Ahli Wakil Ketua MPR Arimbi Heroepoetri, S.H., LL.M., Luthfi Assyaukanie, Ph.D., Sadyo Kristiarto, S.P., Anggiasari Puji Aryatie, S.S., dan Dr. Irwan-syah, S.Sos., M.A., serta Dr. Radityo Fajar Arianto, M.B.A., ekonom yang juga Direktur Sparklab Universitas Pelita Harapan.

Teknis pelaksanaan Forum Diskusi Denpasar 12 secara virtual dike-

lola Tim Tenaga Ahli DPR, yaitu Shohibul Umam, S.E., Alma Costa, S.S., M.A., dan Affan Akbar Harahap, S.Sos. Tim Tenaga Ahli DPR ialah tim Lestari Moerdijat dalam kapasitasnya sebagai anggota DPR.

Tim Tenaga Ahli lainnya, yaitu Lia Eldest Sihotang, S.I.P., M.A., dan Ahmad Nur Saeful, S.Pd. bertugas melakukan riset untuk keperluan diskusi serta menghubungi narasumber dan penanggap.

Perancang sampul dan penata letak buku ini ialah Yogie dan Briyanbodo Hendro.

Buku ini pun mendapat sentuhan editor bahasa Adang Iskandar. Sentuhan yang perlu dan juga penting agar bahasa Indonesia yang baik dan benar terus terjaga dan terpelihara. ■

Pintu Kesetaraan dan Keadilan

PEMILU adalah pintu kesetaraan dan keadilan. Kesetaraan bagi yang termarginalkan, keadilan bagi yang suaranya tidak didengarkan. Yang termarginalkan itu contohnya posisi kaum perempuan dan yang tak didengarkan suaranya itu contohnya penyandang disabilitas.

Negara melalui undang-undang memerintahkan partai politik harus mencalonkan 30% perempuan di dalam pemilihan umum legislatif. Norma itu dipatuhi. Akan tetapi, pemilu sebagai ajang kompetisi

menghasilkan realitas: jumlah perempuan yang terpilih duduk di parlemen masih di bawah kuota yang ‘dinormakan’ oleh negara melalui undang-undang.

Alhamdulillah, Partai NasDem sejauh ini dapat memenuhi kuota perempuan itu. Pada 2019, sebanyak 32% perempuan duduk di Fraksi Partai NasDem DPR RI.

Posisi penyandang disabilitas lebih memprihatinkan karena tak ada kewajiban partai politik sebagai peserta pemilu untuk mencalonkan saudara-saudara kita penyandang disabilitas menjadi caleg. Perihal mengusung penyandang disabilitas diserahkan sepenuhnya kepada inisiatif tiap-tiap partai politik sebagai peserta pemilu.

Hemat saya, inisiatif itu kiranya perlu digerakkan sampai pada titik lebih dalam, yakni kesadaran menegakkan emansipasi bagi penyandang disabilitas. Kendati hasilnya belum ada yang terpilih, sebagai salah seorang pimpinan partai izinkan saya berbagi kebersamaan untuk pantang menyerah.

Demikianlah pemilu yang demokratis sebagai pintu kesetaraan dan keadilan, bukan pintu yang otomatis dapat terbuka atau dapat dibuka dengan mudah. Pintu itu masih terkunci rapat bagi perempuan dan penyandang disabilitas, dan kiranya hanya dapat terbuka sedikit demi sedikit berkat kerja-kerja politik yang berkesinambungan dari pemilu ke pemilu.

Di atas segalanya pemilu adalah kompetisi yang harmonis, bukan bermusuhan. Pikiran ini berlaku untuk pemilihan umum mana pun, terlebih di dalam pemilihan presiden. Siapa pun yang menang, dia ada-

lah presiden kita bersama.

Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada para pembicara, para penanggap, dan peserta diskusi yang melalui *chatting* menyampaikan pertanyaan dan pendapat dalam Forum Diskusi Denpasar 12.

Jakarta, 27 September 2024



Dr. Lestari Moerdijat, S.S., M.M.

Wakil Ketua MPR RI

Pemilu Jujur, Pemilu Langka

DI tengah jalan dalam pemilu presiden Amerika Serikat, Joe Biden mengundurkan diri sebagai capres, digantikan Kamala Harris, berhadapan dengan capres Donald Trump. Joe Biden tahu batas kemampuan, tepatnya tahu diri. Dalam usia menjelang 82 tahun, daya ingatnya telah jauh merosot. Ada pertanda kuat dalam debat dia dapat dengan mudah ditumbangkan oleh Trump.

Di akun media sosialnya, Joe Biden menulis, *‘One of the best decisions I’ve made was picking @KamalaHarris as my vice president’*. Lebih jauh, Biden mengusulkan Kamala Harris untuk mengganti dirinya sebagai capres dari Demokrat. Dan, itu menjadi kenyataan. Bukan pula sembarang kenyataan.

Mengusung Kamala sebagai capres berarti mengusung perempuan dan berkulit hitam yang pertama dalam sejarah demokrasi AS. Bila terpilih, sempurna lah contoh hebat berdemokrasi (Kapan demokrasi kita terbebas dari rasisme, dari politik identitas?).

Semua itu berangkat dari Joe Biden yang tahu diri. Tahu diri kiranya hal penting bagi pemimpin yang sedang berkuasa. Jarang petaha-

na tahu diri: cukup berkuasa satu periode. Malah ada yang kepingin mengubah konstitusi untuk dapat berkuasa tiga periode.

Pemilu tempatnya berkompetisi menghasilkan sirkulasi elite. Lima tahun sekali rakyat ikut menentukan perputaran elite. Oleh karena itu, pemilu harus dilakukan secara teratur untuk menggenapkan hak konstitusional rakyat.

Di dalam perspektif itulah, misalnya, penting menjawab pertanyaan serius di masa pandemi korona, ‘Apakah pilkada ditunda ataukah tetap dilanjutkan?’.

Presiden Jokowi tegas dan berani menjawabnya dengan sebuah kepastian: pada waktunya, pilkada tetap dilaksanakan. Setelah pilkada, mungkin ada yang menoleh ke belakang. Eh, ternyata, anak dan menantu Jokowi, ikut dan menang pilkada, di dua kota berjauhan. Apa yang salah? Bukankah anak dan menantu itu adalah rakyat yang punya hak konstitusional?

Pemilu yang demokratis dibahasakan sebagai pemilu luber jurdil (langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil). Enam kata kunci itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan, terutama kata ‘jujur’.

Pemilu yang jujur adalah pemilu yang langka. Rasanya baru dua kali dialami, yakni Pemilu 1955 dan Pemilu 1999. Pemilu yang teratur itu baru di tahap ‘dapat terselenggara’, belum di tahap esensial, ‘terselenggara dengan jujur’.

Di sisi rakyat, pemilik hak suara, kata ‘bebas’ pun punya makna, ‘bebas bertransaksi’. Inilah kebebasan dalam dua ekstrem. Pertama, bebas memilih yang membayar paling besar nilai rupiahnya. Atau, kedua,

semua uang diambil, tak peduli siapa pun yang memberi, tetapi pilihan ‘bebas’, yakni sesuai hati nurani.

Di era maraknya politik uang, ‘sesuai hati nurani’ bahkan punya makna religius. Bukankah di kotak suara hanya ‘saya dan Tuhan yang tahu’?

Bekasi, 27 September 2024



Saur Hutabarat
Wartawan Senior

DAFTAR ISI

Sekapur Sirih	7
Pintu Kesetaraan dan Keadilan	13
Pemilu Jujur, Pemilu Langka	17

MENYAMBUT PESTA DEMOKRASI 2024

24

1. Latar Belakang: Wajah Demokrasi Menjelang Pemilu 2024
2. Pesta Demokrasi Bukan Perpecahan demi Kekuasaan
3. Demokrasi dan Rekrutmen Calon Pemimpin Bangsa
4. Pemilu 2024 Monumen Raksasa Demokrasi Indonesia
5. Catatan Perludem dan KPU tanpa Anggaran Pilpres Putaran Kedua

PERUBAHAN SISTEM PEMILU DAN DAMPAKNYA BAGI DEMOKRASI INDONESIA

58

1. Latar Belakang: Masih Berdebat Terbuka-Tertutup
2. Akal-akalan Mengubah Sistem Pemilu
3. Tidak Ada Sistem yang Sempurna
4. Sama-Sama Koruptif
5. Memicu Turbulensi Politik



PILKADA: DITUNDA ATAU LANJUT?

88

1. Latar belakang: Hajatan Politik di Tengah Merebaknya Covid-19
2. Pilihan Sulit
3. Pilkada Instrumen Perang Melawan Covid-19
4. Berpotensi Memicu Konflik
5. Utamakan Keselamatan Jiwa
6. Plus Minus Pilkada 2020 Lanjut atau Tunda
7. Maju Kena Mundur Kena



MENGANTISIPASI HOAKS DI TAHUN PEMILU

138

1. Latar Belakang: Menunggu Waktu Diserbu Hoaks
2. Bisa Akibatkan Perpecahan
3. Demokratisasi Penyiaran
4. Menjaga Kebersihan Ruang Publik
5. Penyelenggara Jangan Jadi Pemain



MENUNTASKAN AGENDA POLITIK DI 2022

164

1. Latar Belakang: Saat Skor Demokrasi Cenderung Turun
2. Mengerjakan PR di Tengah Ketidakpastian
3. Mereformasi Partai Politik
4. Efek Penurunan Indeks Demokrasi
5. Prolegnas dan Pemerintah Pusat yang makin Menguat
6. Generasi Z dan Politik Identitas

VI

BADAN BUDAYA UNTUK PARTAI POLITIK

1. Latar Belakang: Representasi Kedaulatan Rakyat
2. Menghentikan Elegi Kebudayaan Nasional
3. Membangun Imajinasi Bangsa
4. Menjaga Kelestarian Budaya
5. Dianggap tidak Penting

210

VII

GERAKAN BUDAYA DAN PARTAI POLITIK

1. Latar Belakang: Perlawanan Melalui Seni-Budaya
2. Rapuh dan Rentan terhadap Infiltrasi
3. Menjadi Jati Diri Bangsa
4. Keragaman Budaya Menjadi Kekuatan
5. Berpikir Sesuai Perkembangan Zaman
6. Mengalami Krisis Kebudayaan

234





Menyambut Pesta Demokrasi 2024

1 Wajah Demokrasi Menjelang Pemilu 2024

MAJELIS Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 2007 menetapkan 15 September sebagai Hari Demokrasi Internasional. Peringatan hari tersebut dipakai sebagai kesempatan untuk mempromosikan dan menegakkan prinsip-prinsip demokrasi di seluruh dunia.

Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana kekuasaan berada di tangan rakyat, dan warga negara memiliki hak untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan negara mereka.

Hari Demokrasi Internasional berfungsi sebagai pengingat akan pentingnya nilai-nilai kebebasan, kesetaraan, dan supremasi hukum dalam suatu negara demokrasi. Pada hari tersebut seluruh

elemen seperti pemerintah, organisasi, dan individu dapat merenungkan tantangan dan peluang yang dihadapi demokrasi, baik secara internal maupun global.

Demokrasi dianggap sebagai pilar fundamental hak asasi manusia dan pemerintahan, dan Hari Demokrasi Internasional memainkan peran penting dan signifikan dalam mendorong dan melindungi proses pembangunan yang berkelanjutan dalam skala global.

Indeks demokrasi adalah penilaian tahunan keadaan demokrasi di negara-negara di seluruh dunia, yang dihasilkan oleh Economist Intelligence Unit (EIU). Indeks ini mengevaluasi negara-negara berdasarkan berbagai faktor, termasuk proses pemilihan, kebebasan sipil, partisipasi politik, dan fungsi pemerintah. Selain itu, indeks ini menggolongkan negara ke dalam empat kategori utama, yaitu *full democracy*, *flawed democracy*, *hybrid regime*, dan *authoritarian regime*.

Berdasarkan laporan EIU, indeks demokrasi Indonesia pada 2022 turun dua tingkat dari posisi 52 menjadi urutan ke-54. Perburukan kondisi demokrasi ini yang terbesar disumbang oleh budaya politik yang mendapat nilai terendah. Secara keseluruhan, indeks demokrasi Indonesia berada pada kategori *flawed democracy* dengan skor 6,71.

Dalam demokrasi yang *flawed*, ada kekurangan tertentu pada proses demokrasi, seperti pembatasan kebebasan politik atau penyimpangan dalam pemilihan. Terlepas dari kekurangan itu,

demokrasi yang *flawed* umumnya masih memiliki sistem pemilihan umum yang kompetitif dan beberapa tingkat pluralisme politik.

Banyak pertanyaan yang mungkin muncul di masyarakat, seperti mengapa nilai-nilai kebebasan, kesetaraan, dan supremasi hukum penting ditegakkan di sebuah negara demokrasi? Apakah peluang dan tantangan demokrasi Indonesia menjelang Pilpres 2024? Apa yang harus dilakukan oleh setiap pemangku kepentingan di Indonesia agar kondisi demokrasi menjadi lebih baik?

Menurut moderator diskusi, Luthfi Assyaukanie, ada dua alasan mengapa Forum Diskusi Denpasar 12 mengangkat tema demokrasi lagi. Kebetulan tanggal 15 September 2023 masyarakat dunia memperingati Hari Demokrasi Internasional. Tujuan PBB menetapkan hari tersebut sejak 2007 ialah untuk merawat kesadaran perihal pentingnya demokrasi, juga mengingatkan bahwa demokrasi itu penting sebagai salah satu *tools* atau alat bagi banyak negara untuk mencapai kesejahteraan bagi rakyatnya.

Tema Hari Demokrasi Internasional tahun ini ialah *Empowering The Next Generation*. Memberdayakan generasi mendatang menjadi penting apalagi Indonesia pada 2024 akan mengadakan pemilihan umum yang riak-riaknya sudah dirasakan.

Berbagai partai politik sudah berembuk dan menghadirkan pasangan capres dan cawapres. Luthfi mengatakan, dalam riu rendah pesta demokrasi ini, “Kita seolah-olah hanya disuguhkan bagaimana pilpres berlangsung, dan bagaimana caranya me-

menangi pilpres sehingga kita agak sedikit mengabaikan apa yang akan kita lakukan setelah pilpres.”

Dalam beberapa tahun terakhir kualitas atau kondisi demokrasi Indonesia mengalami penurunan atau apa yang oleh para ahli disebut sebagai meredupnya demokrasi. Dalam 10 tahun terakhir, indeks demokrasi Indonesia seperti yang diungkap Freedom House, mengalami penurunan jika dibandingkan dengan 10 tahun lalu.

Banyak alasan mengapa demokrasi Indonesia meredup. Para pengamat dan ahli sering mengatakan banyak kasus pendiskriminasian terhadap hak-hak warga. Negara kerap menjadikan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagai alasan untuk menangkap warga negara. ■



Demokrasi adalah sebuah proses yang berkelanjutan dan bertanggung jawab, dengan tujuan utama mewujudkan kesejahteraan bersama.”

Lestari Moerdijat
Wakil Ketua MPR RI

2 Pesta Demokrasi Bukan Perpecahan demi Kekuasaan

WAKIL Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengatakan, pesta demokrasi 2024 seyogianya menjadi tonggak sejarah yang mampu memberi warna bahwa demokrasi itu lekat dengan kesetaraan dan keadilan.

Menurut Lestari, secara subjektif ia menilai kondisi menjelang pesta demokrasi tahun depan, perjuangan mewujudkan keterwakilan 30% perempuan di parlemen menjadi agak sulit karena ada perubahan peraturan KPU di tengah proses pencalonan legislatif yang sudah berjalan.

Lestari menambahkan, demokrasi merupakan sebuah sistem politik yang memberikan penghormatan pada kemanusiaan dan kesetaraan. Dengan demikian, tegas Rerie, sapaan akrab Lestari, berdemokrasi sesungguhnya merupakan salah satu kanal perwujudan nilai-nilai kemanusiaan dan kesetaraan.

Rerie yang juga legislator dari Dapil Jawa Tengah II itu ber-

pendapat, pesta demokrasi bisa menjadi pelajaran penting bagi masyarakat bahwa lawan politik dalam berkompetisi bukan berarti musuh politik. “Pemahaman ini harus menjadi perhatian kita bersama,” ujar legislator yang juga anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu.

Apalagi, ujar Rerie lagi, demokrasi adalah sebuah proses yang berkelanjutan dan bertanggung jawab, dengan tujuan utama mewujudkan kesejahteraan bersama.

Dinamika proses demokrasi, menurut Rerie, sesungguhnya adalah penggunaan hak pilih dan hak berpendapat. Ini adalah hak dasar yang menjadi penunjang kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga harus diakui dan dihargai. Proses berdemokrasi, kata Rerie, sebetulnya menciptakan sebuah keindahan. “Bahwa dalam proses demokrasi ada perbedaan itu adalah sebuah bukti bahwa kita menjadi bangsa yang memang sudah siap dan matang untuk melanjutkan kehidupan berbangsa dan bernegara.”

Demokrasi merupakan salah satu kanal perwujudan nilai-nilai kemanusiaan. Sesungguhnya demokrasi juga adalah perwujudan dari Pancasila. “Ketika kita berbicara persatuan dan kesatuan, nilai kebangsaan mesti menjadi modal utama dan pesta demokrasi bukanlah perpecahan demi kekuasaan,” demikian Rerie. ■



Pemilu 2024 adalah momentum yang baik bagi bangsa ini untuk tetap menjaga agar demokrasi di negeri ini tetap sehat, terus berkembang, tumbuh, dan berkualitas.”

Saan Mustopa

Wakil Ketua Komisi II DPR RI

3 Demokrasi dan Rekrutmen Calon Pemimpin Bangsa

BAGI Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustopa, demokrasi sampai saat ini adalah pilihan sistem yang terbaik untuk mencapai kesejahteraan rakyat dalam konteks sebuah negara.

“Karena kita meyakini bahwa demokrasi adalah alat yang terbaik untuk mencapai kesejahteraan dalam sebuah negara, maka kita juga harus memiliki kesadaran yang sama untuk tetap menjaga, merawat, memelihara, dan terus-menerus berusaha semaksimal mungkin agar demokrasi kita terus berkembang, maju, dan berkualitas,” katanya.

Saan melanjutkan, “Dengan begitu, apa yang menjadi cita-cita dari sebuah demokrasi tentang kesejahteraan terkait dengan keadilan, kesamaan, dan sebagainya bisa kita dapatkan.”

Mengenai indeks demokrasi di Indonesia yang menurun, Saan mengatakan, “Saya juga sudah membaca indeks tersebut, ada fenomena-fenomena praktik politik yang kadang bertentangan dengan semangat dan prinsip demokrasi. Kita bisa ketahui dan rasakan bersama.”

Saan mengingatkan, dalam konteks menjaga dan merawat demokrasi, beberapa bulan ke depan Indonesia akan menyelenggarakan pesta demokrasi (Pemilu 2024). Pesta demokrasi ini juga menjadi salah satu ukuran sampai seberapa jauh demokrasi di Indonesia berkembang.

“Kita juga bisa melihat sampai seberapa jauh demokrasi kita maju dan berkualitas. Ini nanti bisa dilihat dari praktik-praktik pesta demokrasi yang akan kita lakukan pada 14 Februari 2024,” ujar Saan.

Pada 2024, menurut Saan, setidaknya ada tiga peristiwa atau konsentrasi politik, yaitu pemilihan presiden-wakil presiden, pemilihan anggota legislatif, dan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak secara nasional. “Pilkada serentak secara nasional ini juga baru pertama dilakukan di Indonesia yang sebelumnya kita melakukan pilkada secara tiga tahap secara periodik,” tambah Saan.

Pada November 2024, pilkada dilakukan serentak secara nasio-

nal untuk memilih 514 bupati/wali kota dan 37 gubernur, walaupun ada rencana untuk ditarik ke bulan September melalui perppu. “Ini masih tergantung sikap partai-partai politik,” kata Saan.

Pemilu 2024 sebagai tonggak atau momentum untuk menjawab persoalan-persoalan demokrasi terkait dengan indeks demokrasi yang menurun memang harus terus diamati. “Perilaku-perilaku politik seperti apa yang memang bertentangan dengan prinsip dan semangat demokrasi bisa dilihat dari pelaksanaan pesta demokrasinya,” tutur Saan.

Kalau kita ingin melihat demokrasi pada Pemilu 2024 berjalan sehat, kata Saan, “Kita perlu amati seberapa besar nanti negara dalam hal ini pemerintah tidak ikut campur dalam proses politik pada Pemilu 2024.”

Bangsa ini berharap Pemilu 2024 bisa berjalan dengan baik dan berkualitas sehingga mampu melahirkan pemimpin, dalam hal ini presiden dan wakil presiden, yang juga baik, serta anggota-anggota legislatif yang memiliki komitmen keberpihakan kepada rakyat yang memilih mereka.

Pemilu 2024, imbuh Saan, juga momentum yang baik bagi bangsa ini untuk tetap menjaga agar demokrasi di negeri ini tetap sehat, terus berkembang, tumbuh, dan berkualitas, “Sehingga kita bisa mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Sesungguhnya itulah *output* dari proses pemilu.”

Artinya manfaat produk Pemilu 2024 bisa dirasakan semaksimal mungkin oleh masyarakat. Di dalamnya ada kebebasan, kese-



MI/IRAMDANI

Warga antusias menggunakan hak suara di TPS 20 RT 01/05 yang tergenang banjir di Larangan Utara, Larangan, Kota Tangerang, Banten, Rabu (14/2/2024). Pada 2024, setidaknya ada tiga peristiwa atau konsentrasi politik, yaitu pemilihan presiden-wakil presiden, pemilihan anggota legislatif, dan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak secara nasional.

taraan, dan pastinya kesejahteraan.

Saan menjelaskan, ia terlibat dalam proses kepemiluan di DPR. Perangkat-perangkatnya disiapkan untuk menopang agar proses demokrasi atau pesta demokrasi pada 2024 bisa berjalan dengan baik.

Memberikan contoh, Saan mengatakan, “Kita dulu punya ide

untuk merevisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu di awal periode DPR 2019-2024. Kami menyadari bahwa regulasi yang ada waktu itu tidak mampu memberikan jawaban terhadap pemilu kita yang sangat kompleks, rumit, dan berat akibat dari putusan Mahkamah Konstitusi di mana pilpres dan pileg disatukan dalam satu waktu yang bersamaan.”

Sebelumnya sejak reformasi, pileg dan pilpres selalu dibedakan waktunya. Pemilu legislatif dulu, selang beberapa bulan kemudian baru pemilihan presiden dan wakil presiden. Tepatnya, April pemilu legislatif dan Juli pemilu presiden dan wakil presiden. Putaran keduanya di bulan September. Ini berlangsung secara reguler dan telah berjalan dengan baik. Baru pada 2019 disatukan dan nanti Pemilu 2024 disatukan kembali. “Dalam perjalanan berikutnya gagasan merevisi Undang-Undang Pemilu kandas,” ujar Saan.

Namun, dalam praktiknya bukan berarti tidak ada revisi. Ada revisi, tapi yang melakukan bukan melalui proses di DPR, melainkan lewat uji materi di Mahkamah Konstitusi. Beberapa ketentuan di UU No. 7/2017 tentang Pemilu juga berubah melalui Perppu No. 2/2023 yang sekarang menjadi UU No. 7/2023 tentang Pemilu. Yang berubah di perppu bukan hanya soal daerah pemilihan dari 80 dapil menjadi 84 dapil, tapi juga jumlah kursi di DPR RI yang semula 575 menjadi 580.

Ada juga perubahan terkait dengan penetapan pasangan calon presiden wakil presiden, dan penetapan daftar calon tetap

anggota legislatif yang lebih awal dari undang-undang sebelumnya. Karena proses revisi UU Pemilu dilakukan melalui perppu dan uji materi di Mahkamah Konstitusi, maka muncul kesan tambal sulam. “Ini menjadi catatan agar Undang-Undang Pemilu tidak tambal sulam,” ujar Saan.

Pilkada serentak yang akan dilakukan secara nasional, menurut Saan, juga membawa implikasi yang luar biasa di daerah. Salah satu implikasinya ialah kemungkinan terjadinya politik transaksional. “Jadi ada beberapa hal yang bisa membuat demokrasi tercederai dalam pilkada serentak, yaitu politik uang,” tegas Saan.

Akan tetapi, apa pun kemungkinan yang bakal terjadi, kata Saan, “Pemilu 2024 harus bisa kita jadikan sebagai tonggak atau momentum untuk memperbaiki demokrasi kita yang mundur ke belakang yang selama ini kita rasakan.” Pemilu 2024 harus mampu membawa langkah pada sebuah taraf demokrasi yang benar-benar stabil, sehat, dan berkualitas.

Pilar Utama Demokrasi

Menjawab pertanyaan moderator diskusi Luthfi Assyaukanie terkait dengan peran partai-partai politik, Saan Mustopa menjelaskan, salah satu pilar utama demokrasi ialah partai politik.

Di luar itu, ada media massa. Masa depan demokrasi, menurut Saan, menjadi tanggung jawab partai-partai politik. “Partai politik harus punya kesadaran untuk tetap menjaga, merawat, dan

meningkatkan kualitas demokrasi kita.”

Agar demokrasi Indonesia makin stabil, partai politik harus bisa menghormati proses demokrasi. Jangan justru menghambat, bahkan merusak demokrasi. Saan menegaskan, salah satu yang bisa merusak demokrasi ialah *money politics* dan politik dinasti. “*Money politics* dan politik dinasti tidak hanya menghambat demokrasi, tapi juga merusak demokrasi.”

Sebagai pilar utama demokrasi, maka partai politik harus bisa seperti sumber mata air. Partai politiklah yang akan melahirkan politisi yang nantinya duduk di jabatan-jabatan eksekutif dan legislatif. Mereka harus punya kesadaran yang sama untuk bisa merawat, menjaga, dan meningkatkan demokrasi di Indonesia.

Karena partai politik sumber mata air, kata Saan, maka kader-kadernya yang menjadi pemimpin di eksekutif maupun legislatif harus mampu menjaga kemurnian air dari sumber lahirnya pemimpin-pemimpin bangsa. “Kalau kita ingin mendapatkan aliran air yang bersih dari sebuah sungai, sumber mata airnya harus kita jaga agar tetap bersih,” tutur Saan.

Ia melanjutkan, kalau ingin melahirkan politik yang sehat dan memperbaiki demokrasi kita, rekrutmen di partai politik untuk jabatan-jabatan publik harus disiapkan dengan baik. “Kita tidak akan mendapatkan pemimpin yang baik kalau dari prosesnya sudah salah. Enggak mungkin misalnya untuk mendukung seseorang menjadi pemimpin harus ditransaksikan, termasuk dalam proses pilkada,” demikian Saan Mustopa. ■



**Sistem demokrasi di
Indonesia sejak 2004
sudah mengalami
kemajuan karena satu
individu memiliki satu
suara yang dijamin oleh
undang-undang.”**

Asep Setiawan
Anggota Dewan Pers

4 Pemilu 2024 Monumen Raksasa Demokrasi Indonesia

ANGGOTA Dewan Pers, Asep Setiawan, berpendapat bahwa Pemilu 2024 adalah sebuah monumen raksasa demokrasi Indonesia. Konsekuensinya, menurut dia, pengawalan harus dilakukan tidak hanya pada partai politik, tetapi juga seluruh elemen dalam sistem politik di Indonesia, termasuk *civil society*.

“Kita tidak cukup hanya melihat pemilu secara pasif, tetapi harus dibarengi dengan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat sehingga, baik proses, struktur, maupun kualitasnya, harus dijaga bersama-sama,” kata Asep.

Kalau pengawasan dan partisipasi hanya diserahkan kepada satu elemen, Asep mengkhawatirkan akan timbul banyak masalah. Akan timbul apa yang disebut oleh para ilmuwan politik

sebagai regresi dalam demokrasi di Indonesia. Asep menilai, pada proses tahapan pemilu, khususnya dalam rotasi kepemimpinan di Indonesia, sudah terdapat masalah.

Memberikan contoh, Asep menyebut proses rekrutmen calon anggota legislatif (caleg) perempuan yang harus 30% belum berjalan sebagaimana diatur dalam undang-undang. “Jadi dalam membangun demokrasi Indonesia, kita masih mengalami kendala dalam proses menuju sistem demokrasi yang ideal,” kata Asep.

Seyogianya, tambah Asep, hal-hal yang menyangkut proses, termasuk daftar caleg perempuan yang 30%, sudah harus selesai karena Indonesia sudah punya pengalaman pemilihan umum dengan sistem proporsional terbuka pada 2004, 2009, 2014, dan 2019. Jadi semua itu harus menjadi refleksi bahwa dalam mengorganisasikan pemilu, walaupun peraturan dan perundang-undangannya sudah jelas, ternyata sistem manajemen pengelolaannya masih memunculkan masalah.

Dalam proses menuju Pemilu 2024, tegas Asep, Indonesia masih mengalami masalah terkait dengan *management election*. Pemilu di negeri ini sudah menganut *one man one vote*. Sistem demokrasi di Indonesia sejak 2004 sudah mengalami kemajuan karena satu individu memiliki satu suara yang dijamin oleh undang-undang. Akan tetapi, tidak dalam manajemen perpemiluan. “Saya kira kita mesti banyak belajar dan melakukan refleksi dan menata ulang kembali manajemen pemilu kita,” ujar Asep.

Menurut Asep, ada beberapa hal yang mesti diperbaiki terkait

dengan proses menuju manajemen pemilu yang lebih akuntabel agar Indonesia memiliki pemimpin yang juga akuntabel. Persisnya, pemilu harus jelas *outcome*-nya seperti apa.

Pemilu 2019 telah melahirkan pemerintahan periode 2019-2024. Konkretnya inilah hasil Pemilu 2019. Pertanyaannya, apakah kualitas kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo telah memenuhi seperti yang diharapkan?

Faktanya, *outcome*-nya tidak seperti yang diharapkan. Apakah para menteri sudah memenuhi kualifikasi sebagai pembantu presiden yang baik? Kalau sudah baik, mengapa masih banyak kasus korupsi? “Semua ini menunjukkan bahwa sistem demokrasi kita melalui pemilu masih mengandung sejumlah tantangan. Kalau begitu, mari kita mencari solusi supaya *outcome* Pemilu 2024 tidak menimbulkan kerentanan dan kerawanan,” tutur Asep.

Terkait dengan pilkada, Asep menyinggung soal rencana memajukan jadwal Pilkada Serentak 2024 dari November ke September. “Saya menduga pemajuan jadwal ini juga akan memunculkan persoalan di *outcome*-nya.”

Oleh sebab itu, dalam membangun demokrasi di Indonesia, ada satu hal yang harus sama-sama dipahami, bahwa kalau regulasi sudah ditentukan, jika keputusan-keputusan yang menyangkut hukum sudah menjadi kesepakatan nasional, maka ini yang harus dijadikan pegangan. “Tapi, manakala kemudian ada pelanggaran, dampaknya akan cukup jauh di dalam proses dan hasil demokrasinya. Jadi saya kira di sinilah integritas lemb-

ga-lembaga penyelenggara pemilu diperlukan,” tukas Asep.

Ia menegaskan, dalam proses demokrasi, *outcome* menjadi intisari dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemerintahan mesti berkualitas. Harus mampu pula melahirkan pemerintahan yang efektif serta mampu menjamin kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Itu untuk eksekutif, sedangkan untuk legislatif, tambah Asep, “Kita mengharapkan *outcome* Pemilu 2024 menghasilkan lembaga-lembaga legislatif dengan anggota yang memiliki kualitas tinggi jika dibandingkan dengan periode sebelumnya.” Jangan sampai Pemilu 2024 menghasilkan anggota DPR yang tiba-tiba membuat atau terlibat masalah di tengah jalan. Juga jangan sampai ada anggota DPR RI atau DPRD yang ternyata tidak memiliki kemampuan untuk mengikuti perkembangan zaman.

Ke depan, DPR RI harus mampu melahirkan undang-undang yang sesuai dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Terkait dengan pers, Asep mengatakan, “Kami menunggu DPR bisa menghasilkan sesuatu yang bisa memberikan solusi bagi sistem pers di Indonesia.”

Moderator diskusi, Luthfi Assyaukanie, bertanya kepada Asep Setiawan terkait dengan *money politics* yang terus muncul setiap ada hajatan pemilu, “Apakah situasi seperti itu akan muncul lagi dalam Pemilu 2024? Regulasi yang ada sudah cukup atau belum untuk membasmi ‘penyakit’ pemilu tersebut?”

Mengutip berbagai kajian ilmiah, Asep mengatakan, “Kita

mendapatkan fakta bahwa *money politics* atau politik transaksional di Indonesia menjadi salah satu fenomena yang akan terus berulang.” Fenomena itu menunjukkan bahwa dalam proses membangun demokrasi, Indonesia masih terikat pada politik transaksional. Bukan politik untuk membangun demokrasi.

Solusinya? Jika para partisipan politik, baik itu anggota maupun partai politik, fokus pada upaya untuk meningkatkan kualitas demokrasi, maka politik transaksional akan berkurang.

Ingat, publik sekarang sudah mulai teredukasi. Oleh sebab itu, para aktor politik harus terus-menerus mengedukasi masyarakat. Pasalnya, jika peserta politik tetap mempertahankan pola-pola transaksional, “Maka Indonesia, saya kira tidak akan keluar sebagai negara demokrasi yang semakin dewasa.”

Sungguh memprihatinkan jika keputusan-keputusan politik dan keputusan pilihan warga tidak berdasarkan pada kompetensi, profesionalisme, atau kualitas, tetapi lebih pada pertimbangan-pertimbangan transaksional. “Peraturan sesempurna apa pun untuk menghindari *money politics*, apabila tidak ada komitmen dari peserta politik, saya kira politik transaksional akan berulang kembali,” kata Asep.

Ia menegaskan, apa pun regulasi yang harus dijadikan rujukan, sepanjang manusianya tidak memiliki komitmen untuk menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi untuk berkomitmen membangun demokrasi, “Maka Indonesia akan menghadapi masalah besar.” ■



Penyelenggara pemilu yang profesional dan berintegritas adalah setengah dari modal untuk mewujudkan pemilu yang bebas dan adil.”

Titi Anggraini

Anggota Dewan Pembina Perludem

5 Catatan Perludem dan KPU tanpa Anggaran Pilpres Putaran Kedua

ANGGOTA Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengatakan, komparasi yang paling pas untuk melihat seperti apa Pemilu 2024 adalah membandingkannya dengan Pemilu 2019. Alasan Titi, undang-undangnya praktis sama persis walaupun ada undang-undang susulan yang merupakan pengesahan dari perppu, yaitu UU No. 7/2023 tentang Pemilihan Umum.

“Secara menyeluruh 90% konstruksi hukumnya dalam undang-undang tersebut sama persis dengan UU Nomor 7/2017 yang dipakai untuk Pemilu 2019, sehingga perbandingannya antara 2019 dan 2024 lebih *apple to apple* daripada Pemilu 2014. Tahun 2014 pemilu kita tidak serentak,” ujar Titi.

Pemilu legislatif (pileg) mendahului pemilu presiden (pilpres),

tetapi pada 2019 pemilunya serentak, ada lima kotak surat suara. Instrumen dan desain kelembagaan penyelenggara pemilunya juga sama, demikian pula penegakan hukumnya. Pemilih dan aktor-aktor politiknya dalam konteks persyaratan juga serupa meskipun ada perbedaan-perbedaan karena ada putusan Mahkamah Konstitusi.

Melihat dinamika politik yang bergerak dari 2019 sampai 2023, Titi mengatakan ada sejumlah potensi masalah baru yang akan muncul. Namun, agar tidak terjebak pada prosedural semata bahwa merayakan demokrasi hanya dengan praktik berpemilu, maka pemilu harus dipagari.

Mengutip Larry Diamond, seorang sosiolog politik Amerika, Titi mengatakan, dari empat elemen demokrasi, salah satunya ialah sirkulasi elite yang dilakukan melalui pemilu yang bebas dan adil. “Jadi bukan cuma pemilu, tetapi pemilu yang satu paket dengan frasa ‘bebas dan adil’. Jadi kita punya tugas mewujudkan bukan sekadar pemilu, tetapi pemilu yang bebas dan adil,” tegas Titi.

Dalam pandangan Titi, ada enam syarat yang harus direalisasikan untuk bisa mewujudkan pemilu yang bebas dan adil pada 2024. Pertama, masyarakat harus mengawal bahwa kerangka hukum pemilunya betul-betul demokratis, yang memberikan ruang kompetisi yang adil dan setara kepada semua peserta. Mengakomodasi hak pilih secara inklusif dan memberikan kesempatan pada penyelenggara pemilu untuk bekerja secara profesional dan

berintegritas.

Kedua, Indonesia membutuhkan penyelenggara pemilu yang benar-benar profesional dan memiliki integritas tinggi. Penyelenggara pemilu yang profesional dan berintegritas, kata Titi, adalah setengah dari modal untuk mewujudkan pemilu yang bebas dan adil. “Aturan yang kurang baik, tapi kalau dikelola oleh penyelenggara pemilu yang baik, profesional, dan berintegritas, bisa menghasilkan progresivitas dan inovasi,” tutur Titi.

Dia mengingatkan, kita bisa saja menambal yang kurang, tetapi aturan yang sudah baik bisa runtuh kalau penyelenggara pemilunya tidak berintegritas dan tidak profesional.

Ketiga, Indonesia membutuhkan peserta pemilu yang berkompetisi secara kompetitif, dalam artian mereka tidak hanya berkompetisi untuk menang, tetapi juga memerankan fungsi pengawasan kepada sesama peserta. “Dengan begitu, semua bisa berkompetisi dalam *event playing field*, level kompetisinya jadi setara,” tambah Titi.

Keempat, kita butuh birokrasi yang profesional dan netral karena birokrasi menggerakkan pelayanan publik. Birokrasi mengelola anggaran. Kalau mereka tidak netral dan tidak profesional, pemilu yang bebas dan adil tidak akan mampu diwujudkan.

Kelima, kita butuh penegakan hukum yang adil dan efektif. Untuk bisa adil dan efektif membutuhkan proses yang terbuka, transparan, dan akuntabel. “Hukum tidak boleh digunakan untuk kepentingan politik, tetapi digunakan untuk mewujudkan

keadilan dalam penyelenggaraan pemilu,” tutur Titi.

Keenam, kita membutuhkan pemilih yang berdaya dalam pengertian mereka terinformasi dengan baik soal proses pemilu, siapa-siapa saja yang berkompetisi dalam pemilu. Konkretnya, kata Titi, “Kita butuh *well in for voters*. Pemilih wajib tahu mengapa dia harus menggunakan hak pilih. Pemilih juga harus tahu siapa yang dia pilih. Dia juga harus tahu konsekuensi dari pilihannya.”

Setelah pemilu, lanjut Titi, para pemilih juga harus mengawasi orang-orang yang dia pilih jika pilihan mereka terpilih. “Keenam hal itulah yang membentuk pemilu sebagai instrumen demokrasi,” tegas Titi.

Lalu, mengapa partai politik di negeri ini belum sepenuhnya hadir sebagai aktor politik yang berkompetisi secara kompetitif?

Titi menengarai kerangka hukum partai politik masih ada yang kurang, termasuk kerap melakukan pelanggaran, tetapi tidak ada yang mendapatkan sanksi, misalnya mencuri start kampanye atau praktik transaksional. Ia mengatakan, “Ternyata dalam praktik demokrasi kita, budaya politik dan moralitas politik masih menjadi persoalan besar.”

Titi menambahkan, budaya politik dan moralitas politik yang rendah membuat komitmen untuk menghasilkan kerangka hukum pemilu yang demokratis, juga kompetisi yang betul-betul kompetitif, adil, dan setara, menjadi lebih sulit untuk direalisasikan. Penegakan hukum yang terlalu formalistis dan kental dengan nuansa politik, lanjut Titi, “Akhirnya membuat harapan



M/SUSANTO

Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari (tengah) didampingi komisioner KPU RI Yulianto Sudrajat (kiri) dan Deputy Bidang Dukungan Teknis Eberta Kawima memandu pengucapan sumpah dan janji saat melantik anggota KPU Kota Padang di Gedung KPU RI, Jl Imam Bonjol, Jakarta, Senin (13/5/2024).

kita dalam beberapa hal sulit untuk diwujudkan.”

Terkait dengan Pemilu 2024, Titi mengidentifikasi ada sejumlah tantangan yang harus direspons untuk dieliminasi, antara lain, momok jual beli suara karena budaya politik di sini rendah. Selain itu, moralitas politik yang kurang baik dan bertemu dengan pragmatisme politik. Uang dianggap sebagai sebuah kelaziman untuk diterima oleh pemilih.

Ada pula kendala teknis. Titi menjelaskan, kendala teknis sa-

ngat mungkin terjadi pada Pemilu 2024. Ini bisa jadi politis kalau tidak dikelola dengan baik, terutama terkait dengan distribusi logistik, seperti surat suara tertukar, surat suara kurang, dan surat suara terlambat tiba.

Mengacu pada Pemilu 2019, masalah spesifikasi logistik pemilu yang tidak tepat, disebut Titi, membuat beberapa ribu tempat pemungutan suara (TPS) tidak bisa melaksanakan pemungutan suara tepat waktu. Gara-gara persoalan teknis itu, imbuhan Titi, tensi kerja dari petugas TPS meninggi. Mereka dituduh berpihak kepada salah satu kelompok. “Ini menimbulkan stres dan meningkatkan asam lambung, bahkan ada petugas KPPS yang meninggal dunia.”

Masalah lain, masih menurut Titi, karena pemilunya rumit, pemilih hanya terfokus pada pilpres dan akhirnya tidak fokus pada pemilu legislatif. Mereka kurang peduli pada rekam jejak dan politik gagasan atau program. Di situlah kerentanan politik transaksional masuk.

“Saya selalu mengatakan sistem presidensial yang kuat bukan hanya butuh presiden yang didukung oleh parlemen dengan kekuatan signifikan. Presidensial yang kuat juga harus dijaga agar presiden tidak tergelincir menjadi tirani mayoritas. Presiden membutuhkan kontrol yang kuat dari parlemen. Oleh karena itu, keragaman politik juga perlu diwadahi di dalam institusi formal yang namanya DPR. Presiden yang baik dan kuat juga butuh parlemen yang baik dan kuat,” kata Titi.

KPU tanpa Anggaran Putaran Kedua

Memungkasi diskusi, wartawan senior Saur Hutabarat mengajukan beberapa hal yang layak untuk direnungkan.

Pertama, mengapa KPU belum menyiapkan anggaran untuk pilpres putaran kedua. Padahal, dengan tiga pasang, layak diasumsikan bahwa akan terjadi dua putaran, tapi sampai saat ini KPU belum mendapatkan anggaran pilpres putaran kedua. Ada apa ini?

Kedua, perlu pengawasan publik yang lebih ketat tentang potensi presiden dan pelaksana tugas gubernur yang merupakan lingkaran dalam Istana. Netralitasnya perlu diawasi lebih ketat oleh publik.

Ketiga, perlu ditolak rencana percepatan pilkada serentak dari November 2024 menjadi September 2024. Mengapa harus ditolak? Karena 20 Oktober adalah masa berakhirnya kekuasaan Presiden Jokowi. “Kalau dipercepat, dia berkemungkinan dapat menggunakan kekuasaannya untuk pilkada, yang antara lain, kemungkinan besar anak dan menantunya masih akan maju menjadi calon kepala daerah, mungkin di dua provinsi yang berbeda sebagai calon gubernur,” katanya.

Saur melanjutkan, “Saya kira itulah faktor-faktor yang dapat merusak demokrasi 2024.” ■





Perubahan Sistem Pemilu dan Dampaknya bagi Demokrasi Indonesia

1 Latar Belakang: Masih Berdebat Terbuka-Tertutup

SEJAK adanya permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK), masyarakat disibukkan kembali dengan perdebatan seputar sistem pemilu yang seharusnya dianut Indonesia. Jika MK mengabulkan *judicial review* itu, sistem Pemilu 2024 berubah menjadi proporsional tertutup.

Sistem proporsional tertutup membuat para pemilih hanya memilih partai politik, bukan nama kader partai politik yang mengikuti pemilihan anggota legislatif (pileg). Adapun dalam sistem proporsional terbuka, pemilih dapat mencoblos partai politik ataupun calon anggota legislatif (caleg) yang diinginkannya. Sistem proporsional terbuka mulai diterapkan di Indonesia sejak Pemilu 2009.

Banyak pihak berpendapat bahwa sistem proporsional ter-

buka yang diterapkan di Indonesia saat ini merupakan kemajuan demokrasi sehingga tidak seharusnya diganti. Di lain pihak, sistem proporsional tertutup dinilai hanya menguntungkan caleg pragmatis yang bermodalkan kedekatan dengan elite partai politik.

Wacana terkait sistem dengan mana yang terbaik antara proporsional tertutup dan terbuka, sudah menjadi perdebatan panas mulai dari elite, kelas menengah, hingga akar rumput. Pertanyaannya, apa urgensi sistem pemilu proporsional terbuka atau tertutup terhadap demokrasi Indonesia?

Sebuah lembaga survei merilis hasil survei dengan menyebutkan mayoritas responden senang pada sistem proporsional terbuka, dan hanya 4,8% setuju sistem tertutup seperti pada zaman Orde Baru. Data itu menarik karena masyarakat menginginkan sistem terbuka, sistem yang bagi mereka bisa menilai dan memilih caleg secara langsung, bukan caleg yang dipilihkan oleh partai politik. Sebaliknya mereka yang ingin mengubah sistem pemilu menjadi tertutup menganggap terlalu banyak *money politics* dalam sistem terbuka.

Forum Diskusi Denpasar 12 akan mengeksplorasi isu itu dan mengaitkannya dengan demokrasi di Indonesia. Saat ini banyak pihak mengkhawatirkan fenomena terjadinya kemunduran demokrasi secara global termasuk di Indonesia. Kualitas demokrasi yang menurun, wacana perubahan sistem pemilu yang dianggap *less-democratic* akan memperparah kualitas demokrasi. ■



Problematika sistem
pemilu kita ialah
kebiasaan peserta
pemilu menggunakan
uang atau merasa uang,
menentukan segalanya.”

Feri Amsari

Direktur Pusat Studi Konstitusi,
Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang

2 Akal-akalan Mengubah Sistem Pemilu

PERDEBATAN mengenai sistem pemilu proporsional terbuka atau tertutup harus diakhiri karena proses pemilu sudah berjalan. Kenapa kita seakan masih ragu dengan sistem pemilu terbuka saat ini?

Menurut Direktur Pusat Studi Konstitusi, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, Feri Amsari, jarang sekali negara yang sudah masuk ke tahapan pemilu mengubah sistem pemilunya. Ia menduga rencana mengubah sistem pemilu itu lantaran ada indikasi rekayasa dan kecurangan. Jika tidak ada, semestinya perdebatan tentang sistem pemilu dihentikan, termasuk hakim Mahkamah Konstitusi harus menghormati putusan mereka sebelumnya.

Dari aspek konstitusional, kata Feri, ada perbedaan mendasar sistem proporsional terbuka dan tertutup dengan berbagai variannya. Sistem proporsional terbuka meletakkan landasan daulatnya kepada pemilih, sedangkan proporsional tertutup menempatkan daulatnya kepada ketua umum atau elite partai politik.

Berdasarkan aspek konstitusional, dipastikan sistem proporsional tertutup tidak mendekati prinsip-prinsip konstitusional dalam penyelenggaraan pemilu. Pasal 1 ayat 2 UUD 1945 menyebutkan kedaulatan berada di tangan rakyat. Jadi yang berdaulat menentukan siapa yang merepresentasikan rakyat di DPR ialah rakyat sendiri.

Jika dikaitkan dengan Pasal 22 E ayat 1, misalnya, menyebutkan bahwa pemilu memiliki azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Agar rakyat yang berdaulat bisa menentukan representasinya, maka mereka harus menentukan langsung, tidak mewakilkan kepada partai.

Simak lagi Pasal 22 E ayat 2, disebutkan bahwa pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD, dan presiden. Jadi pemilu adalah proses memilih anggota DPR secara langsung melalui prinsip kedaulatan rakyat.

Dari rangkaian itu, kata Feri, jelas bahwa pilihan paling dekat dari aspek konstitusional ialah sistem pemilu terbuka agar publik bisa menentukan calon yang cocok untuk merepresentasikan diri mereka dan tidak mewakilkan pemilihannya kepada ketua umum atau elite partai politik dengan memilih lambang partai politik.

Prinsip pemilu tertutup digunakan di zaman Orde Baru, yang tentu saja secara prinsip reformasi hukum dan konstitusi sangat bertentangan. Itu sebabnya kita melawan sistem proporsional tertutup.

“Saya khawatir perubahan sistem ini adalah akal-akalan untuk menunda pemilu. Kalau sistem diubah menjadi tertutup maka MK akan memutuskan, karena ini sistem baru, diberikan waktu bagi penyelenggara pemilu untuk mempersiapkannya selama tiga tahun. Ini kan sama saja menunda pemilu,” kata Feri.

Bagi Feri, cara itu tidak sehat, melanggar prinsip konstitusional, melanggar asas pemilu, dan tentu saja ini merupakan upaya lain untuk mempertahankan kekuasaan. Jika pemilu ditunda dengan berbagai cara, kata Feri, jelas-jelas melanggar konstitusi. Presiden dan DPR harus bertanggung jawab atas perubahan tersebut.

Aspek lainnya, kata Feri, ialah soal *election fraud* (kecurangan pemilu). Ada dalil yang mengatakan sistem proporsional terbuka sangat potensial disusupi politik uang. Menurut Feri, itu kesimpulan yang sangat subjektif dan menyederhanakan problematika pemilu. Kalau niat penyelenggara pemilu atau peserta pemilu melakukan kecurangan, apa pun sistem pemilu pasti bisa curang, niscaya bisa menggunakan politik uang.

Problematika sistem pemilu kita ialah kebiasaan peserta pemilu menggunakan uang atau merasa uang menentukan segalanya. Ada ungkapan ‘bagi pemilih tidak ada uang tidak ada suara’ menunjukkan masalah pemilu terletak pada peserta dan penye-



MI/SUSANTO

Petugas menuntaskan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di GOR Otista, Jakarta, Minggu (25/2/2024). Penyelenggara pemilu harus bisa memberikan transparansi informasi hasil penghitungan suara kepada masyarakat selaku pemilih agar tidak ada kegaduhan yang dapat menghambat proses demokrasi di Indonesia.

lenggara. Jika peserta berkomitmen memilih model kampanye yang tidak mengandalkan uang, kata Feri, maka tidak ada peserta yang bicara tentang uang. Dalam pemilu yang baik, mestinya pemilih mengeluarkan uang untuk calon, bukan calon memberikan uang kepada pemilih agar dipilih.

Proses pencalonan anggota legislatif dalam sistem kita, kata

Feri, juga tidak melalui mekanisme yang patut. Misalnya tidak ada mekanisme pemilihan internal untuk seseorang bisa dicalonkan. Akhirnya yang menentukan ialah empat ‘perda’. Yaitu, pertalian daerah (perda) karena sesama asal, pertalian dakwah (perda) sesama organisasi, pertalian darah (perda) faktor keluarga, dan pertalian dana (perda) banyak menyumbang partai.

Kenapa perlu berubah menjadi tertutup? Alasannya sederhana. Masalahnya, dalam sistem terbuka, ketika peserta mengeluarkan uang untuk memilih, tidak ada kepastian pemilih akan memilih calon yang memberikan uang, baik dalam nominal besar maupun kecil. Sedangkan kalau sistem tertutup, cukup memengaruhi elite partai politik dengan sejumlah uang tertentu sudah ada kepastian bisa duduk di DPR, sepanjang jumlah uang itu lebih banyak daripada tawaran yang lain.

Aspek lainnya soal siapa yang diuntungkan dalam sistem tertutup atau terbuka itu? Ditinjau dari hasil Pemilu 2019, salah satu partai politik memiliki identitas partai (*party ID*) yang tinggi sehingga banyak yang mencoblos gambar partai. Itu sebabnya partai tersebut mendorong agar pemilihan dilangsungkan dengan mencoblos gambar partai politik. Sebaliknya partai dengan ID kader yang lebih kuat melihat bahwa pemilih harus diberi tawaran untuk memilih siapa yang merepresentasikan mereka di DPR. Jadi ini soal keuntungan psikologis pemilih dalam pemilu.

Jika Pemilu 2024 dilaksanakan dengan sistem tertutup dan hanya ada gambar partai politik, kata Feri, maka partai politik

dengan *party ID*-nya tinggi pada Pemilu 2019 berpotensi meraih akumulasi besar hingga 30%. Jadi ini soal keuntungan elektoral, bukan esensial.

Terakhir, soal kecenderungan mempertahankan sistem. Benar bahwa tidak ada sistem paling baik. Sistem harus dicocokkan dengan aspek konstitusional dan dengan budaya politik. Dengan penjelasan di atas, kata Feri, sistem yang paling cocok untuk budaya Indonesia pada Pemilu 2024 ialah proporsional terbuka.

Aneh kalau di tengah jalan kejekan sistem yang sudah digunakan beberapa kali hendak diakali. Justru seharusnya kejekan sistem itu dipertahankan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dalam pemilu, walaupun ada beberapa kelemahan. Akan tetapi, publik lebih mengerti sistem itu ketimbang sistem baru yang akan menimbulkan kegaduhan baru menjelang pemilu.

Menurut Feri, tidak ada alasan konstitusional apa pun yang dimiliki MK untuk mengubah sistem itu. MK sudah mengeluarkan Putusan No. 22/24/PUU/VI/2008 yang menyebutkan sistem pemilu kita mengarahkan bahwa yang paling tepat ialah proporsional terbuka. MK sudah mengatakan konstitusionalitasnya sehingga tidak boleh lagi tiba-tiba ada tafsir baru.

Ia menegaskan MK tidak memiliki landasan apa pun untuk mengubah itu. Perubahan putusan MK terhadap konstitusionalnya sesuatu hanya bisa dilakukan jika konstitusinya mengalami perubahan. Bagaimana mungkin batu ujinya tidak berubah, lalu sistem konstitusionalnya berubah. ■



Perubahan sistem pemilu harus dipastikan bukan karena interes politik, tetapi karena pertimbangan bahwa sistem pemilu yang baru itu dibutuhkan dan baik.”

Philips J Vermonte

Dekan FISIP Universitas Islam
Internasional Indonesia

3 Tidak Ada Sistem yang Sempurna

PADA dasarnya boleh-boleh saja mengubah sistem pemilu. Hanya saja, itu membawa problematika baru jika dihadapkan pada situasional menjelang Pemilu 2024. Akan sungguh merepotkan jika aturan main diubah ketika tahapan-tahapan pemilu sudah berjalan.

Dekan FISIP Universitas Islam Internasional Indonesia, Philips J Vermonte, mengatakan pertanyaannya bukan sistem pemilu mana yang mau dipakai, tetapi lebih pada apa tujuan sistem pemilu. Persoalan itu tidak pernah dituntaskan, padahal sudah disuarakan dengan baik oleh akademisi, aktivis kepemiluan, maupun yang lainnya.

Pada prinsipnya, kata Philips, tujuan besar sistem pemilu ada

dua. Satu, apakah dengan sistem pemilu yang dipakai itu akan menghasilkan sistem politik dengan derajat representasi yang tinggi (*representativeness*). Atau, kedua, apakah yang diinginkan dari hasil pemilu itu ialah tingkat *governmentability* yang tinggi.

Untuk tujuan pertama, kata Philips, sistem pemilu tertutup dianggap menjamin adanya *representativeness*, karena bisa membuat partai politik yang suaranya kecil tetap memiliki wakil di parlemen. Selain itu, organisasi-organisasi masyarakat yang pendukungnya tidak banyak, juga tetap mendapatkan perwakilan. Kalau mau meningkatkan *governmentability*, tentu saja yang ingin dihasilkan ialah orang yang terpilih itu akuntabel. Karena itu, orangnya harus bisa dilihat, dievaluasi oleh pemilih, baik menjelang maupun di hari pemilihan.

Untuk sistem proporsional tertutup, partai yang harus meningkatkan *branding* atau *party ID*. Oleh karena itu, orang akan mengasosiasikan diri dengan partai sesuai ideologi partai tersebut. Sedangkan dalam sistem terbuka, cenderung muncul ideologi orang per orang.

Tulang punggung demokrasi perwakilan ialah partai politik karena partai politikkah yang akan membuat undang-undang dan mengawasi eksekutif. Persoalannya, kata Philips, bagaimana mendemokrasikan partai politik. Untuk tujuan tersebut, mungkin proporsional tertutup lebih menjamin partai politik lebih kuat karena realitas politik menunjukkan parpol harus berkompetisi dengan orang di luar partainya, selain juga dengan teman sendiri.

Itu memengaruhi juga dalam satu daerah pemilihan bisa bertolak belakang antara satu kandidat dan kandidat lain dalam satu partai.

Akibatnya, kata Philips, ideologi dan prinsip partai diabaikan di masa pemilihan. Dalam jangka panjang, itu akan melemahkan partai politik karena mereka tidak koheren ketika berkampanye atau setelah memerintah jika memenangi pemilihan, termasuk pemilihan presiden. Dengan demikian, sisi baik sistem tertutup ialah membuat partai politik lebih koheren dan mendukung partai politik sebagai tulang punggung demokrasi.

Beberapa kajian menyebutkan sistem proporsional terbuka lebih dekat dengan tingkat korupsi. Sebetulnya yang diinginkan ialah sistem terbuka mendorong tingkat representasi yang tinggi, tetapi jalannya terjal karena korupsi, partai politik lemah, persaingan internal kuat lantaran ingin meningkatkan *governmentability*.

Tidak ada sistem pemilu yang sempurna. Masing-masing ada kelemahan. Dalam konteks itu sebetulnya, jika dilakukan perubahan sistem pemilu, dikunci dengan pasal yang menekankan bahwa perubahan itu digunakan pada pemilu berikutnya sehingga dipastikan bukan pada pemilu yang akan atau sedang berjalan.

Perubahan sistem pemilu, kata Philips, harus dipastikan bukan karena interes politik, tetapi karena pertimbangan bahwa sistem pemilu yang baru itu dibutuhkan dan baik.

Sebetulnya ada banyak cara untuk menyempurnakan sistem

pemilu jika kekhawatirannya soal bersaing satu sama lain dalam partai, atau tentang tingginya korupsi. Menurut Philips, caranya dengan mengurangi jumlah partai politik melalui penaikan ambang batas parlemen. Selain itu, dengan mengubah besarnya daerah pemilihan (dapil). Semua dapil dibuat kecil sehingga dapilnya banyak, tapi tidak mengurangi jumlah anggota DPR. Dengan begitu, jumlah caleg semakin sedikit dalam dapil.

Dengan cara itu Philips yakin tingkat representasi dan *governmentability* meningkat. Opsi tersebut juga tidak mesti mengubah konstitusi, tetapi bisa dilakukan DPR sehingga keterwakilan dan kemampuan memerintah dalam negara bisa lebih optimal. Oleh karena itu, debat soal proporsional terbuka dan tertutup seharusnya dilihat dalam konteks jangka panjang. ■



Korupsi masih dipandang sebagai kejahatan yang lebih besar untungnya daripada risikonya. Sanksi penerapan pasal hukum yang dilakukan penegak hukum tidak menimbulkan efek jera.”

Almas Ghaliya Putri Sjafrina
Indonesia Corruption Watch (ICW)

4 Sama-Sama Koruptif

SALAH satu alasan munculnya wacana mengubah sistem pemilu dari terbuka menjadi tertutup karena sistem terbuka melahirkan banyak korupsi politik. Itu tidak salah.

Menurut Almas Ghaliya Putri Sjafrina dari Indonesia Corruption Watch (ICW), data ICW dari 2010 hingga 2019 mencatat ada 586 anggota DPR dan DPRD ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi. Demikian pula ada 294 kepala daerah ditetapkan sebagai tersangka perkara korupsi oleh penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, dan KPK).

Faktor pemicu korupsi itu beragam, tidak hanya lantaran pemilu berbiaya tinggi. Faktor lainnya ialah orientasi kandidat, apakah dia mengikuti kontestasi karena memperjuangkan nilai dan kebaikan bersama atau semata ingin mendapatkan kekuasaan dan sumber daya.



MI/USMAN ISKANDAR

Hakim konstitusi mengucapkan amar putusan sistem Pemilu 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (15/6/2023). Mahkamah Konstitusi menolak permohonan sistem proporsional tertutup dan tetap menggunakan sistem proporsional terbuka dalam Pemilu 2024. Sistem pemilu terbuka atau tertutup selalu dihubungkan dengan politik uang dan korupsi.

Selain itu, kata Almas, ICW melihat korupsi masih dipandang sebagai kejahatan yang lebih besar untungnya daripada risikonya. Sanksi penerapan pasal hukum yang dilakukan penegak hukum tidak menimbulkan efek jera. Dalam regulasi pemilu, dari dulu ada muatan terselubung soal politik uang, misalnya soal dana saksi. Hal itu bisa dicarikan alternatif, seperti saksi harus

kader partai sehingga tidak perlu membayar orang lain.

Politik uang, kata Almas lagi, tidak hanya identik dengan jual beli suara. Ada bentuk-bentuk lain yang membuat pemilu berbiaya tinggi, antara lain mahar politik yang rasanya sudah menjadi kebiasaan.

Soal sistem pemilu terbuka atau tertutup selalu dihubungkan dengan politik uang dan korupsi. Namun, pertanyaannya, sistem pemilu mana yang bisa lebih mendorong demokrasi, atau membuat pemerintahan bisa lebih bersih atau lebih sehat?

Jual beli suara pada sistem terbuka terjadi antara kandidat dan pemilih, sedangkan pada sistem tertutup terjadi antara kandidat dan partai politik ketika nomor urut menjadi penentu. Dari aspek pengawasan pun tidak sederhana. Jual beli nomor urut itu terjadi di ruang gelap dan sulit bagi publik memonitor. Adapun dalam sistem terbuka, *money politics* masih mungkin diawasi masyarakat karena terjadi di ruang terbuka dan diawasi Bawaslu.

Fakta lain, kata Almas, kepercayaan publik terhadap partai politik masih rendah jika dibandingkan dengan institusi lain. Di tengah kondisi seperti itu, penerapan sistem tertutup bukan makin mendekatkan partai politik kepada masyarakat. Dalam sistem tertutup, proses pengambilan kebijakan tidak melibatkan masyarakat karena para caleg tidak dikenal dan tidak merepresentasikan rakyat di DPR. Selain itu, masyarakat tidak memiliki ruang untuk mengevaluasi wakil rakyat walaupun misalnya kinerja mereka tidak baik, karena yang berwenang menentukan siapa

yang menjadi wakil rakyat ialah partai politik.

ICW, tambah Almas, tidak melihat sistem pemilu tertutup menjamin biaya politik murah. Keduanya sama saja akan mengakibatkan biaya politik yang besar. Politik uang tetap berpotensi tinggi untuk muncul serta merusak pemilu dan memicu korupsi.

Publik hanya diberikan wacana sistem pemilunya dari terbuka ke tertutup, tapi tidak ada tawaran-tawaran lain, misalnya bagaimana meningkatkan demokrasi, bagaimana mewujudkan partai politik yang tidak absen dari persoalan publik, bagaimana politik uang betul-betul diminimalisasi. Itu semua tidak ada. ■



Wacana agar sistem pemilu kembali ke masa lampau juga menjadi bagian dari konsolidasi menuju otoritarianisme.”

Abdul Kohar

Wartawan Media Indonesia

5

Memicu Turbulensi Politik

SISTEM pemilu proporsional terbuka memang relatif lebih dekat dalam perspektif konstitusional UUD 1945. Karena itu, jika MK membuka ruang mengubah sistem proporsional terbuka menjadi tertutup, mungkin akan memicu turbulensi politik.

Peringatan itu dikemukakan Atang Irawan, Staf Khusus Wakil Ketua MPR RI, dalam diskusi yang diadakan Forum Diskusi Denpasar 12 itu. Turbulensi politik itu sebagai ruang ekspresi penolakan dari publik karena memang rangkaian konstruksi berpikir konstitusi kita lebih dekat dengan proporsional terbuka.

Atang menegaskan MK akan sulit menerabas sistem terbuka karena dalam amar putusan sebelumnya mereka telah memper tegas bahwa sesungguhnya proporsional terbuka menjadi resmi dalam rangka proses kontestasi politik di Indonesia terkait de-

ngan pemilihan anggota DPR dan DPRD.

Ahli hukum tata negara itu membenarkan bahwa tidak ada relevansi antara sistem pemilu dan *money politics* karena dua-duanya juga berimplikasi terhadap *money politics*. Perbedaannya, dalam sistem tertutup, *money politics* terjadi di internal partai politik, sedangkan dalam sistem terbuka *money politics* terjadi antara caleg dan pemilih. Jadi soal *money politics* tidak ada korelasinya secara permanen dengan salah satu sistem pemilu.

Isu perubahan sistem pemilu yang dihembuskan menjelang pemilu, kata Atang lagi, bukan mustahil sebagai bagian dari ‘cek ombak’ untuk skenario penundaan pemilu. Skenario ‘cek ombak’ penundaan pemilu dilakukan berulang-ulang.

Pertama dengan menggunakan pola amendemen terbatas UUD 1945, tetapi gagal karena konfigurasi di MPR tidak menghendaki amendemen, selain masyarakat juga menolak. ‘Cek ombak’ kedua melalui referendum, meskipun lupa misalnya bahwa semua peraturan tentang referendum sudah dicabut. Ketiga melalui dekret, dan keempat lewat pengujian sistem pemilu melalui MK, yang jika dikabulkan menjadi tertutup, butuh waktu penundaan sekitar dua tahun untuk keperluan sosialisasi aturan baru itu.

Wartawan *Media Indonesia* Abdul Kohar, ketika menutup diskusi tersebut, mengatakan masyarakat sekarang dipenuhi pikiran skeptis karena indeks demokrasi Indonesia di 2022 stagnan di skor 6,7. Bahkan pada 2020 sempat turun drastis. Indikatornya antara lain berkurangnya kebebasan sipil, menurunnya

budaya politik, termasuk kekhawatiran tentang pemilu.

Menurut Kohar, transisi demokrasi di dunia ketiga kerap berjalan tidak mulus. Mengapa? Karena ada kepentingan kaum lama atau otoritarianisme untuk kembali mengonsolidasikan diri. Ketika otoritarianisme berganti menjadi *post*-otoritarianisme, kita memilih jalan reformasi.

Wacana agar sistem pemilu kembali ke masa lampau, kata Kohar, juga menjadi bagian dari konsolidasi menuju otoritarianisme. Ini harus dicegah bersama karena jadwal pemilu sudah berjalan. Pengujian sistem pemilu belum sepenuhnya dipercaya untuk tujuan yang sesuai dengan akal sehat, atau justru merupakan bagian dari upaya serius penundaan pemilu. Maka, upaya itu harus dicegah jika kita tidak ingin kembali ke era otoritarianisme. ■





Pilkada: Ditunda atau Lanjut?

1 Latar Belakang: Hajatan Politik di Tengah Merebaknya Covid-19

PADA 20 Juli 2020 Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2020. Perpres ini mengatur mengenai pembentukan komite penanganan covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden.

Pembentukan komite itu merupakan sinyal kuat bahwa penanganan pandemi covid-19 akan diselaraskan dengan upaya pemulihan ekonomi. Karena itu, pemerintah menganggap penting adanya Satgas Penanganan Covid-19, Satgas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi, serta Komite Kebijakan.

Dalam rapat terbatas yang digelar di Istana pada Senin, 14 September 2020, Presiden Jokowi menyampaikan beberapa

pokok kebijakan penting terkait dengan audit sistem kesehatan nasional secara menyeluruh. Intinya, pemerintah berkomitmen mendukung secara penuh daerah-daerah yang memiliki tingkat penyebaran covid-19 tinggi.

Dalam konteks tersebut, pemerintah meminta daerah agar berhati-hati dalam menerapkan pembatasan nasional, terutama terkait dengan aktivitas yang mengumpulkan banyak orang (kerumunan). Fakta di lapangan, kapasitas rumah sakit terbatas sehingga terancam penuh. Jika itu berlangsung terus-menerus, sistem kesehatan bisa kolaps.

Jika melihat perkembangannya, kasus penularan covid-19 secara nasional juga tak bisa dipandang remeh. Hingga memasuki September 2020, angka positif covid-19 terkonfirmasi sebanyak 218.382 kasus. Dari jumlah itu, 155.010 orang dinyatakan sembuh, sedangkan yang meninggal mencapai 8.723 orang.

Tingkat penularan covid-19 di ranah global juga belum menunjukkan tanda-tanda penurunan. Tercatat lebih dari 28 juta orang terinfeksi virus yang awalnya bersal dari Tiongkok tersebut, dengan jumlah kematian mencapai 922 ribu jiwa.

Dari perkembangan yang terpantau, grafik kasus positif covid-19 di Indonesia terus menunjukkan peningkatan. Beberapa pakar epidemiologi menyebutkan Indonesia masih belum mencapai puncak gelombang pertama. Itu di satu sisi. Di sisi yang lain, proses politik, khususnya pemilihan kepala daerah (pilkada) kini sedang berjalan. Proses hajatan politik tersebut akan mencapai

fase kritikal saat kampanye dan pemungutan suara pada Desember 2020.

Banyak warga masyarakat yang menyatakan khawatir akan terjadinya klaster-klaster baru penyebaran covid-19 selama pilkada. Terutama seusai fase pendaftaran pasangan calon (paslon) pada 4-6 September 2020. Pada fase tersebut, tercatat 243 daerah dari 270 daerah yang menyelenggarakan pilkada serentak gagal menghentikan kerumunan massa dalam jumlah besar.

Melihat perkembangan terakhir pandemi covid-19 dan proses pilkada yang sedang berlangsung di Tanah Air dalam beberapa waktu terakhir, maka Forum Diskusi Denpasar (FDD) 12 menggelar diskusi untuk membahas isu strategis tersebut.

Pilkada memang bagian dari agenda besar bangsa dan negara. Persoalannya, dalam situasi pandemi covid-19 seperti sekarang, apakah Pilkada 2020 akan ditunda atau tetap dilanjutkan? ■



Penundaan pemilu
dilakukan semata-mata
karena faktor kesehatan
jauh lebih penting
ketimbang politik.”

Lestari Moerdijat
Wakil Ketua MPR RI

2 Pilihan Sulit

WAKIL Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menjelaskan, FDD 12 menggelar diskusi ini bukan berpretensi bahwa forum ini nantinya akan mendesak pemerintah untuk menunda atau melanjutkan pilkada di saat pandemi covid-19.

“FDD 12 mencoba melihat fakta-fakta yang ada sebagai sebuah kondisi yang terbuka. Artinya, jika pemerintah mengambil keputusan untuk melanjutkan pilkada, tentu ada dasar-dasar pemikiran yang kemudian menjadi bahan bagi pemerintah untuk melanjutkan,” kata Lestari.

Ia melanjutkan, “Tetapi, di sisi yang lain, kita juga tidak bisa dan tidak boleh menafikan bahwa saat ini pertumbuhan angka covid-19 di Indonesia sudah mencapai ribuan orang meninggal dunia.”

Bahkan dalam beberapa hari terakhir sama sekali tidak ada gejala yang menunjukkan jumlah kasus positif covid-19 melandai.

Lestari bertanya, apa yang harus kita lakukan kalau pilkada kemudian kita lanjutkan? Lalu, persiapan-persiapan apa yang harus kita lakukan, dan di titik manakah kita harus melakukan evaluasi? “Kalau kemudian kita memutuskan harus mengubah haluan dan putar setir bahwa pilkada ini ditunda, apa langkah kita selanjutnya?”

Menurut perempuan yang akrab disapa Rerie itu, pihaknya mendapatkan banyak masukan dari berbagai pihak yang sangat mengkhawatirkan. Pihak-pihak yang mengkhawatirkan tersebut menyatakan pilkada serentak bukan hanya proses pada hari H-nya, tetapi juga diawali dengan proses persiapan yang betul-betul dan sungguh-sungguh membutuhkan sebuah pekerjaan besar yang melibatkan kesigapan semua pihak.

Agar semua pihak betul-betul bisa menyiapkan sebuah pesta demokrasi, kata Rerie, proses pemilihannya tidak cukup hanya berpikir dari sisi demokratis, tetapi harus pula betul-betul memikirkan bagaimana pesta demokrasinya memenuhi protokol kesehatan.

Karena terbilang cukup berat dan berisiko, menurut Rerie,

ada beberapa negara yang menunda pemilu. Itu dilakukan semata-mata karena faktor kesehatan jauh lebih penting ketimbang politik. Namun, dalam konteks Indonesia dan isu diskusi FDD 12, yang mana yang mau diputuskan, lanjut atau tunda? “Kalau kita memberikan rekomendasi dilanjutkan, bagaimana sistem kontrolnya? Apa yang akan kita lakukan?” tandas Rerie.

Pertanyaan selanjutnya, ungkap Rerie, pada titik mana kita harus melihat kondisi atau mengambil kembali keputusan untuk mengevaluasi jika kita menunda?

Dua keputusan ini (ditunda atau lanjut) harus dipikirkan bersama. “Pemerintah sudah menyampaikan keputusan, kemudian bagaimana kita menyikapi dan bagaimana kita bersama-sama melakukan persiapan-persiapan tanpa menafikan apa yang diminta oleh masyarakat bahwa sebagian besar masyarakat memang masih tetap menginginkan pilkada dilanjutkan,” demikian Rerie. ■



Orkestrasi yang tepat dan terukur dengan baik akan menjadi instrumen yang sangat tepat untuk memerangi covid-19 saat pilkada.”

Akmal Malik

Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri

3 Pilkada Instrumen Perang Melawan Covid-19

DIRJEN Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Akmal Malik menjelaskan bahwa pemerintah telah bersepakat untuk tetap melanjutkan tahapan Pilkada Serentak 2020 sampai dengan pencoblosan pada 9 Desember 2020.

Berdasarkan tahapan-tahapan yang telah dibuat oleh penyelenggara, jelas Akmal, “Kita sudah sampai pada tahapan yang ke-9, yakni pendaftaran pasangan calon. Bahkan juga sudah mulai ke penetapan pasangan calon pada 23-24 September.”

Pada 21 Maret 2020, seiring dengan terjadinya pandemi covid-19, KPU sudah menunda tahapan ke-5. Setelah berkonsultasi dengan Komisi II DPR RI, jelas Akmal, pemerintah dan penyelenggara, dalam hal ini KPU, kemudian menyepakati bahwa tahapan bisa dilaksanakan atau dilanjutkan dengan menggunakan protokol kesehatan.

Tahapan-tahapan selanjutnya seperti verifikasi faktual,

menurut Akmal, juga sudah dilakukan. Pada tahapan awal ini banyak pihak yang mengkhawatirkan para penyelenggara akan terpapar covid-19. “Alhamdulillah, ternyata hasilnya berjalan dengan baik. Kami memang belum mendapatkan hasil yang detail, tapi informasi yang kami dapat dari penyelenggara, mulai dari tahapan ini tidak ada penyelenggara yang terpapar covid-19,” kata Akmal.

Tahapan ke-3 pada 4-6 September 2020 ialah kegiatan pendaftaran pasangan calon. “Soal ini, kita sudah wanti-wanti dari awal agar ketika sudah sepakat untuk meneruskan tahapan pilkada, protokol kesehatan harus diaati,” ujarnya.

Namun, imbuh Akmal, ternyata pada 4 September 2020 terjadi pelanggaran terhadap aturan yang sudah disepakati. Pemerintah kemudian bergerak cepat dengan memberikan teguran keras kepada beberapa pihak. Teguran keras sudah diberikan kepada beberapa kepala daerah yang masih menjabat. Sebanyak 85 kepala daerah mendapat teguran cukup keras. “Setelah itu, kita memantau, ternyata rata-rata kepala daerah yang sudah tertegur mulai mengubah perilaku,” tambah Akmal.

Ia melanjutkan, melalui beberapa koordinasi di daerah masing-masing, mereka sudah membuat kesepakatan bersama dan membuat pernyataan bersama akan mendukung pelaksanaan pilkada dengan protokol kesehatan yang ketat.

Setelah itu, beberapa kali pihak-pihak terkait melaksanakan rapat koordinasi yang dipimpin Menko Polhukam Mahfud MD

dan Mendagri Tito Karnavian, bahkan melibatkan seluruh pasangan calon. Ada kurang lebih 739 pasangan calon (paslon) yang diminta untuk hadir dalam kegiatan-kegiatan secara virtual. Menko Polhukam dan Mendagri meminta tanggung jawab, kerja sama dari semua pihak, agar tahapan-tahapan selanjutnya dapat berjalan dengan menggunakan protokol kesehatan yang ketat.

“Kami dapat memahami dinamika yang terjadi. Beberapa waktu terakhir, sejumlah ormas mendesak dan memberikan masukan bahwa seharusnya pemerintah perlu meninjau ulang terkait dengan tahapan pilkada yang akan dilakukan,” tutur Akmal.

Ia memaklumi apa yang disampaikan *civil society* sebagai bentuk dari kecintaan mereka terhadap bangsa dan negara sekaligus lecutan bagi pemerintah untuk lebih hati-hati, lebih waspada, bahwa kondisi pandemi covid-19 memang belum menunjukkan tanda-tanda mereda. “Tetapi sejak awal kita bersepakat untuk meneruskan tahapan pilkada dan sudah menyampaikan kepada teman-teman penyelenggara dan DPR RI bahwa Kemendagri memiliki keyakinan Pilkada 2020 bisa menjadi momentum untuk melawan covid-19,” ujar Akmal.

Tentu sepanjang aturannya tepat dan ditaati. Artinya seluruh protokol kesehatan dilaksanakan oleh semua pihak, meskipun faktanya kondisi masyarakat di beberapa tempat ada yang abai dengan hal-hal seperti itu.

Akmal juga memahami bahwa ada pihak-pihak lain yang sangat mengkhawatirkan pilkada dengan segala prosesnya akan



M/IRAMDANI

Petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) menggunakan alat pelindung diri (APD) mendampingi pemilih memasukkan kertas suara saat pelaksanaan Pilkada Kota Tangerang Selatan 2020 di TPS 46, Paku Jaya, Serpong Utara, Tangerang Selatan, Banten, Rabu (9/12/2020). TPS 46 secara swadaya melengkapi petugas KPPS menggunakan seragam APD untuk mencegah penyebaran covid-19.

memunculkan kluster-kluster baru covid-19. “Kami sangat memahami itu, apalagi jika ada pihak-pihak yang tidak mematuhi protokol kesehatan.”

Ia meyakini, orkestrasi yang tepat dan terukur dengan baik akan menjadi instrumen yang sangat tepat untuk memerangi covid-19 saat pilkada. “Kami memandang pilkada ini adalah se-

buah instrumen yang tepat ketika orkestrasinya dijalankan secara ketat dan juga tepat,” ujar Akmal.

“Kita siap perang melawan covid-19. Kita membutuhkan alat-alat seperti masker, *hand sanitizer*, pencuci tangan, dan alat-alat lain. Pertanyaannya, bagaimana kita menggerakkan masyarakat agar mau melaksanakan ini semua. Pilkada adalah *event* yang bisa mendorong masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan,” kata Akmal.

Ia berandai-andai, kalau saja tiap-tiap paslon punya 100 anggota tim sukses, kurang lebih ada 700 ribu orang yang akan bergerak dan berjuang menggerakkan kepentingan-kepentingan sang paslon. “Kalau calon bisa kita paksa, bisa kita dorong untuk menyamakan ide, menyamakan topik, dan pada saat ini fokus perang terhadap covid-19, maka ini akan menjadi sebuah kekuatan yang luar biasa,” ungkap Akmal.

Saat ini, menurut Akmal, mungkin banyak petugas kesehatan dan pegawai pemerintah yang turun ke lapangan melakukan edukasi, tetapi sering kali tidak optimal. Situasinya mungkin akan berbeda ketika ada tim sukses, ada calon yang akan bertarung dalam pilkada dan memberikan edukasi kepada masyarakat. “Ini pasti akan lebih bagus. Kenapa? Karena mereka memiliki kepentingan untuk memengaruhi masyarakat. Inilah barangkali PR yang harus kita kerjakan ke depan.”

Akmal menyatakan bahwa itulah semangat yang diusung oleh pemerintah sekarang. “Kita membutuhkan sinergitas. Kita mem-

butuhkan kebersamaan agar pilkada betul-betul menjadi instrumen perang untuk melawan covid-19,” tukasnya.

Penyediaan Anggaran Bermasalah

Senada dengan Akmal Malik, Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy’ari mengatakan, pada prinsipnya Pilkada 2020 harus dilaksanakan semaksimal mungkin dan sukses. Dengan begitu, perhelatan tersebut dapat berlangsung dengan prinsip dan asas-asas sebagai bagian dari pemilu yang demokratis. Ini harus bisa dipenuhi dalam Pilkada 2020.

Asas demokratis dalam UUD 1945 ialah umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. “Ini yang harus kita penuhi. Ini sebuah tantangan dalam konteks penyelenggaraan pilkada,” tambah Hasyim.

Berbeda dengan pilkada-pilkada sebelumnya, menurut dia, ada tugas tambahan yang harus dilaksanakan pada Pilkada 2020 karena digelar bertepatan dengan situasi pandemi covid-19 sehingga mau tidak mau harus dilakukan dengan standar protokol kesehatan.

Sebelumnya sekitar Maret 2020, menurut Hasyim, KPU membuat pertimbangan yang pada akhirnya sampai pada kesimpulan mengambil keputusan menunda Pilkada 2020 lantaran ada situasi pandemi covid-19 dan status darurat bencana nasional.

Kemudian, di internal KPU pun muncul pandangan bahwa covid-19 bukan sekadar gangguan potensial, tetapi sudah menjadi gangguan faktual. Pada waktu itu, setelah bimbingan teknis

pemuktahiran daftar pemilih gelombang kedua di Jakarta (dari tiga gelombang yang dilaksanakan), beberapa peserta terinfeksi covid-19. “Dalam pandangan kami, ini menjadi gangguan. Berdasarkan itu, kami menetapkan penundaan pilkada,” kata Hasyim.

KPU kemudian merancang kegiatan dalam durasi waktu yang tersedia, apa saja yang masih harus dipersiapkan dan dilakukan. Salah satu syarat yang diajukan KPU, kalau pilkada memang akan dilanjutkan, standar protokol kesehatan pencegahan covid-19 mesti dilakukan secara ketat, dan untuk mencapai itu tentu diperlukan pembiayaan.

“Soal biaya ini, setelah kami komunikasikan dan koordinasikan dengan teman-teman KPU di daerah, semua menyatakan pemerintah daerah angkat tangan karena dana untuk penyelenggaraan pilkada terkait aspek teknis elektoral saja masih problematik,” ungkap Hasyim.

Ia menambahkan, sampai 23 September 2020, dari 270 daerah yang akan menggelar pilkada, dana Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), yakni APBD yang dihibahkan untuk menyelenggarakan pilkada yang sudah ditransfer 100%, baru 259 daerah. Itu menunjukkan bahwa proses pencairan untuk penyelenggaraan pilkada saja masih bermasalah, apalagi kalau ditambah dengan biaya pencegahan covid-19.

Hasyim mengatakan, penting untuk dikaji ulang, ke depan untuk pembiayaan pilkada, apakah masih dipertahankan menggunakan APBD?

Ia mengajukan pertanyaan reflektif, apa tujuan pemilu? Dia menjelaskan tujuan pemilu ialah membentuk pemerintahan. Pemerintahan adalah relasi politik antara eksekutif dan legislatif. Kalau di tingkat pusat adalah relasi antara Presiden dan DPR. Tujuan pemilu ialah mengisi jabatan presiden dan DPR sebagai bagian dari pemerintahan.

Demikian juga pilkada. Hasyim menjelaskan, tujuannya untuk pemerintahan daerah. Pilkada harusnya ialah memilih pejabat eksekutif kepala daerah dan juga mengisi jabatan DPRD. Akan tetapi, selama ini yang terjadi, kata Hasyim, “Kalau kita baca UU Pemerintah Daerah, yang namanya pemerintahan daerah itu kepala daerah dan DPRD. Tetapi untuk mengisi jabatan ini, mengapa menggunakan biaya yang berbeda? Mengisi jabatan anggota DPRD menggunakan APBN, tetapi untuk mengisi jabatan kepala daerah memakai APBD.”

Menurut Hasyim, ke depan penting untuk dicarikan jalan keluar. Mestinya sama-sama menggunakan APBN.

Fakta berikut juga disebut Hasyim menjadi problematik terkait soal pembiayaan pilkada. “Teman-teman KPU di daerah, kalau mau mengajukan anggaran penyelenggaraan pilkada, membawa proposal ke pemda. Ini kesannya seperti ngemis-ngemis, tarik ulur. Ada kemungkinan kalau kepala daerahnya itu mencalonkan diri lagi, pilkadanya lancar. Tapi kalau kepala daerahnya tidak mencalonkan diri lagi, anggaran pilkadanya seret.”

Hasyim memberikan contoh pengalaman Pemilu Gubernur

(Pilgub) Lampung 2013. Pada waktu itu, sesuai jadwal Pilgub Lampung harus dilakukan tahun 2013. Namun, karena anggarannya belum tersedia, pencoblosannya ditunda sampai 2014. “Ini pengalaman pertama pemilu serentak *by accident* yang terjadi di Lampung. Oleh karena itu, ke depan, aspek ini penting untuk ditata ulang.”

Ia juga mengusulkan, karena sesuatu hal, daerah sudah tak sanggup lagi membiayai pilkada, pemerintah pusat sebaiknya menyediakan anggaran untuk pembiayaan protokol kesehatan terkait covid-19. ■



Berdasarkan evaluasi yang dilakukan selama proses tahapan pilkada, kita bisa melihat bahwa tahapan yang paling krusial ialah ketika ada penumpukan massa.”

Fritz Edward Siregar
Komisioner Bawaslu RI

4 Berpotensi Memicu Konflik

HARUSKAH Pilkada Serentak 2020 tetap digelar di saat pandemi covid-19? Komisioner Bawaslu RI Fritz Edward Siregar menjelaskan, jawaban atas pertanyaan itu sudah dibahas intens dengan pihak-pihak terkait pada Februari, Maret, April, dan Mei.

Berbagai hal, menurut Fritz, juga sudah dipertimbangkan, baik menyangkut anggaran maupun pergantian pejabat yang akan selesai pada Februari. Ada pula wacana, kalau ditunda ke 2021, apakah sudah ada kepastian bahwa pandemi covid-19 akan berakhir?

Bagaimana pula konflik yang akan muncul setelah keputusan harus ditunda? “Apakah kita akan berpindah dari satu konflik ke konflik yang berikutnya?” kata Fritz.

Penundaan pilkada, disebut Fritz, juga berdampak pada pergerakan ekonomi di daerah yang juga akan berpengaruh se-

cara nasional. “Bagaimana dengan pendapatan asli daerah (PAD) di berbagai daerah, karena banyak daerah yang hanya mengandalkan dana alokasi khusus (DAK) dan dana alokasi umum (DAU).”

Berbagai kemungkinan itu, menurut Fritz, sudah dipertimbangkan oleh pemerintah, penyelenggara pemilu, dan Komisi II DPR. Pada akhirnya disepakati untuk melanjutkan pilkada pada 2020 dengan dua syarat.

Konsekuensinya, penerapan protokol kesehatan secara ketat. Dalam masa pandemi, menurut Fritz, ada 31 negara juga punya agenda pemilu. Ada pilpres, pileg, dan pilkada seperti Indonesia. Fritz menyebut, dari ke-31 negara itu, beberapa di antaranya ialah Amerika Serikat, Singapura, Korea Selatan, dan Irak. Mereka akan melaksanakan pemilu pada 2021.

Khusus di Indonesia, kata Fritz, pelaksanaannya akan dilakukan dengan sejumlah modifikasi, seperti jumlah tempat pemungutan suara (TPS) diperkecil, juga jumlah pemilih di TPS. Pemerintah akan memberikan anggaran tambahan kepada KPU dan Bawaslu untuk pengadaan alat pelindung diri (APD), *rapid test*, dan vitamin untuk penambah daya tahan tubuh.

Saat ini pilkada telah menyelesaikan tahapan 4, 5, dan 6. Bawaslu memantau sampai sejauh mana penyelenggara pemilu dan warga masyarakat mematuhi protokol kesehatan. Yang pasti, kata Fritz, “Kami melakukan *rapid test* secara teratur guna mencegah penyebaran covid-19 di antara para penyelenggara.”

Namun, berdasarkan hasil pengawasan dari Bawaslu, dari 270 daerah yang melaksanakan pilkada, sebanyak 243 daerah melakukan pelanggaran protokol kesehatan. “Ini menjadi *wake up call* bagi kita semua, khususnya bagi kami penyelenggara, pemerintah, dan juga DPR bahwa ternyata niat untuk melaksanakan protokol kesehatan itu kurang dihormati atau tidak dilaksanakan sebagaimana diatur dalam PKPU No. 6/2020 dan Perbawaslu No. 4/2020,” ujar Fritz.

Ia melanjutkan, “Terhitung sejak 6 September 2020 sampai dengan sekarang, kita melakukan berbagai rapat yang tidak henti-hentinya bahwa kita semua ingin melaksanakan pilkada pada 2020, tetapi bagaimana protokol kesehatan tetap ditegakkan.”

Bawaslu juga telah dua kali melakukan rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR. Pada 21 September 2020 menjadi momen penting karena Komisi II, pemerintah, dan penyelenggara membuat satu kesimpulan bahwa Pilkada 2020 tetap dilanjutkan dengan penegakan protokol kesehatan yang tegas.

Dalam kesimpulan itu, kepolisian juga diperintahkan untuk menegakkan dan menggunakan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan, juga Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kampanye dengan cara mengumpulkan banyak orang seperti konser atau pertunjukan musik juga ditiadakan. “Jadi kegiatan-kegiatan yang melibatkan banyak orang dihilangkan. Tidak

akan ada lagi konser musik, acara ulang tahun partai, bazar, dan pertunjukan seni,” tegas Fritz.

Berdasarkan evaluasi yang dilakukan selama proses tahapan pilkada, kita bisa melihat bahwa tahapan yang paling krusial ialah ketika ada penumpukan massa. “Penumpukan massa itu terjadi pada saat kampanye dan hari pemungutan suara. KPU dan Bawaslu sudah menerapkan apa yang bisa kami lakukan. Kami juga sudah berkoordinasi dengan berbagai partai politik agar menertibkan kader-kadernya,” demikian Fritz.

Bom Atom Demokrasi Pilkada

Lalu, bagaimana sikap ormas keagamaan seperti Nahdlatul Ulama terkait dengan Pilkada 2020, lanjut atau tunda?

Sekjen Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Helmi Faisal Zaini menjelaskan, lima hari yang lalu pihaknya telah mengeluarkan rilis yang berisi keprihatinan karena jumlah warga masyarakat yang terkonfirmasi positif covid-19 telah mencapai 248 ribu.

Saat tahap pendaftaran pilkada, deklarasi paslon, sampai kemudian pengenalan paslon, menurut Helmi, ternyata menggunakan cara-cara yang dapat disimpulkan bahwa mereka yang akan berkontestasi pada pilkada telah melakukan pelanggaran dengan jumlah mencapai 230 kasus.

Bahkan ada paslon yang terindikasi berstatus positif covid-19 ternyata masih melakukan acara tatap muka dengan timnya, dan



MI/SUSANTO

Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) mengenakan seragam sekolah di TPS 49 Cendana Residence, Tangerang Selatan, Banten, Rabu (8/12/2020). Tema seragam sekolah tersebut sebagai bentuk kerinduan bersekolah di masa pandemi covid-19 sekaligus merayakan pesta demokrasi.

melakukan pendaftaran ke KPUD.

Melihat dua realitas tersebut, jelas Helmi, maka PBNU memandang bahwa konstitusi syariah menyebutkan, jika ada satu unsur terpenting demi menjaga kesehatan jiwa, keselamatan setiap nyawa dari warga negara Indonesia dan keselamatan manusia, “Maka ini sesuatu yang harus dijadikan sebagai patokan atau

dasar dalam mengambil berbagai macam kebijakan.”

Helmi melanjutkan, para ulama NU bahkan telah sepakat menggunakan satu kaidah fikih bahwa untuk menghindari dari kebinasaan itu harus didahulukan ketimbang mengambil masalah.

Pilkada 2020, menurut Helmi, akan diikuti 1.468 paslon. Dengan menggunakan asumsi bahwa setiap paslon akan menggunakan 10 titik dalam masa kampanye selama 71 hari, maka akan ada sebaran manusia di 14.680 titik. “Kalau kita kalikan dengan 71 hari, akan muncul yang namanya klaster ‘bom atom demokrasi’ di Pilkada 2020. Ya, ini sangat terbuka sekali. Jadi ini sesuatu yang sangat mengerikan dan mengkhawatirkan,” tutur Helmi.

Fakta di lapangan, masih menurut Helmi, belum semua kelompok masyarakat bisa berdisiplin menerapkan protokol kesehatan yang baik. “Kita belum punya satu *success story*, baik di kabupaten maupun kota yang bisa kita jadikan indikator bahwa kita sudah bisa menangani upaya-upaya pencegahan penambahan kasus covid-19,” katanya.

Helmi melanjutkan, berbeda cerita jika kita melihat cerita di Sydney, Australia, atau berbagai negara lain. Mereka berhasil memberlakukan disiplin protokol secara ketat.

“Kalau melihat kondisi kita hari ini, PBNU memandang bahwa penyelenggaraan Pilkada 2020, kalau kita paksakan dengan model keteledoran kita seperti yang kita lihat hari ini, maka dalam pandangan PBNU, kita semuanya memiliki satu alternatif untuk

menunda sampai kita bisa memastikan bahwa situasi sangat memungkinkan dan aman bagi proses penyelenggaraan pilkada,” tegas Helmi.

Namun, ia mengatakan, kalau memang mau dipaksakan, ada satu tahapan yang paling rawan di dalam penularan covid-19 yang harus diperhatikan, yaitu masa kampanye, terutama kampanye yang bersifat terbuka dan kampanye tatap muka langsung.

Pertanyaannya, “Apakah mungkin kita menghilangkan satu tahapan kampanye tatap muka ini, lalu digantikan dengan model virtual, misalnya. Kalau ini dimungkinkan, setidaknya kita sudah mengurangi potensi terjadinya penularan 80%,” tukasnya.

PBNU mengajak semua pihak untuk mempertimbangkan bahwa keselamatan jiwa dan nyawa warga negara adalah yang utama. ■



Saat negara dan segenap warga tengah berupaya mencegah covid-19, akan menjadi ironi kalau pilkada serentak dengan anggaran Rp27,84 triliun justru menjadi arena penyebaran virus korona.”

Abdul Rohim Ghazali

Sekretaris Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik
(LHKP) Pimpinan Pusat Muhammadiyah

5 Utamakan Keselamatan Jiwa

SENADA dan seirama dengan NU, Pimpinan Pusat Muhammadiyah juga mengusulkan agar Pilkada Serentak 2020 ditunda.

Abdul Rohim Ghazali, Sekretaris Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Pimpinan Pusat Muhammadiyah, menegaskan, “Kami dari Muhammadiyah mengusulkan agar pilkada ditunda sampai pada waktu tertentu.”

Ada sejumlah alasan mengapa PP Muhammadiyah berpendapat Pilkada Serentak 2020 harus ditunda. Ghazali menjelaskan, pertama, ada landasan konstitusional bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

“Jadi ini adalah landasan pokok dalam kehidupan bernegara

dan berbangsa, yakni UUD 1945 Pasal 28G. Karena kami organisasi Islam, maka dalam menjalankan tugas-tugas, kami dalam mengambil keputusan tidak bisa lepas juga dari landasan agama Islam. PP Muhammadiyah mengutip Surat Al-Baqarah ayat 195, “Janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinaasaan.”

Kedua, selama pandemi covid-19, Muhammadiyah, seperti juga NU, Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan organisasi-organisasi keagamaan lain, imbuh Ghazali, “Sudah mengeluarkan semacam fatwa keagamaan, misalnya tidak salat berjemaah di masjid, tidak salat Id saat Idul Fitri dan Idul Adha, juga tidak menjalankan ritual-ritual yang sifatnya mengumpulkan orang.”

Ketiga, fatwa itu dikeluarkan karena Muhammadiyah menganggap kegiatan-kegiatan tersebut membahayakan dan tidak sesuai dengan apa yang didalilkan dalam Islam. Dengan demikian, menjaga jiwa atau kehidupan lebih diutamakan di atas segala-galanya.

Ghazali mengatakan, saat pandemi covid-19 berkembang isu vaksinasi covid-19 haram. “Karena menjaga jiwa lebih penting daripada hal-hal yang terkait dengan agama, maka yang haram itu bisa diabaikan kalau memang itu ditujukan untuk menjaga jiwa dan kesehatan. Oleh karena itu, ada kaidah fikih bahwa menghindari bahaya lebih diutamakan daripada mengambil manfaat.

Memberikan contoh, Ghazali menjelaskan, melakukan salat banyak manfaatnya. “Tetapi pada saat kita salat misalnya terjadi

gempa, maka salat bisa kita tinggalkan. Atau pada saat kita salat terlihat ada seekor ular yang membahayakan bagi diri kita dan orang lain, kita bisa membatalkan salat itu. Sekali lagi menjaga jiwa lebih diutamakan daripada menjaga agama.”

PP Muhammadiyah tidak menutup mata bahwa belakangan berkembang aspirasi masyarakat yang menghendaki agar pilkada dilanjutkan. Ada yang beralasan penundaan Pilkada 2020 cukup sederhana, hanya dibutuhkan satu perppu. Tapi ada pula yang berpendapat tidak dibutuhkan perppu lagi karena dalam UU No. 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Perppu No. 2 tentang Pilkada Pasal 201A ayat (3) dikatakan, pemungutan suara serentak Desember 2020 ditunda dan dijadwalkan kembali apabila tidak dapat dilaksanakan karena bencana nasional pandemi covid-19 belum berakhir.

Kalaupun tidak ada perppu baru, penundaan pilkada ini cukup berdasarkan kesepakatan antara KPU, pemerintah, dan DPR karena pada penjelasan Pasal 201A disebutkan bahwa pemungutan suara serentak Desember 2020 ditunda dan dijadwalkan kembali apabila tidak dapat dilaksanakan karena bencana nasional pandemi covid-19 belum berakhir.

Saat sumber daya negara dan segenap warganya tengah berkonsentrasi penuh berupaya mencegah covid-19, kata Ghazali, akan menjadi sebuah ironi kalau pilkada serentak dengan anggaran Rp27,84 triliun justru menjadi arena penyebaran virus korona.



M/IRAMDANI

Petugas KPPS menggunakan alat pelindung diri (APD) mendatangi rumah warga yang sakit dan tidak bisa datang ke TPS untuk membantu menggunakan hak pilih pada Pilkada Kota Tangsel, Banten, Rabu (9/12/2020). Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 menjadi tantangan KPU agar peristiwa banyaknya petugas KPPS yang gugur pada Pemilu 2019 tidak terulang, terlebih momennya saat pandemi covid-19.

Simulasi Penundaan

Lalu, bagaimana suara DPR? Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustopa menjelaskan, sejak Komisi II mengakhiri masa resesnya pada 30 Maret 2020, setelah pembukaan rapat paripurna masa sidang, sorenya DPR langsung mengadakan rapat dengan penyelenggara pemilu dan Menteri Dalam Negeri. Agenda rapat

sudah disiapkan, yakni memutuskan untuk menunda tahapan Pilkada 2020 karena pandemi covid-19.

Saan menjelaskan, saat itu DPR meminta KPU agar membuat simulasi. Kalau ditunda bulan September, “Kira-kira waktu yang pas untuk melakukan pilkada, kapan?”

KPU telah menyiapkan tiga skenario waktu, yaitu Desember 2020, Maret 2021, dan September 2021. DPR lalu meminta Mendagri untuk sama-sama memberikan berbagai alasan opsi itu, dan dipilihlah 9 Desember. Jika memang disepakati 9 Desember, Komisi II DPR meminta dua syarat. Syarat pertama terkait dengan keselamatan masyarakat. “Kita punya pengalaman Pemilu 2019, banyak petugas yang gugur. Jadi keselamatan penyelenggara, pemilih, dan peserta harus dijamin.”

Syarat kedua terkait dengan kualitas demokrasi. “Kualitas sebagai syarat demokrasi pada pilkada di tengah pandemi tidak boleh tereduksi. Semua prinsip demokrasi harus mampu diterapkan di setiap tahapan pilkada,” kata Saan.

Mengenai syarat pertama soal terjaminnya keselamatan masyarakat, Komisi II, KPU, Bawaslu, DKPP, dan Mendagri meminta agar semua proses tahapan pilkada dilakukan dengan standar protokol kesehatan. “Kita minta itu dituangkan di dalam PKPU secara detail. Termasuk pada 9 Desember, harus diatur sedemikian rupa karena konsekuensinya kita telah menyepakati pengurangan jumlah pemilih di TPS. Kalau pemilihnya seperti pilkada biasa, 800 orang per TPS, penumpukannya akan luar biasa dan itu po-

tensial terjadi penyebaran covid-19,” tambah Saan.

Dalam soal itu, lanjut Saan, “Kita sudah sepakati maksimal jumlah pemilih per TPS 500 orang. Konsekuensinya jumlah TPS harus ditambah.”

Di tengah desakan masyarakat yang meminta pilkada ditunda, Saan menjelaskan, Komisi II sudah mendengarkan semua masukan, baik dari ormas seperti PBNU dan Muhammadiyah maupun masyarakat sipil, pegiat pemilu, dan juga kelompok masyarakat lain. Semua itu dijadikan pertimbangan Komisi II.

Adapun mengenai maslahat dan mudarat menyelenggarakan pilkada di tengah pandemi covid-19, Saan mengatakan DPR telah memperhatikan dengan saksama. Namun, argumentasi dari pemerintah dan penyelenggara pemilu juga harus didengar. Terkait dengan hal-hal yang dianggap bisa memancing kerumunan massa dalam jumlah besar, DPR meminta kegiatan ini dilarang, termasuk konser, gerak jalan santai, panen raya, bazar, dan sejenisnya.

Komisi II DPR juga meminta untuk diberikan sanksi terhadap mereka, terutama peserta pilkada yang melakukan pelanggaran. Bahkan jika ada yang melakukan pelanggaran berulang-ulang, sang paslon harus didiskualifikasi.

Dewan, masih menurut Saan, juga meminta 270 daerah yang melakukan pilkada melaporkan secara rinci perkembangan covid-19 di daerah mereka. “Dengan begitu, publik bisa mengetahui daerah mana yang masuk zona hijau, merah, dan kuning,” demikian Saan. ■



Jika pilkada
dilanjutkan di saat
masih dalam suasana
pandemi covid-19,
akan berdampak
pada meningkatnya
penggunaan anggaran.”

Eni Sumarni

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI
2019-2024

6 Plus Minus Pilkada 2020 Lanjut atau Tunda

BAGI Hendro Prasetyo dari lembaga survei Indikator, Pilkada 2020 dilanjutkan atau tidak, ada plus minusnya. Yang paling realistis, menurut dia, ialah menghitung cost benefit-nya sehingga persoalannya bukan hanya masalah lanjut atau tidak lanjut, melainkan apa yang dipertaruhkan.

Jika dilanjutkan, kata dia, ada argumen hukum, argumen politik, dan ada pula argumen ekonominya. Para pembicara yang menekankan pilkada sebaiknya ditunda lebih banyak mempertimbangkan bahwa kesehatan manusia itu jauh lebih penting daripada yang lain. “Ini juga menjadi argumen lain bagi kita untuk melakukan perhitungan cost and benefit-nya. Kalau ditunda, terus apa yang harus kita lakukan?” katanya.

Menurut Hendro, data survei soal ini terkait dengan tiga hal. Pertama, sikap masyarakat terhadap covid-19. Kedua, sikap masyarakat terhadap pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Ketiga, sikap masyarakat terhadap pilkada.

Pihaknya melakukan survei terkait sikap masyarakat itu pada Juli 2020, dengan menasar masyarakat Pulau Jawa. Mengapa masyarakat di Pulau Jawa? “Karena saya anggap mereka lebih siap dan lebih terpelajar,” ujarnya.

Survei menghasilkan data seperti ini. Saat ditanya sampai sejauh mana masyarakat tahu covid-19, ternyata 40% lebih merasa pengetahuan mereka soal covid-19 hanya sedikit atau tidak tahu sama sekali. “Jadi masalah covid-19 di benak masyarakat, pengetahuan mereka soal itu masih minim,” ujar Hendro.

Jika memang tidak tahu, seberapa jauh mereka tertarik untuk mengetahuinya lewat pemberitaan tentang covid? “Ternyata ada sekitar 35% warga masyarakat yang disurvei tidak tertarik dengan covid-19, dan masalahnya, pengetahuan masyarakat soal itu memang minim. Selain minim, mereka juga kurang tertarik.”

Hendro memaklumi itu sebab responden yang disurvei adalah dari kalangan kelas menengah ke bawah. “Jadi kelihatan sekali bahwa mereka kurang well inform terhadap covid.”

Pertanyaan lain, seberapa khawatir mereka tertular covid-19? Hasilnya cukup mengagetkan, hanya sepertiga masyarakat yang menyatakan sering atau selalu khawatir tertular. “Sepertiganya mengatakan kadang-kadang merasa khawatir tertular. Sepertiganya lagi mengatakan jarang atau tidak pernah merasa khawatir tertular,” ungkap Hendro.

Itulah gambaran masyarakat tentang covid-19. Solusinya ke

depan, menurutnya, masyarakat benar-benar perlu dibuat tahu, apa pun caranya bahwa covid-19 berbahaya.

Hendro mengatakan penanganan covid-19 dalam rangka pilkada tentu bukan hanya tugas KPU atau Bawaslu. Ini tugas semua pihak. Hendro menduga masyarakat yang tidak takut covid-19 karena sosialisasi soal itu oleh pemerintah selama ini kurang masif sehingga kurang membawa hasil.

Responden juga ditanya, apakah PSBB perlu dihentikan atau tidak? Hendro menjelaskan, 61% responden ingin dihentikan. Siapa yang ingin PSBB dihentikan? Kebanyakan buruh dan pengusaha. Wajar karena mereka yang paling terkena dampak PSBB.

Lembaga surveinya juga bertanya, mana lebih penting ekonomi atau kesehatan? Sebagian besar mengatakan ekonomi sebaiknya lebih diprioritaskan. Pasalnya, banyak dari mereka mengalami pemutusan hubungan kerja atau dirumahkan.

Hendro pun menyimpulkan, PSBB tidak terlalu didukung masyarakat karena bagi mereka masalah ekonomi sangat mendesak. Jika memang begitu, apakah pilkada perlu dilanjutkan atau ditunda? Khusus masyarakat di Jawa, yang minta ditunda cukup tinggi, 68%. Itu survei bulan Juli. Kalau survei dilakukan sekarang, Hendro menduga mereka yang minta ditunda bisa jadi makin meningkat.

Berdasarkan temuan survei, Hendro melanjutkan, mereka yang mengatakan pilkada sebaiknya ditunda bukan berarti mereka tidak akan datang ke TPS jika pilkada dilanjutkan. “Me-

reka akan tetap datang ke TPS jika pilkada tetap dilaksanakan. Meskipun terjadi penurunan partisipasi, penurunannya tidak eksponensial.” Adapun yang ingin tetap pilkada dilanjutkan, mereka tetap ingin memilih dan datang ke TPS. Mereka ingin berpartisipasi seperti biasanya. “Ya, inilah sikap mereka,” ujar Hendro.

Sebagian besar juga ingin kampanye dilakukan secara terbuka. “Ini tantangan tersendiri. Melihat sikap mereka terhadap pilkada ini, maka perlu ditekankan, walaupun pilkada dilanjutkan, tampaknya diperlukan tidak sekadar aturan yang rinci, atau aturan yang preventif, tetapi seberapa efektif aturan itu akan berdampak kepada masyarakat,” tutur Hendro.

Terkait masyarakat yang menghendaki pilkada dilanjutkan, Hendro menyimpulkan bahwa mereka merasa tidak takut tertular. “Ini tantangan tersendiri. Para pengambil kebijakan perlu betul-betul menimbang perilaku masyarakat terhadap covid-19 dan Pilkada 2020.”

Ia menegaskan, bagi KPU, DPR, dan pemerintah yang sudah memutuskan untuk melanjutkan pilkada, maka faktor perilaku masyarakat terhadap covid-19 ini perlu mendapatkan perhatian serius. Kondisi itu terjadi lebih berkaitan dengan tradisi atau kebiasaan masyarakat merespons hal-hal yang berhubungan dengan kesehatan. “Sosialisasi tampaknya belum menyentuh pikiran dan hati masyarakat untuk lebih berhati-hati mewaspadaai covid-19,” demikian Hendro.



M/ADAM DWI

Suasana penjagaan oleh aparat kepolisian di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Selasa (26/1/2021), saat sidang perselisihan hasil Pilkada 2020. Pelaksanaan sidang perselisihan hasil Pilkada 2020 di MK menerapkan protokol kesehatan dan *swab* antigen untuk pengunjung. Sebelumnya, walau banyak pro dan kontra, KPU dan pemerintah tetap menggelar pilkada serentak pada 9 Desember 2020 dengan protokol kesehatan yang ketat.

DPD Menolak

Ketika dihadapkan pada realitas sosial seperti itu, anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI periode 2019-2024, Eni Sumarni, menegaskan pihaknya menolak Pilkada 2020 dilanjutkan.

Eni mengatakan sikap politik DPD sejak jauh-jauh hari, apalagi setelah pandemi covid-19 mencuat kembali, "Sudah menganti-

sipasi, bahkan sudah menyatakan sikap politik bahwa DPD menolak pilkada digelar pada 9 Desember 2020.”

Mempertegas penolakan, Eni menjelaskan bahwa covid-19 adalah pandemi global. “Sampai detik ini belum ada vaksin dan obat tertentu yang bisa menghalau covid-19. Tren covid-19 juga masih terus meningkat, apalagi beberapa daerah sudah melakukan PSBB.”

DPD juga berpendapat, status covid-19 sebagai bencana nasional pun belum dicabut pemerintah. Pertimbangan lainnya, menurutnya, jika pilkada dilanjutkan di saat masih dalam suasana pandemi covid-19, akan berdampak pada meningkatnya penggunaan anggaran.

Fakta lain di lapangan, kesadaran masyarakat untuk melaksanakan protokol kesehatan masih rendah. “Kalau kita pergi ke daerah, aturan tetap aturan, tetapi implementasi di lapangan masih sangat jauh dari harapan, walaupun dengan denda sekalipun,” tuturnya.

Eni menambahkan, pertimbangan lain DPD menolak pilkada ialah, jika tetap dilaksanakan, akan memecah konsentrasi daerah dalam mengatasi covid-19. Anggaran yang seharusnya difokuskan untuk pencegahan covid-19 harus terbagi dengan urusan pilkada. Kalau pilkada tetap dilanjutkan, tegas Eni, DPD menilai itu bertentangan dengan teori-teori sebagaimana diatur dalam perundang-undangan.

Pertama, harusnya memang tidak ada pilkada jika ada ben-

cana. Eni menjelaskan, itu merupakan asas yang tercantum dalam UU No 7/2017 tentang Pemilu. Menurutnya, keputusan pemerintah dan DPR bahwa Pilkada 2020 akan dilaksanakan pada 9 Desember mendatang tidak berdasarkan pada kajian spesifik bahwa tren kasus covid-19 terus meningkat. Kedua, pilkada merupakan bagian dari pesta demokrasi. Ketika orang tidak dalam keadaan aman dan tenang, bagaimana bisa mengikuti pesta demokrasi dengan baik. Jika pilkada ditunda, ada mekanisme pengangkatan pejabat sementara sehingga tidak akan menimbulkan kekosongan kekuasaan.

Ketiga, etika politik yang santun harus dijunjung tinggi. “Kita tahu bahwa di masyarakat kini muncul berbagai aliansi menolak Pilkada 9 Desember 2020. Jadi secara pribadi dan sebagai anggota DPD, saya mohon pilkada ditunda karena ini menyangkut keselamatan jiwa manusia,” demikian Eni. ■



**Rotasi kekuasaan
dilaksanakan lima tahun
sekali. Jika ditunda,
akan muncul persoalan
terkait dengan
legitimasi pemerintahan
di daerah.”**

Atang Irawan

Pakar hukum tata negara
Universitas Pasundan, Bandung

7

Maju Kena Mundur Kena

BERBICARA sebagai panelis, Ketua Teritorial Pemenangan Pemilu Partai NasDem Wilayah Sumatra, Willy Aditya, mengumpamakan persoalan Pilkada 2020 dilanjutkan atau ditunda dengan hasrat yang ada pada setiap diri manusia.

Menurut dia, ada dua hasrat dalam kehidupan manusia yang hampir sulit ditolak dan tak terbantahkan. Yang pertama hasrat bercinta, dan kedua, hasrat untuk berkuasa. “Hasrat berkuasa adalah yang paling sulit untuk dikendalikan. Maka, realitas ini membawa perspektif bahwa kemanusiaan itu di atas politik, bahkan politik itu tujuannya ialah demi kemanusiaan itu sendiri,” katanya.

Haruskah pilkada ditunda? Willy mengatakan proses sudah berjalan. Para paslon sudah berbondong-bondong mengikuti proses pendaftaran kandidat. Di tengah perjalanan muncul fakta lain bahwa ada pandemi covid-19 dan memberikan dampak luar biasa. Di permukaan, yang diekspos terkait dengan pilkada hanya

calon kepala daerahnya, “Sehingga kita tidak begitu mengetahui bagaimana konstituen dan para tim suksesnya,” kata Willy.

Dalam suasana seperti itu, yang paling parah, menurut Willy, ialah semua orang merasa bisa dan menganggap pandemi covid-19 bukan menjadi sebuah situasi yang penting karena hasrat berkuaasanya lebih dominan. Pandemi covid-19 telah ditetapkan pemerintah sebagai bencana nasional. Kalau bencana, ada time frame-nya. Penanganannya seperti apa bisa dilihat. Pascabencana juga bisa terukur.

“Tetapi kalau begitu ada pandemi dan pilkada kita tunda, kita masuk ke dalam sebuah situasi yang tidak menentu. Ini akan membuat sistem ketatanegaraan kita, sirkulasi kekuasaan kita, menjadi sebuah proses yang maju kena mundur kena.”

Pasalnya, menurut Willy, dari 270 pemerintahan daerah yang akan menggelar pilkada, masa jabatan para kepala daerahnya sudah habis pada Februari 2020. Ketika dia menjadi caretaker atau penjabat (Pj), mereka tidak boleh mengambil keputusan-keputusan yang sifatnya strategis, walaupun sebagai mantan kepala daerah paham betul posisinya, apa yang harus diambil jika ada sesuatu, misalnya terkait APBD dan masalah strategis lain.

“Oleh sebab itu, yang harus kita lihat dalam situasi seperti ini ialah bagaimana mengambil langkah alternatif. Tidak hanya melengkapi protokol kesehatan,” ujar Willy.

Legislator NasDem ini mengingatkan, dunia saat ini sudah masuk pada era Revolusi Industri 4.0, digitalisasi. “Ini momen-

tum untuk kemudian kita melakukan kampanye digital. Ini perlu digalakkan oleh penyelenggara dan kemudian harus dibuat skemanya. Ini menjadi sebuah keharusan,” tuturnya.

Willy juga menyebut, ini adalah momentum bagi Indonesia untuk melakukan *exercise e-voting*. “Kalau selama ini baru di-*endorse* e-rekap, bisa tidak dalam situasi ini kita memunculkan *e-voting*?”

Dalam keadaan terpaksa, kata Willy, “Kita juga bisa mengambil langkah ekstrem, apalagi jika situasinya makin tidak menentu.” Bisa saja pilkada diatur dalam perppu yang di dalamnya mengatur kepala daerah dipilih oleh DPRD. “Itu yang paling aman. Itu sangat ekstrem, tetapi itu adalah langkah yang paling antisipatif dengan realita yang ada sekarang,” tegas Willy.

Kotak Pandora

Pakar hukum tata negara Universitas Pasundan, Atang Irawan, yang juga bertindak sebagai panelis, berpendapat ada dua perspektif yang digunakan dalam mengambil keputusan Pilkada 2020 dilanjutkan atau ditunda. Dua perspektif ini tidak bisa dihindari.

Pertama, perspektif kesehatan digunakan karena negara memang berkewajiban memberikan perlindungan kesehatan kepada semua warga negaranya. Bahkan, menurut Atang, dalam perppu terkait dengan situasi yang terus berkembang, ada ketentuan pilkada bisa ditunda jika negara tidak mampu mengatasi pandemi covid-19. Jika itu yang terjadi, kata Atang, “Kita akan masuk ke

dalam kotak pandora dan akan muncul masalah cukup besar di depan.”

Kedua, perspektif demokrasi. Rotasi kekuasaan dilaksanakan lima tahun sekali. Jika ditunda, akan muncul persoalan terkait dengan legitimasi pemerintahan di daerah. Benar, jika pilkada ditunda, memang tidak akan terjadi kekosongan kekuasaan karena ada pelaksana tugas (Plt) maupun pelaksana harian (Plh). “Namun, Plt dan Plh tidak melaksanakan kewenangan, tapi hanya melaksanakan tugas. Ini yang menjadi problem besar,” kata Atang.

Ia mengingatkan, kalau mengacu pada UUD 1945, ada ruang khusus yang mengatur soal pilkada. Pasal 18 ayat 4 mengatur pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota dilaksanakan secara demokratis. Menurut Atang, istilah demokratis itu bersifat alternatif. Dia bisa direct democracation dan bisa indirect democracation. “Artinya, konstitusi membuka ruang lebar, bisa dipilih langsung maupun dipilih perwakilan, tetapi dengan catatan hanya berlaku untuk pandemi,” ungkap Atang.

Menutup diskusi, wartawan senior dan anggota Dewan Redaksi Media Group, Saur Hutabarat, mengatakan ada tesis besar di seluruh dunia bahwa pandemi korona ini merupakan ujian bagi pemimpin suatu negara. Berdasarkan tesis itu, ujar Saur, ada yang berkesimpulan, misalnya Perdana Menteri Inggris Boris Johnson disebut sebagai pemimpin yang lemah dan Kanselir Jerman Angela Merkel dinilai sebagai pemimpin yang kuat.

“Berdasarkan tesis itu, baguslah kalau Presiden Jokowi mengambil keputusan tegas bahwa pilkada dilanjutkan. Akan tetapi, apabila keadaan pandemi semakin memburuk di akhir November, kiranya Presiden juga akan tegas mengambil keputusan pilkada ditunda,” kata Saur.

Intinya ialah, menurut Saur, pemimpin tidak boleh ragu, tetapi juga tidak boleh kaku. “Karena itu, barangkali kita perlu sedikit memberikan pemahaman, pengertian, permakluman apabila legitimasi sedikit menurun asalkan asas legalitasnya bernilai baik.”

Kalau tingkat partisipasi masyarakat yang ikut pilkada turun sampai 40%, dalam keadaan seperti sekarang, Saur mengatakan, “Kita semua memakluminya. Tetapi yang jelas, tidak boleh terjadi pelanggaran terhadap asas-asas hukum yang berlaku.” ■

NW

Mengantisipasi Hoaks di Tahun Pemilu



1 Latar Belakang: Menunggu Waktu Diserbu Hoaks

MESKI kampanye resmi Pemilu 2024 masih beberapa bulan lagi, propaganda untuk mendukung atau tidak mendukung partai politik dan politisi sudah dimulai. Media sosial masih menjadi andalan untuk menyebarkan informasi dan disinformasi kepada masyarakat. Hampir semua berita, baik yang benar maupun palsu, dimulai dari media sosial.

Yang mengkhawatirkan dari pesta demokrasi kali ini bukan hanya pengaruh media sosial yang makin besar, tapi juga teknologi penciptaan konten-konten palsu yang makin canggih. Dalam dua tahun terakhir, teknologi baru bernama artificial intelligence (AI) dirilis ke publik.

Teknologi itu memungkinkan untuk membuat dan merekaya-

sa konten palsu dengan mudah. Teknologi AI tidak hanya membantu manusia merangkai narasi berbasis teks, tapi juga memproduksi suara (audio) dan gambar bergerak (video). Berbagai aplikasi AI mampu menciptakan suara plus gambar yang sudah dimodifikasi secara sempurna. Suara dan gambar seorang politisi akan tampak seperti asli, meski itu sesungguhnya palsu.

Teknologi AI akan kian menyulitkan untuk membedakan yang asli dan yang palsu. Kita akan kesulitan jika ada video atau audio beredar yang menampilkan Prabowo Subianto, atau Ganjar Pranowo, atau Anies Baswedan karena semuanya sudah direkayasa menyerupai aslinya.

Potensi penggunaan AI dalam kampanye politik membuat gundah para pemimpin dan tokoh di Amerika Serikat, yang juga akan menyelenggarakan pemilihan presiden (pilpres) tahun depan. Berbagai video palsu tentang kandidat calon presiden (capres) mulai beredar.

Hanya soal waktu banjir hoaks bisa melanda Indonesia. Sebelum terlambat, tidak ada salahnya pemerintah dan para pengambil kebijakan segera mengantisipasinya. ■



Tahun politik selalu menjadi ajang adu propaganda untuk membentuk persepsi dengan memanfaatkan kemajuan teknologi.”

Lestari Moerdijat
Wakil Ketua MPR RI

2 Bisa Akibatkan Perpecahan

TIDAK bisa dimungkiri, menjelang tahun politik, dunia maya dihebohkan beragam informasi dengan berbagai maksud. Ada yang bermaksud menyesatkan, memanipulasi, dan macam-macam propaganda, bahkan informasi yang sengaja dibuat untuk menggiring opini.

Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengemukakan itu ketika membuka diskusi daring bertajuk Mengantisipasi Hoaks di Tahun Pemilu yang diselenggarakan Forum Diskusi Denpasar 12 pada Rabu, 24 Mei 2023, di Jakarta.

Menurut Lestari Moerdijat yang biasa disapa Rerie, perkembangan teknologi selalu memiliki dampak. Baru empat bulan di tahun 2023 saja masyarakat sudah disibukkan dengan berbagai

isu. Jika dibandingkan dengan di 2019, pertarungan sudah semakin tidak sehat, semakin tidak baik, dan bahkan bisa mengakibatkan perpecahan antarsesama.

Salah satu catatan yang harus diperhatikan ialah bahwa kemajuan teknologi tidak dibarengi dengan literasi atau kemampuan untuk memahami perkembangan teknologi itu sendiri. Menurut Rerie, ini menjadi pengingat bagi semua agar bersama-sama menyiapkan diri mendidik lingkungan supaya lebih memahami apa yang terjadi.

Minggu lalu, cerita Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI, dia berjumpa dengan Habib Syech (Syech bin Abdul Qodir As-Segaf). Dengan caranya Habib Syech menjelaskan kepada jemaahnya agar berhati-hati bermain dengan ‘setan kotak’. “Awalnya kami bingung apa itu ‘setan kotak’. Ternyata beliau menamai handphone itu setan kotak. Itu caranya menyampaikan peringatan akan bahaya,” kata Rerie.

Tahun politik, tambah Rerie, selalu menjadi ajang adu propaganda untuk membentuk persepsi, dan caranya dengan memanfaatkan kemajuan teknologi. Masyarakat tidak bisa melupakan bahwa dalam setiap zaman selalu ada peristiwa yang berhubungan dengan propaganda. “Ratusan tahun lalu, kita mesti menghadapi propaganda pembelokan-pembelokan dan catatan-catatan yang mungkin tidak sesuai dengan sejarah yang ada,” kata legislator Partai NasDem dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah II (Demak, Kudus, Jepara) itu.

Menurut Rerie, pola yang sama terjadi sekarang dengan cara yang lebih advance, yang mana pada satu titik harus diakui kita belum mampu mengendalikannya.

Reri berharap diskusi ini memberikan pencerahan bagi masyarakat luas agar bisa menempatkan diri dalam menghadapi hoaks menjelang dan selama masa pemilu. ■



Dengan bersama-sama
mencegah hoaks, kita
bisa mempertahankan
atau menjaga kualitas
demokrasi.”

Usman Kansong

Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik,
Kementerian Komunikasi dan Informatika

3

Demokratisasi Penyiaran

DEMOKRASI di berbagai negara mengalami stagnasi atau regresi karena disinformasi. Hal itu dipertegas dalam Bali Democracy Forum 2022 yang menyebutkan disinformasi politik menyebabkan menurunnya kualitas demokrasi. Karena itu, perlu concern dengan hoaks atau disinformasi.

Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Usman Kansong, mengatakan disinformasi dan kemunduran demokrasi bahkan terjadi di negara-negara yang tingkat demokrasinya masuk kategori mapan. Stagnasi dan regresi demokrasi itu, tambah Usman, salah satu penyebabnya ialah disinformasi di media digital dan disinformasi politik yang menjadi rutinitas dan tren lima tahunan pada pemilu. Apalagi kampanye pemilu di Indonesia sekarang

berbasis media sosial.

Mungkin tidak banyak lagi kampanye tatap muka maupun kampanye melalui media konvensional. Menurut catatan Kementerian Kominfo, sejak Pemilu 2019 disinformasi politik meningkat dari bulan ke bulan. Pada Agustus 2018, satu tahun menjelang Pemilu 2019, hanya ada 14 kasus disinformasi politik, dan mencapai puncaknya pada Maret 2019 dengan 323 kasus disinformasi politik. Kemudian sedikit turun pada April 2019 menjadi 277 kasus. Kenapa April 2019 itu turun? Karena kita berada di pertengahan pemilu yang ketika itu diselenggarakan pada 17 April 2019.

Asumsi bahwa hoaks politik akan meningkat menjelang pemilu mempunyai dasar. Data di Kementerian Kominfo menyebutkan hoaks politik pada 2020 turun, pada 2021 lebih turun lagi, tetapi meningkat di 2022 menjadi 50 kasus dari 38 kasus tahun sebelumnya. Kini sedang dikumpulkan data hingga April 2023 dan diperkirakan meningkat.

Usman memberikan beberapa contoh hoaks politik. Misalnya disebutkan KPU menganulir peserta Pemilu 2024, Presiden Joko Widodo menunjuk Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sebagai Menteri Perdagangan. Ada juga Presiden Joko Widodo akan mundur sebagai presiden pada Desember 2022. Yang agak viral ialah Jokowi membagi-bagi kaus tiga periode dan video Menko Polhukam Mahfud MD seolah-olah mendesak KPK menangkap Megawati.

Lalu apa kebijakan Kementerian Kominfo dalam melawan

hoaks? Menurut Usman, ada tiga kebijakan. Pertama di hulu, yakni tindakan preventif edukatif dengan melakukan literasi digital kepada masyarakat. Ditargetkan pada 2024 sebanyak 50 juta warga terliterasi digital. Salah satu materinya ialah mengajak masyarakat untuk kritis terhadap segala informasi yang ditampilkan di media sosial, tidak langsung menyebarkan tetapi memeriksa kebenarannya terlebih dahulu.

Kedua, kata Usman, mekanisme korektif. Mekanisme itu menggunakan AIS (Automatic Identification System) yang secara otomatis mencari konten di media sosial untuk mengidentifikasi konten negatif. Ada pula mekanisme Patroli Siber yang memelototi media sosial 24 jam sehari dan mengidentifikasi hoaks termasuk hoaks politik.

Ketiga, represif, yakni langkah hukum yang dilakukan lembaga berwenang misalnya Polri. Jadi Kementerian Kominfo berkolaborasi dengan aparat penegak hukum jika hoaks sudah pada tingkat yang bisa dilaporkan ke aparat.

Selain itu, Kementerian Kominfo juga bekerja sama dengan platform. Jika ada pengaduan masyarakat tentang konten yang mengandung disinformasi, Kementerian Kominfo akan menindaklanjutinya dengan meminta platform mem-breakdown hoaks tersebut dari platform mereka. Kementerian Kominfo membuat MoU dengan platform agar dalam 1x24 jam harus men-delete atau men-take down konten negatif dan disinformasi.

Usman menambahkan, pihaknya juga melakukan edukasi li-

terasi digital melawan hoaks dengan memperhatikan hasil-hasil survei terutama pada masa pandemi covid-19. Di masa pandemi covid yang paling dipercayai ialah tenaga kesehatan, pemerintah, toga atau tokoh agama, dan tomas atau tokoh masyarakat. Kementerian Kominfo juga menysasar organisasi keagamaan seperti NU, Muhammadiyah, dan MUI, juga pesantren.

Di internal Kementerian Kominfo, sebanyak 47% pegawai adalah kaum milenial dan terbanyak ada di Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika yang betul-betul berhubungan dengan penanganan hoaks. Jadi yang berpatroli siber itu kebanyakan kaum milenial.

Program literasi digital juga menysasar kaum milenial dengan mengedukasi pemilih pemula. Kelompok itu, kata Usman, misalnya akan mencari informasi yang benar tentang partai politik, kandidat, dan lain-lain.

Di Amerika Serikat, menjelang Pilpres 2020, ada lembaga swadaya masyarakat (LSM) bertemu dengan pemilik platform tertentu dan meminta agar mem-ban akun Donald Trump untuk mengurangi hoaks. Itu sebetulnya menunjukkan pentingnya peran kaum milenial dan mahasiswa dalam memerangi hoaks.

Menurut Usman, para kandidat dari partai politik juga harus ikut mencegah peredaran hoaks politik. Jangan sampai para calon anggota legislatif (caleg) hanya mempersoalkan hoaks politik yang dilakukan kelompok lain yang menyerang mereka, tetapi mereka menikmati hoaks politik yang disebarkan para pendukungnya un-

tuk menyerang pihak lain.

Untuk memerangi ataupun mengurangi bahkan meniadakan disinformasi politik menjelang pemilu yang akan merajalela, perlu kolaborasi dan partisipasi semua pihak. Dengan bersama-sama mencegah hoaks, kita bisa mempertahankan atau menjaga kualitas demokrasi. ■



Kampanye politik
saat ini dengan
menggunakan teknologi
AI sudah begitu canggih.
Tidak menggunakan lagi
kata-kata yang mudah
ditengarai sebagai
hoaks, tetapi justru
narasinya lebih halus
dan ini berbahaya.”

Suko Widodo

Pakar komunikasi politik dan dosen komunikasi
Universitas Airlangga, Surabaya

4 Menjaga Kebersihan Ruang Publik

PEMERINTAH sebenarnya mempunyai tools untuk memantau informasi yang beredar di media sosial. Persoalannya sering kali approach pemerintah fokus pada single actor dan single post. Jadi melihat teks yang dianggap bermasalah.

Sekarang, kata Sekjen Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI)–CEO Tempo Digital Wahyu Dhyatmika, yang lebih holistik sebenarnya dari riset terbaru para pakar tentang disinformasi ialah pendekatan tidak melulu pada single actor dan single post, tetapi pada narasi. Jadi harus sensitif pada narasi karena single post itu viral lantaran dianggap benar dan diterima, padahal fakta itu dimanipulasi.

Di sisi pelaku, kata Wahyu, sebaiknya melihat jaringannya. Bisa dipastikan di Kementerian Kominfo ada software atau tools untuk melihat persebaran sebuah misinformasi dan disinformasi, kemudian analisis atas penyebarannya. Hal tersebut penting untuk melihat apakah pendekatan counter-nya itu efektif atau tidak.

Catatan lain, ketika ada software yang powerful dari pemerintah, bagaimana akuntabilitasnya dan bagaimana memastikan pemerintah bersikap sebagai wasit independen, tidak terpengaruh oleh permainan di lapangan. Untuk menjamin itu, penting sekali ada transparansi supaya publik bisa percaya kepada pemerintah, kepada Kementerian Kominfo sebagai wasit, dan menjaga ruang publik bersih dari disinformasi.

Sebenarnya anak-anak muda lebih bijak dalam menjaga kebersihan ruang publik dengan mengantisipasi hoaks. Menurut pakar komunikasi politik dan dosen komunikasi Universitas Airlangga Surabaya, Suko Widodo, persoalannya ialah menemukan konsep-konsep antisipasi hoaks tersebut.

Kampanye politik saat ini dengan menggunakan teknologi kecerdasan buatan (*artificial intelligence/AI*) sudah begitu canggih. Tidak menggunakan lagi kata-kata yang mudah ditengarai sebagai hoaks, tetapi justru narasinya lebih halus dan ini berbahaya, perlahan tapi dalam.

Kalau sudah menggunakan teknologi canggih, kata Suko, akan sulit bagi masyarakat untuk memahami karena keterbatasan sarana. Mahasiswa dan masyarakat berharap optimalisasi peran pe-

merintah khususnya Kementerian Kominfo untuk mengajarkan literasi terkait dengan penanggulangan hoaks kepada anak-anak muda.

Intinya, kata Suko, mahasiswa, milenial, dan masyarakat umum harus dilibatkan dalam kampanye besar-besaran melawan hoaks. Kalau itu tidak dilakukan, akan makin berbahaya memasuki Pemilu 2024. ■



**Jika penegak hukum
dan pengadilan terkena
implikasi politisasi,
akan sulit mendapatkan
keadilan pemilu.”**

Titi Anggraini

Anggota Dewan Pembina Perludem

5 Penyelenggara Jangan Jadi Pemain

MEMASTIKAN perlindungan suara pemilih dalam pemilu merupakan pekerjaan serius yang harus terus-menerus dilakukan dalam upaya menjaga kemurnian suara pemilih.

Menurut Titi Anggraini, anggota Dewan Pembina Perludem, ada tiga bentuk gangguan terhadap hak memilih. Pertama, diskriminasi dalam regulasi terutama terhadap kelompok marginal dan minoritas. Kedua, intimidasi dan pengusikan hak pilih. Ketiga, pengacauan informasi pemilu.

Pemilu demokratis tidak akan terwujud kalau pemilihnya tidak menjadi pengawal informasi. Pemilih yang benar, kata Titi,

menggunakan informasi yang kredibel dalam membuat keputusan terkait pemilu. Istilahnya one person one value akan bermakna kalau pemilih paham betul mengapa dia harus memilih, dan implikasi atas pilihannya.

Hoaks politik merupakan kampanye jahat, berbeda dengan kampanye negatif, meski konstruksi regulasi kampanye jahat masih terbatas. Aturan yang ada baru mengatur soal menghina seseorang, agama, suku, ras, dan antargolongan atau peserta pemilu yang lain. Padahal spektrum kampanye jahat bisa lebih besar, menuding lawan dengan tuduhan palsu atau hal yang tidak relevan terkait kapasitasnya sebagai pemimpin.

Hoaks yang menyasar calon, tambah Titi, bisa direspons oleh kandidat tersebut untuk memproteksi kepentingan politiknya. Akan tetapi, kalau hoaks menyasar proses pemilu, implikasinya bisa ke mana-mana, bahkan bisa berdampak pada kerugian keuangan negara. Contohnya kalau pemilih menggunakan hak pilih menyimpangi regulasi yang ada, bisa berdampak pada pemungutan suara ulang. Hal itu berimplikasi mengganggu kredibilitas dan legitimasi pemilu serta berdampak pada keuangan negara karena dilakukan pemilihan dan penghitungan suara ulang.

Ketika kompetisi terpolarisasi antitesis antara satu kandidat dan kandidat lain dan itu ditunggangi penggunaan informasi bohong untuk mendiskreditkan lawan, ditambah penyelenggara pemilu yang tidak profesional dan kredibel, penyebaran hoaks berkelindan dengan salah satu kelompok untuk melegitimasi ke-



MIA/DAM/DWI

Ketua KPU RI periode 2017-2022 Arief Budiman (tengah) bersama anggota KPU Virian, dan Kepala Biro Teknis dan Humas KPU Nur Syarifah, saat diskusi di KPU, Jakarta, Selasa (20/8/2019). Diskusi mengusung tema Mengukur dan Menganalisis Hoaks dan Ujaran Kebencian yang muncul saat dan setelah Pemilu 2019.

menangan. Itu membuat penilaian atas kredibilitas penyelenggaraan pemilu menjadi bias.

Jadi, kata Titi, segala sesuatunya harus proporsional sesuai fungsi, termasuk mengawasi institusi penyelenggara pemilu dem memastikan asas pemilu diterapkan dengan baik. Disinformasi atau hoaks juga bisa mendorong subversi pemilu dengan melahir-

kan narasi-narasi kecurangan.

Titi mengingatkan, jika penegak hukum dan pengadilan terkena implikasi politisasi, akan sulit mendapatkan keadilan pemilu. Lalu, bagaimana mengatasinya? Terkait dengan serangan terhadap kredibilitas proses pemilu, mau tidak mau independensi dan profesionalitas penyelenggara pemilu harus dijaga. Jika penyelenggara pemilu juga menjadi pemain politik dan publik merasakan mereka tidak netral atau berpihak, polarisasi di masyarakat bisa kian memburuk. Hoaks dan ujaran kebencian yang mendikotomikan kontestan akan mengalihkan kita dari orientasi politik gagasan.

Perang terhadap disinformasi atau hoaks politik, tambah Titi, harus diawali dengan menghadirkan penyelenggara pemilu yang kredibel, mandiri, dan profesional. Karena itu, penyelenggara pemilu yang nonpartisan dan mandiri menjadi penting, termasuk transparansi dalam bekerja.

Titi berharap penyelenggara pemilu membuka ruang-ruang kontrol publik untuk meluruskan serangan-serangan terhadap pemilu. Salah satunya dengan memberikan akses kepada media sosial untuk mengambil tanggung jawab menjadi bagian dari melawan hoaks. Diakui, pengaturan soal tanggung jawab media sosial itu belum sepenuhnya tuntas karena regulasi kepemiluan masih minim mengatur hal tersebut. KPU hingga kini belum terlalu terbuka soal skenario mereka di dalam menangani disinformasi Pemilu 2024.

KPU, kata Titi, pasti akan saling lempar soal penyebaran disinformasi berkaitan dengan pemilu dengan alasan belum mulai masa kampanye. Jadi seolah-olah limitasi disinformasi itu hanya terjadi di masa kampanye, padahal disinformasi pemilu tidak hanya di masa kampanye karena sejak sekarang pun sudah terjadi.

Memberikan contoh, Titi mengatakan dia menerima pesan WhatsApp lewat video yang isinya bahwa hasil pemilu sudah ditentukan berdasarkan daftar pemilih tetap (DPT). Bagaimana penyelenggara pemilu menyikapi itu? Bagaimana menanggulangnya? Apakah hanya menonton? Apakah berpartisipasi publik untuk membuat kontra narasi atas itu? Masyarakat ingin ada agenda penanggulangan hoaks yang lebih terukur dari penyelenggara pemilu.

Berbagai skenario penanggulangan hoaks politik akan bekerja baik jika partai politik dan kontestan juga menopang itu. Komitmen pemberantasan hoaks harus dimulai dari komitmen demokrasi para aktor politik.

Saat menutup diskusi tersebut, wartawan senior Saur Hutabarat mengatakan, di satu pihak diperlukan penguatan literasi tentang hoaks di tingkat warga, bijak bermedsos, dan juga melek digital. Akan tetapi, di lain pihak juga perlu penguatan jurnalisme agar jurnalisme tetap menjadi barometer yang menunjukkan tentang benar tidaknya fakta di ruang publik. Ini tantangan yang cukup berat bagi jurnalisme di dalam perubahan yang cepat dan meluasnya informasi maupun disinformasi. ■





V



**Menuntaskan
Agenda Politik
di 2022**

1 Latar Belakang: Saat Skor Demokrasi Cenderung Turun

TAHUN 2021 adalah tahun kedua pandemi covid-19. Meski secara umum manusia sudah lebih siap daripada tahun sebelumnya, kematian dan pertumbuhan jumlah kasus covid-19 belum juga bisa ditanggulangi.

Dampak dari pandemi masih mengimbas ke sektor-sektor lain, termasuk sektor politik, bukan hanya di sektor kesehatan dan ekonomi. Pada sisi yang berbeda, tindak kekerasan masih terjadi karena perbedaan ideologi, konflik sosial, dan konflik kepentingan dengan titik akhir marginalisasi.

Di tengah jerit kelompok yang tidak berhenti mencari keadilan, sebagian dari kita justru berteriak untuk mengamendemen kon-

stitusi yang nyatanya bukan representasi suara publik. Hak asasi manusia (HAM) pun terabaikan karena ada kepentingan-kepentingan politik di belakangnya.

Terorisme masih belum tuntas ditumpas dan menciptakan masalah di tengah kerukunan masyarakat yang makin menguat. Di saat bersamaan tuntutan menanamkan nilai-nilai kebangsaan terus menggema, merangkul seluruh anak bangsa tanpa kecuali, sesuai dengan nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan *Bhinneka Tunggal Ika*.

Berbagai studi tentang demokrasi dan kebebasan melaporkan berlanjutnya tren penurunan demokrasi di banyak negara. Menurut laporan The Economist Intelligent Unit (EIU), secara umum demokrasi Indonesia di atas rata-rata skor dunia. Akan tetapi, skor penurunannya dalam lima tahun terakhir termasuk yang terbesar.

Faktor utama penurunan itu bukanlah pandemi, melainkan aturan-aturan yang membatasi kebebasan warga, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Selama pandemi, kasus-kasus penangkapan terhadap pengguna internet meningkat. Sebagian besar kasus terjadi terkait dengan penggunaan media sosial, baik akibat ujaran kebencian, penyebaran hoaks, maupun pencemaran nama baik.

Kemudian, orkestrasi politik Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Tahun 2021 juga masih sangat buram. DPR hanya mampu mengesahkan delapan rancangan undang-undang (RUU) dari 37

yang ditetapkan dalam Prolegnas.

Ini sungguh miris karena, pertama, banyak RUU yang memiliki relasi kuat (*close engagement*) dengan tercerabutnya pemenuhan hak konstitusional rakyat justru tidak ditetapkan sebagai UU. Hal itu bisa dilihat dari RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual, RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, dan RUU Masyarakat Hukum Adat. Bahkan RUU tersebut tidak dapat ditetapkan hanya terkait dengan persoalan-persoalan teknis harmonisasi. RUU itu pun akhirnya menjadi terabaikan.

Kedua, tidak ada penentuan skala prioritas dalam setiap daftar Prolegnas sehingga semangat kebangsaan yang diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945 kian melemah. Masih menumpuknya sejumlah pekerjaan rumah di bidang politik adalah kenyataan yang harus kita hadapi bersama.

Nada optimistis dan pesimistis pun bermunculan. Apalagi jika mengingat janji politik pemerintahan Jokowi-Ma'ruf yang bertekad mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.

Jika memang kondisi atau fakta-fakta politik kita seperti itu, lantas bisakah kita menuntaskan agenda-agenda politik pada 2022?

Guna menjawab pertanyaan itulah, Forum Diskusi Denpasar 12 merasa penting dan perlu menggelar diskusi secara daring bertajuk Menuntaskan Agenda Politik di 2022 pada Rabu, 12 Januari 2022. ■



Kita harus melakukan berbagai antisipasi dengan satu tujuan bahwa apa pun yang kita kerjakan harus berujung pada terciptanya Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera.”

Lestari Moerdijat
Wakil Ketua MPR RI

2 Mengerjakan PR di Tengah Ketidakpastian

MEMBUKA diskusi, Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengajak bangsa ini untuk memulai 2022 dengan melihat kembali pekerjaan-pekerjaan rumah yang masih belum tuntas dikerjakan dan harus dilanjutkan.

“Pekerjaan-pekerjaan rumah tersebut tentu banyak berhubungan dengan antara lain agenda politik, yang memang seharusnya menjadi perhatian kita dan harus terus kita kawal,” ujarnya.

Rerie, panggilan akrab Lestari, melanjutkan, “Pandemi covid-19 tanpa terasa sudah kita lewati. Alhamdulillah di pertengahan tahun lalu, kita sudah bisa melalui kondisi krisis. Tetapi ternyata pandemi juga belum berhenti, bahkan sudah muncul lagi satu varian baru yang memerlukan perhatian kita.”

Benar, pemerintah memang sudah melakukan langkah-langkah untuk mengantisipasinya. Namun, semua ini diakui atau tidak, “Kita masih harus berhadapan dengan ketidakpastian yang membutuhkan kecermatan dan perhatian kita bersama.”

Beberapa data yang dilansir oleh banyak badan independen dunia seperti EIU menyatakan skor demokrasi Indonesia mengalami penurunan dalam lima tahun terakhir. Data lain juga menunjukkan kita mengalami peningkatan di sektor ekonomi. “Saya tidak mengatakan ini sebagai sebuah kebangkitan, tetapi tanda-tanda bahwa perekonomian sudah mulai bergerak,” tutur Rerie.

Beberapa badan dunia bahkan melihat perkembangan ekonomi Indonesia cukup menjanjikan. “Namun, beberapa catatan yang harus kita cermati ialah bagaimana kemudian memasuki tahun 2022 ini isu-isu nasional, isu-isu pemulihan ekonomi, dan konsolidasi politik mendapatkan perhatian khusus,” tambah Rerie.

Pasalnya, menurut legislator NasDem ini, “Kita masih berhadapan dengan berbagai isu seperti polarisasi, perbedaan yang berujung pada kekerasan, dan beberapa isu yang mau tidak mau mengharuskan kita untuk kembali mengingat dan kembali bersama-sama mencari jalan keluar guna merangkul seluruh komponen yang ada tanpa kecuali.”

Rerie mengingatkan, bangsa ini mesti mengedepankan kembali pemahaman tentang pentingnya memahami nilai luhur yang terkandung di dalam Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan *Bhinneka*

Tunggal Ika.

Ia mengungkapkan, kemarin dalam rapat paripurna pembukaan masa sidang DPR, setelah sekian lama, Ketua DPR menyatakan bahwa RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) sekarang menjadi RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Belasan tahun RUU itu dibahas DPR dan tidak ada ujung pangkalnya, padahal sangat ditunggu masyarakat. Pada sidang paripurna ke depan, menurut Rerie, pimpinan akan mengumumkan RUU TPKS sebagai RUU inisiatif DPR dan proses pembahasannya akan dimulai. “Di sini kita melihat bahwa orkestrasi politik legislasi nasional yang terjadi di 2021, saya sebagai anggota DPR, harus mengakui sangat berat,” kata Rerie.

Bayangkan, dari 37 RUU yang ditetapkan, hanya delapan RUU yang pada akhirnya bisa ditetapkan. Bahkan yang menyedihkan, menurut Rerie, RUU yang memiliki banyak relasi kuat dengan masalah hak konstitusional rakyat justru belum selesai.

Rerie menegaskan, RUU yang berhubungan dengan hajat hidup orang banyak, termasuk di dalamnya ialah kedaulatan kita bukan sebagai negara tetapi kedaulatan kita sebagai manusia sebagaimana yang dituntut di dalam RUU TPKS, belum terselesaikan.

RUU TPKS, RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, dan RUU Masyarakat Hukum Adat, disebut Rerie, harus diberi catatan-catatan khusus dan dicermati perkembangannya. “Sudah dua tahun terakhir ini kita melakukan serangkaian diskusi dengan be-

berapa catatan. Tiga RUU tersebut sebagai bagian yang harus kita awasi,” tegas Rerie.

Situasi yang dihadapi selama pandemi covid-19, terutama terkait dengan pelayanan dan kebijakan publik, juga perlu mendapatkan perhatian. “Tidak terasa kita telah memasuki 2022 dan sebentar lagi kita memasuki tahun politik 2024. Berbagai macam isu, diskursus, gagasan mulai dari yang bisa disebut sebagai obrolan warung kopi, bahkan yang menjadi agenda politik, mulai muncul,” tambah Rerie.

Kelompok-kelompok di dalam masyarakat juga mulai bermunculan. Rerie mengajak semua elemen bangsa memperkuat dan mempererat nilai-nilai kebangsaan. “Kita harus melakukan berbagai macam antisipasi dengan satu tujuan bahwa apa pun yang kita kerjakan harus berujung pada terciptanya Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera bagi kita semua. Kami ingin menggarisbawahi bahwa terhadap situasi yang kita hadapi saat ini diperlukan restorasi kebijakan publik sebagai bagian dari transformasi politik menuju situasi yang lebih manis,” demikian Rerie. ■



Partisipasi partai politik tidak hanya hadir dalam momen-momen politik elektoral. Partai politik harus langsung terlibat dengan apa yang menjadi agenda penting dari masyarakat sipil.”

Airlangga Pribadi

Anggota Pansel Calon Anggota KPU RI,
pakar politik dari FISIP Universitas Airlangga,
Surabaya

3

Mereformasi Partai Politik

ANGGOTA Panitia Seleksi Calon Anggota KPU RI yang juga pakar politik dari FISIP Universitas Airlangga, Airlangga Pribadi, berpendapat bahwa persoalan menurunannya demokrasi tidak hanya dihadapi Indonesia, tetapi juga negara-negara lain. “Sehingga untuk melihat persoalan apa yang sebenarnya sedang kita hadapi dan bagaimana menuntaskan capaian-capaian politik yang harus kita dorong pada tahun 2022 ini, maka kita juga harus melihat pada akar persoalan yang kini sedang kita hadapi,” kata Airlangga.

Selain penurunan indeks demokrasi, menurut dia, Indonesia kini juga sedang menghadapi masalah ketimpangan sosial. “Jadi penting sekali melihat akar dan masalah utama yang dihadapi di Indonesia saat ini.”

Dia melanjutkan, “Kalau kita melihat Indonesia hanya dari penurunan indeks demokrasi, ini bukan sesuatu yang unik dan hanya Indonesia yang menghadapinya.” Pasalnya, tegas Airlangga, penurunan indeks demokrasi atau regresi demokrasi adalah bagian dari masalah yang dihadapi banyak negara, sudah mengglobal. Kenyataan seperti itu tidak hanya berlangsung di negara-negara kawasan Asia Tenggara, tapi juga di negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan Inggris.

Yang harus dikritisi ialah apa yang membuat krisis demokrasi tersebut berlangsung secara masif? Untuk menyelesaikannya, menurut Airlangga, tidak cukup melihat sebatas pada persoalan dan masalah demokrasi, atau hanya berfokus pada lembaga demokrasi semata. Airlangga mengatakan persoalan demokrasi tidak bisa dilepaskan dari masalah ekonomi, politik, dan sosial.

Pelemahan demokrasi yang dihadapi Indonesia dan juga di negara-negara maju, disebut Airlangga, adalah menguatnya polarisasi politik. “Pembelahan-pembelahan politik makin menguat, termasuk penggunaan politik identitas berbasis ras, agama, dan identitas kultural yang kemudian masuk ke panggung pemilu.”

Airlangga melanjutkan, di negara-negara Asia Tenggara dan negara-negara yang baru mengalami proses demokrasi, problem utama dari krisis demokrasi itu juga dipicu oleh misalnya masih menguatnya politik uang.

Lalu, apa sebetulnya yang harus kita lihat terkait dengan persoalan polarisasi politik identitas dan politik uang yang juga men-

jadi bagian dari persoalan di Indonesia? Jawabannya, “Karena kita punya problem ketimpangan ekonomi yang begitu kuat. Kita menyaksikan bahwa 1% orang terkaya di Indonesia menguasai 46% dari kemakmuran Indonesia.”

Ketimpangan sosial itu memunculkan kecemasan dan kekecewaan yang tidak kunjung terartikulasi dalam ruang-ruang politik. “Kita melihat bahwa politik representasi di Indonesia kurang menjadi kanalisasi terhadap problem-problem ketimpangan sosial yang begitu menguat,” ujar Airlangga.

Itulah yang menyebabkan, baik di Indonesia maupun negara-negara lain, munculnya polarisasi politik dan populisme kanan. Dari sini muncullah saluran-saluran kekecewaan yang tidak terartikulasi dalam politik representasi. “Inilah salah satu persoalan utama di banyak negara, termasuk di Indonesia,” kata Airlangga.

Ketimpangan sosial dan krisis ini kemudian berlanjut pada era covid-19. Di berbagai daerah dan wilayah, kebutuhan terhadap politik uang kian menguat. Airlangga mengatakan, “Itulah yang kemudian menjadi salah satu persoalan yang kita hadapi.” Namun, menurutnya, ke depan bukan berarti Indonesia tanpa harapan dalam menghadapi persoalan-persoalan demokrasi.

“Terkait dengan indeks demokrasi yang dibuat oleh salah satu lembaga demokrasi internasional, mereka mengutarakan bahwa dalam konteks Asia Tenggara, Indonesia termasuk negara yang risikonya paling kecil untuk kemudian mengarah pada autokrasi atau regresi demokrasi yang sangat dalam,” tambah Airlangga.



MII/RAMDANI

Bendera berbagai partai politik peserta Pemilu 2024 terpasang memenuhi Jembatan Semanggi, Jakarta, Selasa (16/1/2024). Menurut Airlangga Pribadi, persoalan yang muncul dalam 5-10 tahun terakhir ialah aliansi dan keterhubungan antarpolitical partai hanya berdasarkan kepentingan mereka, bukan pada bagaimana afiliasi dan pertemuan ideologis.

Dia menambahkan, itu merupakan kesempatan bagi Indonesia untuk bisa menyelesaikan persoalan ini. Apalagi Indonesia termasuk negara yang secara konsisten berhasil dan tetap mempertahankan proses elektoral pemilu dengan kompleksitas yang begitu besar, tetapi secara berkala dan berkompertif berlangsung secara *fair*.

Jadi penting sekali, kata Airlangga, kita memilih penyelenggara pemilu yang berintegritas, baik di level KPU maupun Bawaslu. “Kami sudah berikan kepada Presiden dan menurut kami sudah optimal meskipun kami tidak bisa bilang sempurna, karena di sana ada representasi intelektual, representasi masyarakat sipil, representasi wilayah, representasi gender, dan sebagainya.”

Ia berharap DPR bisa memproses semua itu dengan baik dan bisa memilih penyelenggara pemilu yang berintegritas. “Di sinilah menurut saya kesempatan dan ruang-ruang perbaikan itu bisa tetap berlangsung.”

Reformasi Partai Politik

Lalu, bagaimana dengan masalah ketimpangan sosial yang kemudian mendorong kita masuk kepada persoalan polarisasi politik dan politik uang? Airlangga mengatakan, “Penting bagi kita untuk membangun reformasi partai politik agar partai politik mampu mengartikulasikan formulasi-formulasi ideologis yang kemudian bisa mengkanalisasi harapan-harapan masyarakat yang saat ini sedang mengalami krisis ekonomi.”

Menurut Airlangga, rehabilitasi partai politik menjadi penting. Restorasi kebijakan dalam agenda-agenda partai politik menjadi hal yang sangat penting. Mengacu pada 1999, kata Airlangga, identifikasi pemilih terhadap partai politik cukup besar, mencapai 84%. Namun, sampai 2019 angka afiliasi warga atau pemilih terhadap partai politik turun jauh sampai sekitar 10%. “Ke depan,

menurut saya yang harus diangkat dan diperkuat ialah *sense of belonging* atau rasa kepemilikan warga konstituen atau pemilih terhadap partai politik.”

Sistem pemilu di Indonesia yang menganut sistem proporsional terbuka, disebut Airlangga, menjadikan partai politik bukan sebuah organ politik yang kuat sebagai penyalur aspirasi masyarakat. Dengan proporsional terbuka, yang terjadi selanjutnya ialah munculnya orang-orang yang memiliki kapital besar (kaum oligarki). Dengan menggunakan kapitalnya, mereka masuk dan memengaruhi poros-poros politik. Kekuatan partai politik sebagai saluran dari aspirasi masyarakat kemudian melemah.

Lalu, bisakah pengaruh oligarki itu dipangkas? Airlangga mengatakan, bisa jika biaya operasional partai politik dibayar oleh negara. Karena dibiayai negara, posisi partai politik secara formal makin menguat. Kepemilikan warga dan konstituen terhadap partai politik makin tinggi.

Airlangga menyebutkan partai dipaksa dan dituntut untuk bekerja sesuai dengan kepentingan dan aspirasi masyarakat. “Ini akan semakin terkoneksi karena partai dibayar oleh pajak. Ini salah satu hal untuk membentengi dan memoderasi masalah terkait dengan pengaruh dari oligarki.”

Menurut Airlangga, melihat perkembangan partai politik dalam 5-10 tahun terakhir, persoalan yang muncul ialah bahwa aliansi dan keterhubungan di antara partai-partai politik hanya berdasarkan pada kepentingan-kepentingan dari partai politik,

bukan pada bagaimana afiliasi-afiliasi dan pertemuan ideologis.

Ke depan, harus dimunculkan bagaimana merehabilitasi partai politik dalam konteks partai politik harus mampu menampilkan kembali ideologi-ideologi yang berbasis pada isu-isu kewargaan. “Politik kewargaan menjadi hal yang penting,” tambah Airlangga.

Dari sana, partai-partai politik kemudian bisa berbicara bersama tentang berbagai isu krusial seperti bagaimana menghadirkan undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga atau undang-undang atau regulasi yang mengikis misalnya kekerasan seksual, kekerasan dalam rumah tangga, dan sebagainya.

Partisipasi warga dalam proses kepartaian itu menjadi hal yang penting untuk menjadi agenda bersama partai politik. “Partisipasi partai politik tidak hanya hadir dalam momen-momen politik elektoral. Partai politik harus langsung terlibat dengan apa yang menjadi agenda penting dari masyarakat sipil,” demikian Airlangga. ■



Sesungguhnya
masyarakat Indonesia
belum siap melakukan
pemilu secara langsung
karena *money politics*
dan pragmatisme
yang luar biasa.”

Irma Suryani

Anggota DPR RI dari Fraksi Partai NasDem

4 Efek Penurunan Indeks Demokrasi

ANGGOTA DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Irma Suryani, mencoba menjelaskan secara rinci seperti apa indeks demokrasi Indonesia menurut EIU. Indeks demokrasi Indonesia, menurut lembaga itu, disebut Irma, saat ini berada di 6,3 dengan peringkat ke-64 dunia. Di Asia Tenggara, Indonesia menduduki peringkat keempat setelah Malaysia, Timor Leste, dan Filipina. EIU memberikan skor kepada Indonesia 7,92 untuk proses pemilu dan pluralisme, 7,50 untuk fungsi dan kinerja pemerintah, 6,11 untuk partisipasi publik, 4,38 untuk budaya politik, dan 5,59 untuk kebebasan sipil.

Terkait dengan pemilu dan pluralisme, Irma menjelaskan, ada tiga hal yang harus dielaborasi serta kemudian penting untuk di-

analisis dan ditarik kesimpulan apa yang harus dilakukan.

Pertama, regulasi. “Jika kita bicara pemilu, regulasinya harus jelas dulu, terutama terkait dengan kualitas sumber daya manusia (SDM)-nya.” Irma menyoroti kualitas SDM penyelenggara pemilu, bagaimana panitia seleksi (pansel) dalam memilih komisioner KPU. Fakta di lapangan, menurut Irma, penyelenggara pemilu di daerah sangat *money politics*. Memberikan contoh, Irma menyebut saat penghitungan suara pemilu, ada suara 62.000 yang begitu penghitungan terakhir tiba-tiba langsung melejit menjadi 100.000. “Tidak tahu itu suara dari mana. Kita tidak bisa mencari kebenaran di KPU karena semua tertutup.”

Begitu juga dengan penyelenggara pemilu yang bernama Bawaslu. Irma mengatakan, Bawaslu di Indonesia hari ini, apalagi di daerah, tidak menjalankan fungsinya dengan benar, “Sehingga yang namanya demokratisasi, pemilu jurdil, dan lain sebagainya itu *nothing*.”

Terus terang, sampai saat ini, “Saya belum bisa menyebut bahwa Bawaslu telah menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Justru Bawaslu di daerah-daerah itu kerjanya hanya *nakut-nakutin* calon anggota legislatif,” ujar Irma.

SDM yang bertugas di TPS, menurut Irma, juga masih belum memenuhi kualitas sebagaimana diharapkan. “Saya kira ke depan, ini harus sama-sama kita perbaiki.”

Attitude masyarakat pun disebut Irma jadi pemicu menurunnya indeks demokrasi Indonesia. Irma menjelaskan, “Ketika kita



MI/BARY FATHA/HILAH

Spanduk tentang masa tenang terpasang di jembatan penyeberangan orang Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Selasa (16/4/2019). Spanduk tersebut berisikan pesan agar masyarakat ikut mengawasi masa tenang yang melarang adanya kampanye, melaporkan praktik politik uang, serta mewaspadaai politisasi SARA.

masuk dalam kontestasi pemilihan umum secara langsung, maka *attitude* masyarakat belum siap. Sesungguhnya masyarakat Indonesia belum siap melakukan pemilu secara langsung karena *money politics* dan pragmatismenya luar biasa.”

Kedua, SARA dan politik identitas. Menurut Irma, politik identitas jelas-jelas telah dilaksanakan dalam Pilkada DKI Jakarta ta-

hun 2017. “Inilah potret kita hari ini yang kemudian merajalela dan masuk ke dalam sendi-sendi persatuan dan kesatuan bangsa di tengah masyarakat di daerah. Kita terpecah belah oleh politik identitas ini,” kata Irma.

Ketiga, oligarki dalam pluralisme dan pemilu. Irma menjelaskan, pemilihan umum secara langsung terbuka sangat erat kaitannya dengan pragmatisme. Di sinilah oligarki politik pemilu bermain karena langsung terkait politik uang dan berkorelasi dengan kekuasaan daerah yang dimiliki oleh kepala-kepala daerah.

Irma sependapat bahwa ke depan harus ada yang namanya reformasi partai politik. Partai politik tidak hanya bertujuan mendapatkan kursi di parlemen, tetapi orang yang masuk ke parlemennya pun harus yang benar-benar mau menjadi wakil rakyat. “Jangan yang tidak berkualitas, tidak punya *sense of belonging* terhadap kebijakan-kebijakan publik, tidak punya *sense of belonging* terhadap fungsinya sebagai wakil rakyat,” tegas Irma.

Oligarki politik, menurut Irma, lazimnya menempatkan orang-orangnya di PPK, PPS, dan penyelenggara pemilu di tingkat bupati dan wali kota. “Mereka yang menempatkan atau memosisikan orang-orangnya di sana untuk pengaman pemilu. Banyak di antara mereka yang sudah menjadi bagian dari kekuasaan wilayah, kekuasaan daerah,” tutur Irma.

Jangan heran kalau anak, saudara, atau istrinya yang maju menjadi anggota legislatif atau kepala daerah, tidak ada lagi orang lain yang bisa mengalahkan mereka sehingga calon-calon

yang berkualitas tidak akan pernah menang. “Ketika kita berhadapan dengan penguasa wilayah seperti ini, maka partai politik tidak cukup hanya menempatkan atau meraih kursi di parlemen, tapi harus betul-betul menempatkan sosok wakil rakyat yang benar-benar berkualitas yang memiliki kapasitas, kapabilitas, dan akuntabilitas,” ujar Irma.

Irma kemudian mencoba menyoroti kondisi politik kekinian dengan fungsi dan kinerja pemerintah. Dia menegaskan, fungsi pemerintah terkait dengan pelayanan publik, misalnya BUMN, harus memberikan keuntungan buat rakyat. Meskipun punya tugas menghidupi hajat hidup orang banyak, BUMN tidak boleh rugi.

Kini BUMN-BUMN sudah mulai diperbaiki. Sebelumnya, banyak BUMN yang rugi. Mengapa merugi? Irma mengatakan, karena direksi-direksinya berpikir bahwa perusahaan pemerintah itu tidak perlu *profitable*. Dibiarkan rugi karena alasannya adalah untuk hajat hidup orang banyak. “Betul, pemerintah memang tidak boleh berbisnis kepada rakyat, tapi bukan berarti BUMN tidak boleh untung. *Attitude* dari direksi-direksi BUMN juga harus diperbaiki,” imbuh Irma.

Menyinggung soal pelayanan publik lainnya, seperti BPJS, Irma menegaskan, BPJS harus betul-betul berguna bagi rakyat Indonesia. “Tapi kenyataannya kita lihat hari ini banyak sekali warga masyarakat yang masih mengeluh terkait dengan pelayanan BPJS.” Ia pun mempertanyakan APBN untuk kesehatan demikian besar, tapi mengapa BPJS tidak diberikan subsidi agar pelayanan

kepada rakyat bisa lebih maksimal?

Begitu pula terkait dengan Kartu Prakerja. “Saya enggak melihat adanya manfaat dari Kartu Prakerja ini di era pandemi. Di mana fungsi Kartu Prakerja ketika kemudian banyak warga masyarakat yang terkena dampak pandemi dan menjadi tunawisma, tidak bekerja. Apa yang dilakukan Menteri Ketenagakerjaan?” tambah Irma.

Ke depan, saran Irma, DPR harus betul-betul menghitung anggaran yang sudah diajukan oleh kementerian kepada DPR untuk kemudian dilaksanakan dan didistribusikan kepada masyarakat dalam bentuk program. Sayang memang, menurut Irma, “Sampai hari ini kita masih lihat, banyak program kementerian yang tumpang tindih. Banyak sekali program kementerian yang kemudian menjadi tidak bermanfaat bagi rakyat.”

Memberikan contoh, Irma menjelaskan di Kementerian Kesehatan ada upaya menanggulangi kasus demam berdarah di daerah dengan membeli kelambu. “Saya bilang untuk apa kelambu hari ini? Keluar dari kelambu orang digigit nyamuk.”

Irma memandang penting perlunya menumbuhkan budaya politik terkait dengan etika, moral, dan agama. “Kalau partai politik tidak mengajarkan sekolah legislasi seperti yang dilakukan Partai NasDem, banyak sekali anggota dewan yang berbicara ke publik tidak menggunakan etika. Pasti akan banyak terjadi hal yang tidak kita inginkan bersama. Ini tidak boleh terjadi,” demikian Irma. ■



Ada catatan buram dalam politik legislasi ketika UU Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi sehingga harus direvisi.”

Atang Irawan

Pakar hukum tata negara
Universitas Pasundan, Bandung

5 Prolegnas dan Pemerintah Pusat yang makin Menguat

AGENDA politik apa yang harus dituntaskan pada 2022? Pakar hukum tata negara, Atang Irawan, mencoba menjawab pertanyaan itu dengan menyoroti produk perundang-undangan. “Politik legislasi kita mengalami rapor yang kurang bagus,” katanya.

Atang memberikan contoh, dalam proses prolegnas, sejak 2016 sampai sekarang, akselerasinya tidak lebih dari 30%. Banyak RUU yang didaftarkan dalam prolegnas, tapi berstatus hanya sebagai daftar tunggu.

Pada 2016, papar Atang, dari 50 RUU, hanya 10 yang ditetapkan menjadi UU. Tahun 2017, dari 62 hanya 6 yang lolos. Tahun 2018, dari 50 RUU hanya 5 yang berubah status menjadi UU. Ta-

hun 2019, dari 55 hanya 14 yang ditindaklanjuti. Tahun 2020, dari 37 RUU hanya 3 yang diproses lebih lanjut. Tahun 2021, perlu catatan khusus, sebab dari 33 RUU yang masuk prolegnas, hanya 5 yang ditindaklanjuti.

“Yang agak menarik ialah ketika kita masuk dalam Prolegnas 2022, ternyata ada tiga RUU yang sudah ditetapkan pada 2021 muncul lagi dalam Prolegnas 2022,” ujar Atang.

Memberikan contoh, ia menyebut Undang-Undang Jalan, lalu revisi atas UU Kejaksaan dan perubahan atas UU Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah yang sebelumnya telah ditetapkan menjadi undang-undang. Masih dalam Prolegnas 2022, ada beberapa RUU yang sesungguhnya sudah diatur dalam UU Cipta Kerja dimasukkan lagi ke prolegnas, yakni UU Penyiaran. Juga UU tentang BUMN dan UU Narkotika.

Atang mengkhawatirkan semua itu terjadi lantaran adanya ketidakhati-hatian dari DPR, atau, “Mungkin saya yang enggak tahu bagaimana prosedur menentukan RUU di prolegnas.”

Menurut Atang, prolegnas mestinya ditetapkan sebelum APBN ditetapkan. Akan tetapi, kenyataannya, seluruh daftar prolegnas setelah APBN ditetapkan. Padahal, program legislasi itu berimplikasi pada anggaran. Berdasarkan catatan Atang, hanya sekali prolegnas ditetapkan sebelum APBN beres, yakni Prolegnas 2019 yang ditetapkan pada 31 Oktober 2018.

Atang melanjutkan, kini ada 40 RUU yang masuk dalam Prolegnas 2021. Namun, sampai sebegitu jauh tidak ada penjelasan

mana yang skala prioritas dan harus dibahas serta disetujui menjadi UU. “Politik legislasi kita ini memang banyak *wishlist*-nya, tapi yang dibahas sedikit,” ujar Atang.

Padahal, tambah Atang mengutip Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat, banyak RUU terkait dengan kepentingan hak-hak konstitusional rakyat yang seharusnya menjadi prioritas, tapi tertunda lama sekali, bahkan lebih dari 10 tahun, seperti RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual, RUU Masyarakat Hukum Adat, RUU Pendidikan Kedokteran, dan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga.

Atang juga berpendapat ada catatan buram dalam politik legislasi ketika UU Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi sehingga harus direvisi. Salah satu *item*-nya, jelas Atang, ialah tidak adanya sosialisasi. Padahal sesungguhnya sejak UU itu masih dalam prolegnas, sebenarnya sudah dilakukan sosialisasi. “Memang logika politiknya, kita bisa melihat dan merasakan kelihatannya memang tidak cukup ruang untuk sosialisasi karena saat ditetapkannya pun seperti tergesa-gesanya.”

Menurut Atang, itulah persoalan prolegnas yang kita hadapi. “Ke depan prolegnas mesti diletakkan pada tujuan kita bernegara sebagaimana diatur dalam UUD 1945.”

Jadi, skala prioritas dalam pembuatan UU, tambah Atang, yang harus diperhatikan ialah, pertama, dalam rangka melindungi masyarakat. Kedua, dalam rangka kesejahteraan. Ketiga, dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. “Seharusnya itu yang men-



MI/SUSANTO

Anggota Badan Legislasi DPR RI, Firman Subagyo (kiri), didampingi peneliti Formappi, Lucius Karus, berbicara dalam diskusi Forum Legislasi di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (7/2/2023). Diskusi tersebut menakar ketercapaian target RUU Prolegnas Prioritas Tahun 2023.

jadi *mindset* utama. Proporsinya harus jelas, baru setelah itu kita pikirkan mana yang prioritas untuk kepentingan pemerintah, kepentingan keuangan negara mana, dan mana untuk kepentingan politik.”

Dalam konteks pembahasan prolegnas dan penetapan prolegnas prioritas, Atang melihat peran eksekutif masih sangat dominan. “Saya kira itu karena konstitusi kita mengatur itu, presiden dan DPR punya hak yang sama mengajukan RUU. Itu pandangan saya dalam konteks potret politik legislasi nasional.”

Pemilu Rawan

Atang kemudian menyoroti Pemilu 2024 yang menurutnya berpotensi terjadinya kerawanan. Sampai sekarang DPR dan Presiden belum menetapkan kapan Pemilu 2024 dilaksanakan. Yang baru disepakati ialah pilkada, November 2024. Atang melihat ada dua agenda besar bagi penyelenggara. Tahun 2022/2023 akan terjadi kekosongan kepala daerah. Di 2022, masa jabatan 101 kepala daerah berakhir. Adapun di 2023 sebanyak 171 kepala daerah.

Di luar sudah banyak suara yang mengatakan, apakah anggota Polri-TNI bisa menjadi penjabat kepala daerah meskipun undang-undang membolehkan. Atang mengingatkan, pada 2022-2023 masa jabatan anggota KPU dan Bawaslu di seluruh Indonesia sudah berakhir. Jika tidak segera diperhatikan, akan memunculkan benturan dalam proses tahapan pemilu dan pilkada.

Ini harus segera diurus, sebab menurut Atang, untuk melakukan seleksi komisioner KPU atau anggota Bawaslu paling tidak membutuhkan waktu tiga bulan. Setelah seleksi, mungkin akan ada gugatan-gugatan dari peserta seleksi KPU dan Bawaslu. Mereka yang tidak lolos bisa saja mengadu ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), atau ke pengadilan tata usaha negara. Ini semua harus diantisipasi.

Kinerja Pemerintah Pusat

Kepala Departemen Perubahan Politik dan Sosial CSIS, Arya Fernandez, memandang agenda politik yang harus dituntaskan

pada 2022 ialah dari sisi kinerja pemerintahan di tingkat pusat dan seleksi kepemimpinan nasional 2024.

Arya menyimpulkan, kinerja pemerintahan dalam 3-6 bulan terakhir relatif baik, mengalami perbaikan cukup signifikan. “Pada enam bulan sebelumnya, kalau kita lihat agregat atau rata-rata dari survei-survei opini publik yang sudah dilakukan, kisarannya sempat menyentuh di bawah 60%, tapi sekarang angkanya sudah di kisaran 65%-70%,” katanya.

Arya menegaskan, itu merupakan capaian yang baik di tengah situasi dan tantangan yang tidak ringan. Apalagi pemerintahan menghadapi masalah yang cukup berat, misalnya terkait dengan bagaimana menuntaskan program vaksinasi nasional, kemudian *recovery* ekonomi yang juga membutuhkan usaha keras.

Dalam satu-dua tahun terakhir, menurut Arya, peran pemerintah pusat kian menguat. “Pemerintah pusat hampir kuat mengendalikan semua aspek dan kebijakan strategis nasional. Nyaris tanpa ada diskursus yang berarti di parlemen dan juga di partai politik. Jadi dengan kekuatan yang mayoritas di DPR, pemerintah pusat cukup *powerful* dan punya peran yang sangat besar.”

Arya memberikan contoh peran pemerintah yang kuat itu misalnya terlihat dari diundangkannya UU Cipta Kerja. Beberapa kebijakan mengenai stabilitas keuangan juga terjaga dengan baik.

Terkait dengan kepemimpinan nasional, Arya sependapat

dengan wacana angka *presidential threshold* diturunkan. “Tapi saya kurang sepakat kalau turunnya 0%. Sebab, kalau 0%, kita bisa bayangkan presiden terpilih tidak punya kekuatan politik yang moderat di DPR sehingga dia sangat rentan sekali untuk diganggu. Bahkan pada level yang sangat ekstrem, presiden sangat berisiko untuk dimakzulkan,” tutur Arya.

Menurut dia, batas minimal persyaratan dukungan yang diperlukan, jika mau diturunkan, cukup di angka moderat 15%. Mengapa 15%? “Kita punya pengalaman presiden hasil Pilpres 2004. Persyaratan pencalonan presiden saat itu 15%, pilkada juga 15%, sehingga dengan 15%, koalisi antarpolisi menjadi lebih mudah,” ujar Arya.

Aspek lain yang juga harus dituntaskan pada 2022, kata Arya, ialah soal kepastian waktu Pemilu 2024. “Ini perlu dituntaskan di 2022 sebab saya mendengar kabar pemerintah bersama DPR menunda proses pembahasan waktunya sampai terpilihnya anggota KPU baru yang akan dilantik presiden pada April nanti.”

Namun, Arya mencatat, dalam satu tahun terakhir ia melihat terjadi penurunan komitmen bangsa ini terhadap demokrasi dan konstitusi. Penurunan komitmen terhadap demokrasi dan konstitusi ini dapat terlihat pada beberapa hal. Antara lain, ada gerakan yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk mendorong jabatan presiden tiga periode.

“Ini menurut saya gagasan yang demokratis, tapi tidak demokratis. Kenapa? Karena konstitusi kita jelas sekali menga-

takan bahwa masa jabatan presiden dua periode,” katanya.

Arya menambahkan, memang terbuka untuk dilakukan amendemen konstitusi, “Tetapi, kan, reformasi kita, amendemen konstitusi yang kita lakukan pembatasan kekuasaan atau masa jabatan presiden jadi dua periode.”

Banyak negara demokratis yang menganut presidensial, jabatan presiden umumnya dua periode, bahkan ada yang satu periode. “Jadi gagasan untuk mendorong presiden tiga periode, saya kira adalah gagasan atau komitmen yang tidak demokratis. Perpanjangan masa jabatan presiden juga komitmen yang tidak demokratis,” tambah Arya.

Ada pula wacana memundurkan waktu pemilu. Lagi-lagi, menurut Arya, ini sama sekali juga tidak demokratis. Dia menyayangkan gagasan atau pandangan yang tidak demokratis itu justru muncul dari pusat-pusat kekuasaan.

Pada 2024, Indonesia memang perlu menyiapkan pemimpin yang profesional dan inovatif di tingkat lokal untuk mengurangi ketimpangan antarwilayah, terutama di kota dan desa. “Inovasi kepemimpinan tidak mungkin muncul kalau kepala daerahnya enggak berpengalaman. Politik dinasti tidak mungkin tumbuh dan berkembang kalau partai politik tidak memberikan tiket pencalonan pada calon-calon tertentu,” demikian Arya. ■



Ketakutan anak muda untuk masuk partai politik, salah satunya karena tidak punya koneksi. Padahal suara milenial dan generasi Z pada 2024 menjadi tulang punggung suara pemilih.”

Lathifa Al Anshori

Ketua DPP Partai NasDem
Bidang Pemilih Pemula dan Milenial

6 Generasi Z dan Politik Identitas

KETUA DPP Partai NasDem Bidang Pemilih Pemula dan Milenial, Lathifa Al Anshori, mencoba menyoroti agenda politik 2022 dari sudut pandang anak muda atau milenial.

“Karena posisi saya di sini sebagai Ketua DPP Partai NasDem Pemilih Pemula dan Milenial, maka izinkan saya menggunakan pendekatan bagaimana menuntaskan agenda politik dari sudut pandang kebutuhan anak-anak muda generasi milenial dan generasi Z,” ujarnya.

Terkait dengan politik identitas dan politik uang, Lathifa mengungkapkan, banyak anak muda yang curhat dan galau soal politik. “Mereka mengkhawatirkan soal borosnya anggaran untuk

mengikuti kegiatan politik sehingga mereka pun bertanya-tanya soal politik uang.”

Di sisi lain, menurut Lathifa, politik identitas non-SARA sebenarnya bisa menjadi sebuah alternatif bagi anak-anak muda untuk bisa mengumpulkan banyak massa sesuai dengan identitas mereka. “Jika komunitas mereka diperhatikan dan diberdayakan, dan akhirnya mereka terlibat dalam kegiatan partai, bisa saja mereka masuk menjadi caleg dan mendapatkan suara banyak dan menjadi kursi di dalam politik,” ujar Lathifa.

Anak-anak muda, disebut Lathifa, senang berkumpul bersama komunitas mereka. Ada tren anak-anak muda saat ini berkumpul karena mereka berasal dari sekolah yang sama, alumni yang sama, dan mereka kemudian membentuk komunitas tertentu.

Menurut Lathifa, kecenderungan seperti itu sudah terlihat pada Pemilu 2019 dan akan makin marak pada 2024. “Banyak anak muda mencari alternatif ketika mereka mulai masuk ke politik.”

Pada 2024, anak-anak muda yang masuk ke parpol berarti mereka kelahiran minimal tahun 2007. “Solusi yang saya rasa bisa kita pilih ialah terus memperluas kesempatan dan beri wawasan kepada anak-anak muda agar percaya diri dengan segala perbedaan yang ada,” ujar Lathifa.

Menurut dia, salah satu isu utama yang terjadi pada generasi muda Indonesia saat ini ialah kurangnya rasa percaya diri mereka untuk melakukan banyak hal, baik di dunia kerja maupun di

lingkungan keluarganya.

Memberikan contoh, Lathifa mengatakan, untuk mendapatkan pekerjaan, mereka tidak percaya diri dengan pendidikan yang sudah mereka miliki. Mereka merasa kekurangan koneksi untuk bisa mendapatkan pekerjaan. Bentuk ketidakpercayaan generasi muda lainnya, menurut Lathifa, terlihat dalam lingkungan keluarga apabila ada hal-hal yang berkaitan dengan hoaks.

Generasi milenial dan generasi Z adalah *digital native*. *Digital native* adalah mereka yang lebih cepat menangkap apabila berita-berita itu cenderung salah atau hoaks. Namun, mereka tidak percaya diri sebagai orang yang memahami persoalan itu untuk berbicara kepada anggota keluarganya yang lebih senior bahwa informasi yang dibaca adalah hoaks. Mereka akhirnya pasif.

“Ini menjadi dilema yang kerap saya temukan sepanjang dua tahun ini ketika saya menjabat sebagai ketua DPP dan berdiskusi dengan banyak anak muda,” ujar Lathifa.

Menanggapi pembicara sebelumnya terkait dengan oligarki politik, Lathifa mengatakan hal itu dibahasakan anak muda dengan kata-kata, “Kalau kamu enggak punya koneksi di partai politik, kamu enggak bisa masuk partai. Kalau enggak punya jaringan di politik, kamu enggak bisa menang di politik, dong.”

Ungkapan dan pertanyaan seperti itu, menurut Lathifa, banyak ditanyakan tidak hanya oleh mereka yang sudah bekerja, tetapi oleh anak-anak SMA, anak-anak yang baru lulus kuliah. “Semuanya berkata bahwa partai atau politik adalah tempat

kekuasaan di mana kalau kita mau masuk harus punya koneksi.”

Lathifa menambahkan, ketakutan anak muda untuk masuk partai politik, salah satunya karena tidak punya koneksi. Padahal, tambahnya, suara milenial dan generasi Z pada 2024 menjadi tulang punggung suara pemilih. Jumlah mereka mayoritas dengan komposisi 58% dari pemilih.

Menurut Lathifa, banyak program pemerintah sejak tahun lalu yang mulai dititikberatkan bagi milenial dan generasi Z. Konsekuensinya, digitalisasi harus diperbanyak karena mereka memang *digital native*. Program digitalisasi harus terarah sampai ke desa karena sekarang semua orang sudah terkoneksi dengan media sosial sehingga mereka yang tinggal di desa juga bisa melihat apa yang terjadi di kota. Namun, disayangkan program-program tersebut belum semuanya sampai ke sana, mungkin baru sampai kota-kota di tingkat kabupaten. Kalau penyebarannya lebih luas lagi, tentu akan lebih baik.

Lathifa terkadang melihat ada yang lucu dengan program digitalisasi. Programnya banyak, tapi motivasi anak mudanya rendah. “Saya rasa memang perlu tokoh-tokoh yang sudah senior menjadi motivator untuk anak-anak muda agar mereka bangkit dan maju, ikut aktif dalam politik dan mengisi agenda-agenda politik untuk memajukan Indonesia.”

Permainan Elite Politik

Dalam menanggapi pengantar Wakil Ketua MPR RI Lestari

Moerdijat tentang banyaknya pembahasan RUU penting yang macet di tengah jalan, Founder Total Politik, Arie Putra, mengatakan kondisi itu lebih banyak disebabkan oleh adanya hubungan antar-elite di parlemen dan pemerintah.

Mereka tidak memiliki *tone* keberpihakan pada perlindungan hak-hak konstitusional warga. “Memang sejak dulu kita melihat bahwa kebanyakan aturan perundang-undangan yang cepat disahkan di parlemen dan diundangkan oleh pemerintah adalah aturan-aturan yang terkait dengan hubungan aturan main sesama elite,” kata Arie.

Dalam konteks kebebasan berbicara, menurut Arie, para *content creator* sangat rentan terkena UU ITE. “Ini bisa menjadi benua dalam demokrasi, bagaimana persoalan-persoalan sektarian di Indonesia, persoalan-persoalan yang berkaitan dengan kepercayaan harus diselesaikan menggunakan instrumen-instrumen negara,” ujarnya.

Bicara soal polarisasi politik, menurut Arie, fakta yang terjadi, ranah dialog politik di Indonesia dimonopoli oleh kekuatan korporasi yang orientasinya bukan nilai-nilai kebangsaan, bukan nilai-nilai persatuan, melainkan nilai-nilai yang berorientasi pada *profit capital accumulation*.

Itulah perkembangan ekosistem digital di Indonesia hari ini. Ini sekaligus yang menjadi keresahan karena situasi yang terpolarisasi ini ditambah dengan tersedianya fasilitas-fasilitas untuk menggunakan instrumen negara dalam menyelesaikan ketersing-

gungan.

Menutup diskusi, wartawan senior Saur Hutabarat menegaskan beberapa agenda politik yang mesti dituntaskan pada 2022. Pertama, RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual harus segera disahkan menjadi undang-undang.

Kedua, segera tetapkan kapan Pemilu 2024 diselenggarakan, berikut penyelenggara pemilunya harus segera terbentuk.

Ketiga, di masa pandemi covid-19 sebaiknya jangan ada kegaduhan-kegaduhan seperti ingin memperpanjang masa jabatan presiden, apalagi yang menyampaikan ide itu seorang menteri yang adalah pembantu presiden. “Kalau masih ingin menjadi menteri, ya, nantilah, tunggu presiden baru. Soal-soal menyangkut pikiran besar seperti reformasi kepartaian, *parliamentary threshold*, sebaiknya dibicarakan setelah 2024,” demikian Saur. ■





VM

**Badan Budaya
untuk Partai Politik**

1 Latar Belakang: Representasi Kedaulatan Rakyat

PARTAI politik dalam sistem demokrasi modern dipandang sebagai salah satu pilar untuk mewujudkan tujuan bernegara sebagaimana termaktub dalam konstitusi. Partai politik merupakan institusi yang penting dan *sine qua non* dalam merepresentasikan prinsip rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi (Firmanzah, 2011). Dari sisi organisasi, partai politik merupakan pengorganisasian yang dilakukan oleh rakyat dalam negara sebagai saluran kehendak rakyat. Selain itu, partai politik adalah persemaian kepemimpinan nasional.

Sejarah panjang perjalanan partai politik di negeri ini tidak

lepas dari upaya memperjuangkan kehendak rakyat tersebut. Pada 25 Desember 1912, Indische Partij didirikan di Bandung sebagai partai politik pertama yang tercatat dalam sejarah Indonesia. Itu membuktikan bahwa partai politik hidup dan menghidupi negeri ini dengan pergulatan dan perjuangan pemikiran serta kehendak rakyat.

Partai politik harus selalu tegak lurus dengan kepentingan rakyat. Ideologi dan cita-citanya harus selaras dengan kepentingan bangsa. Kebudayaan sejatinya adalah alam pikir ideologis yang menyatukan pluralitas identitas masyarakat dalam komitmen kebangsaan yang diterjemahkan dalam nilai-nilai Pembukaan UUD 1945 sebagai semangat pendirian Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Akar pluralisme yang menjadi kekuatan mahadasyat harus menjadi cita-cita perjalanan pertumbuhan bangsa menuju kesejahteraan yang berkeadilan tanpa diskriminasi. Dialektika kebudayaan memang saat ini tergerus oleh dahsyatnya pergumulan peradaban tanpa batas yang mendegradasi cara pandang kebangsaan. Bahkan secara hegemonik dapat merusak cara berpikir tentang entitas bangsa sehingga melahirkan polarisasi, pragmatisme, dan hedonisme. Mengembalikan kebudayaan sebagai entitas bangsa sesungguhnya menyelamatkan masa depan bangsa untuk kembali seperti yang dicita-citakan oleh para *founding fathers*.

Sebagai sebuah negara bangsa (*nation state*), Indonesia memiliki kebudayaan berupa tradisi panjang yang sarat dengan



MUSMAN ISKANDAR

Pengunjung mengamati lukisan pada pameran seni rupa bertajuk Indonesia Borderless di Lobi NasDem Tower, Jakarta, Senin (12/8/2024).

nilai-nilai luhur yang berakar dalam setiap sendi kehidupan masyarakat. Karena itu, kebudayaan menjadi fondasi utama dalam membentuk jati diri sebuah bangsa.

Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki keunikan berupa keragaman budaya yang tersebar dari Sabang hingga Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Dari generasi ke generasi, keragaman itu memiliki peran strategis sebagai perekat persatuan bangsa.

Sebagai bangsa, kita memiliki UUD 1945, Pancasila, NKRI, dan

Bhinneka Tunggal Ika yang sesungguhnya menjadi tameng dalam menghadapi segala macam persoalan kebangsaan, termasuk persoalan-persoalan yang berhubungan dengan kebudayaan. Negara lewat Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pemanjangan Kebudayaan, pada Pasal 4 menegaskan bahwa tujuan pemanjangan kebudayaan ialah agar kebudayaan menjadi haluan pembangunan nasional. Di samping itu, ada UU No. 11/2010 tentang Cagar Budaya, yang terdiri atas 116 pasal sebagai perubahan atas UU No. 5/1992 tentang Benda Cagar Budaya.

Meskipun memiliki peran penting, harus diakui bahwa permasalahan kebudayaan nasional sangat kompleks. Mulai dari persoalan pengelolaan cagar budaya hingga kesejahteraan para pekerja seni budaya itu sendiri. Banyak aspirasi para tokoh dan penggiat seni budaya yang disampaikan kepada Partai NasDem melalui kader di eksekutif maupun legislatif.

Bila meneropong ke masa depan, sejatinya perjalanan Indonesia sebagai bangsa memiliki tantangan yang tidak mudah untuk meneruskan cita-cita menuju kesejahteraan rakyat. Menuju Indonesia Emas 2045, kita akan berhadapan dengan perubahan demografi yang harus diantisipasi dan dipersiapkan dengan saksama.

Membesarnya persentase generasi muda membawa implikasi membesarnya potensi produktivitas bangsa yang sering disebut bonus demografi. Namun, di sisi lain, generasi muda yang memiliki jarak waktu yang terentang jauh dari titik awal konsensus

para pendiri bangsa dimulai, juga menyisakan pertanyaan mengenai apakah nilai-nilai dan karakter bangsa ini akan bertahan atau tergerus.

Lebih jauh dari itu, apakah kekayaan kebudayaan yang sejak dulu menjadi perekat keberagaman akan mengalami degradasi nilai di masa mendatang? Ini sebuah pertanyaan yang tentunya harus dijawab dengan perenungan, pemikiran, serta kerja keras bersama.

Mengingat pentingnya isu tersebut terkait dengan keberlangsungan bangsa dan negara ini ke depan, maka relevansi terbentuknya sebuah badan kebudayaan di partai politik seharusnya makin menguat. Badan kebudayaan menunjukkan keberpihakan dan keseriusan partai politik menghadapi dinamika serta berbagai permasalahan kebudayaan sebagaimana disebutkan di atas. Badan kebudayaan tidak sekadar menjadi atribut pemanis jargon politik belaka, tetapi menjadi medium yang dihidupi dan menghidupi kebudayaan. Badan kebudayaan harus menjadi organ aktif dalam mendorong kebijakan-kebijakan strategis negara dalam menjadikan kebudayaan sebagai haluan pembangunan nasional.

Untuk menjawab segala permasalahan tersebut, Forum Diskusi Denpasar (FDD) 12 bersama DPP Partai NasDem mengundang para pihak untuk urun rembuk mengenai formulasi sebuah badan kebudayaan. Pemikiran dan sumbang saran yang kemudian akan diejawantahkan menjadi rekomendasi strategis untuk dilakukan di masa depan. ■



Di era disrupsi teknologi sekarang ini, penting bagi kita untuk memmanifestasikan kembali nilai-nilai luhur kebudayaan sebagai karakteristik dan jati diri bangsa.”

Amelia Anggraini

Ketua Bidang Perempuan dan Anak
DPP Partai NasDem

2 Menghentikan Elegi Kebudayaan Nasional

KETUA Bidang Perempuan dan Anak DPP Partai NasDem Amelia Anggraini menyatakan kebudayaan merupakan fondasi dan identitas bangsa yang menjadi karakter kuat sebuah bangsa. Kebudayaan juga memiliki peran yang sentral, baik dalam tatanan berbangsa dan bernegara maupun dalam tatanan sosial politik di Indonesia.

“Kita memiliki keanekaragaman budaya yang diakui oleh dunia. Keanekaragaman budaya menjadi salah satu kekayaan kita. Perubahan zaman dan kemajuan teknologi yang begitu cepat membuat kita harus bergerak untuk menampung semua aspirasi terkait dengan isu-isu budaya,” jelas Amelia dalam diskusi bertajuk Pentingnya Badan Budaya untuk Partai Politik.

Selama ini kita sering mengeluh perihal kurangnya perhatian generasi muda terhadap budaya dan karya seni, kurangnya per-

hatian terhadap pegiat seni dan budayawan, kurangnya perhatian terhadap sektor industri kreatif, hingga kurangnya gaung tentang ragam budaya kita di mata dunia. “Semuanya bersatu menjadi sebuah elegi kebudayaan nasional di tengah maraknya industri 4.0 yang ditandai pertarungan konten dan wacana yang serba-canggih,” katanya.

Pemaknaan terhadap perkembangan industri 4.0 yang sangat pesat, tentunya dalam kaca mata budaya, idealnya harus menjadi sebuah jalan yang positif bagi seni dan budaya. Sebagai bukti, seni kreatif di era sekarang menunjukkan perkembangan yang konstan dan terus menunjukkan tren positif. Namun, di sisi lain, hal itu juga bisa menjadi tantangan bagi kita karena percepatan industri 4.0 apabila tidak dibarengi dengan perlindungan dan pengembangan yang baik, dapat berdampak buruk terhadap masa depan bangsa dan negara di tengah persaingan global yang demikian pesatnya.

Partai NasDem, ujar Amelia, membawa isu tersebut pada level yang lebih tinggi melalui visi besarnya dalam rangka mengharmonisasikan budaya di tengah perkembangan ekonomi digital dan perubahan perilaku masyarakat dunia. Kehadiran badan budaya di sebuah partai politik diharapkan menjadi jawaban agar suara-suara dari para budayawan bisa mendapatkan saluran politik. Partai politik sepatutnya turut aktif dalam berperan melestarikan dan memajukan kebudayaan dengan mengawal agenda politik dalam berbagai kebijakan di bidang budaya.

Di era disrupsi teknologi sekarang ini, kata dia, penting bagi kita untuk memanifestasikan kembali nilai-nilai luhur kebudayaan sebagai karakteristik dan jati diri bangsa. Dengan keluhuran budaya maka politik akan terwujud pada kehidupan yang lebih harmonis.

Kehadiran Badan Budaya Partai NasDem diharapkan mampu mengekspresikan nilai-nilai kebudayaan yang menjiwai politik Indonesia tanpa ada sekat suku, agama, ras, dan golongan. “Hal ini tentu saja sejalan dengan pandangan Ketua Umum kita, Bapak Surya Paloh, bahwa Badan Budaya Partai NasDem harus menjadi sarana untuk menyampaikan politik gagasan di bidang kebudayaan.”

Visi tersebut akan membuat elegi kebudayaan nasional di tengah industri 4.0 terbantahkan sehingga masa depan budaya dan isu-isu terkait dengan budaya akan tetap dapat bersinar di negeri ini. ■



Kita harus memahami budaya dan karakter tempat kita masing-masing sehingga pemaknaan nilai-nilai budaya dapat dipahami secara langsung oleh masyarakat.”

Suyoto

Ketua Koordinator Bidang Kebijakan Publik dan Isu Strategis DPP Partai NasDem

3

Membangun Imajinasi Bangsa

KETUA Koordinator Bidang Kebijakan Publik dan Isu Strategis DPP Partai NasDem Suyoto mengajak semua pihak untuk mengingat kembali bahwa budaya dan partai politik senantiasa berjalan beriringan. Pada masa lalu, salah satu hal yang menandakan jargon partai politik ialah musik. Beberapa musik tradisional menjadi identitas partai politik. Citra musik sangat melekat dengan partai politik, bahkan polarisasi politik pun kerap digambarkan secara apik lewat musik dan lagu.

Menurut Suyoto, relasi seni budaya dengan politik menciptakan sebuah keterkaitan yang sangat erat, di antaranya perekrutan sampai akar rumput karena mampu menarik simpati masyarakat untuk mendekat dengan partai politik serta menciptakan ekosistem politik yang seimbang.



MISUSANTO

Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh beserta pengurus dan sejumlah artis dalam kampanye di lapangan Basulapa, Gorontalo (24/3/2019). Menurut Ketua Koordinator Bidang Kebijakan Publik dan Isu Strategis DPP Partai NasDem, Suyoto, Partai NasDem mendorong seni budaya untuk terus berkembang. Partai NasDem berkomitmen agar pelaku musik dan budaya jangan sampai tersisih.

Partai politik juga memiliki cara tersendiri untuk merekrut kader melalui pertunjukan budaya seni musik. Seperti yang kita ketahui bahwa Donal Trump pada proses pemilihan presiden Amerika Serikat melibatkan budaya seni musik karena merupakan wujud komitmen dari sebuah partai politik. Sasaran yang diharapkan ialah terbukanya ruang publik untuk beradaptasi

dengan kebudayaan dan menjadikan seni budaya sebagai penguatan kebangsaan sehingga tercipta kebijakan-kebijakan yang berkelanjutan bagi pekerja seni dan budaya.

“Saya mengharapkan bahwa para politikus dapat menciptakan ekosistem seni dan budaya sehingga bisa berkembang. Kita harus memahami budaya dan karakter tempat kita masing-masing sehingga pemaknaan nilai-nilai budaya dapat dipahami secara langsung oleh masyarakat,” jelas Suyoto.

Partai NasDem, kata dia, mendorong seni budaya untuk terus berkembang. NasDem berkomitmen agar pelaku musik dan budaya jangan sampai tersisih. Partai NasDem harus punya ruang publik dan dialog kebudayaan untuk membangun imajinasi bangsa dan ruang belajar bersama harus terus tumbuh.

Ia mencontohkan Korea Selatan yang mendorong *K-pop* sehingga hampir semua industri digital di negara itu mendukung budaya *K-pop*. “Partai politik juga harus seperti itu, berada di baris terdepan untuk melestarikan seni dan budaya bangsa demi menjaga persatuan dan keutuhan bangsa,” tuturnya dalam diskusi yang dipandu Hamdan Alkafie itu. ■



Setiap investor yang masuk ke Indonesia hampir dipastikan membawa budaya masing-masing. Karena itu, kita harus memiliki kemampuan untuk tidak mudah terseret oleh pengaruh asing.”

Rachmat Gobel
Wakil Ketua DPR RI

4 Menjaga Kelestarian Budaya

WAKIL Ketua DPR RI Rachmat Gobel bersyukur karena NasDem telah melahirkan satu badan baru bernama Badan Budaya Partai NasDem. “Saya ingin menyampaikan bahwa budaya sangat penting dalam politik dan perpolitikan.”

Ia mengisahkan pengalamannya ketika ditunjuk sebagai Ketua Inasgoc pada pelaksanaan SEA Games 2011. Pada saat itu anggaran dari pemerintah belum turun sehingga membuat masyarakat cemas akan pelaksanaan *event* olahraga negara-negara ASEAN tersebut. Ketika bertemu dengan perwakilan negara tetangga,

muncul tawaran agar pelaksanaan SEA Games di Indonesia dipindahkan ke negara tetangga. “Tapi dengan tegas saya katakan tidak, dan akan saya lakukan sekuat tenaga demi mempertahankan kesenian dan kebudayaan yang dimiliki Indonesia,” katanya.

Ia juga berniat untuk melaksanakan Panasonic Gobel Award untuk memberikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada para pekerja seni dan budaya yang telah membuktikan diri dalam mengembangkan wilayah masing-masing dengan ke-rajinan tangan mereka sendiri.

Lebih lanjut Gobel menjelaskan, setiap investor yang masuk ke Indonesia hampir dipastikan membawa budaya masing-masing. Karena itu, kita harus memiliki kemampuan untuk tidak mudah terseret oleh pengaruh asing. Keberadaan Badan Budaya Partai NasDem diharapkan menjadi bagian dari upaya memperkuat ketahanan budaya nasional.

Ia menyinggung soal nasib perajin di Indonesia yang terancam punah karena adanya mesin dan industri modern. Padahal produk-produk *handmade* memiliki keunikan dan keindahan spesifik karena terdapat sentuhan seni budaya dari masyarakat suatu wilayah. Ia berjanji akan mengagendakan Panasonic Gobel Award untuk mengapresiasi para pelaku *handmade* dari berbagai daerah di Tanah Air.

Selain itu, beberapa hari lalu ia melaksanakan Festival Ikan Tuna Tahun 2022 sebagai bagian dari upaya membangun keanekaragaman kuliner hasil olahan ikan tuna. Juga menjadikan komo-

ditas itu sebagai bagian penting dalam mengatasi krisis pangan. Dengan adanya festival tersebut, lanjutnya, budaya lokal dapat lebih dikenal luas oleh masyarakat sehingga mampu mendorong perilaku seni dan budaya masyarakat setempat untuk memberikan manfaat ekonomi bagi kehidupan mereka sehari-hari.

“Oleh karena itu, mari kita sama-sama menjaga anak-anak kita semua untuk terus memperkuat fondasi dengan membangun sumber daya manusia yang berkualitas sehingga mampu merefleksikan seni dan kebudayaan yang ada di Indonesia dengan sebaik-baiknya,” tegas Gobel. ■



Selama ini budaya sering dianggap tidak terlalu penting sehingga sejumlah daerah kerap menempatkan tenaga yang kurang berkompeten untuk mengelola sektor budaya.”

Hilmar Farid

Dirjen Kebudayaan Kemendikbudristek

5

Dianggap tidak Penting

DIRJEN Kebudayaan Kemendikbudristek Hilmar Farid menyebut Indonesia adalah negeri dengan keanekaragaman budaya yang paling tinggi di dunia. Sebab itu, arah pembangunan bidang budaya harus mendukung kegiatan kesenian dan pertunjukan, antara lain dengan adanya dana abadi untuk kebudayaan.

Dana abadi kebudayaan merupakan salah satu bentuk pendanaan untuk pemajuan kebudayaan sebagai pendamping APBN dan APBD yang dapat diakses oleh pemangku kepentingan dan penerima sebagai pelaksanaan amanat UU No. 5/2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

Saat ini sedang dikembangkan makanan ala Borobudur oleh sebuah industri yang berbasis pada kekayaan dan keragaman budaya nasional. Hal seperti itu akan menumbuhkembangkan produk-produk berbasis budaya dan seni yang kita miliki.

Tata kelola kebudayaan nasional sebagaimana diatur Pasal 32

ayat (1) UU No. 5/2017 merupakan suatu pengertian kunci yang sangat penting, bukan hanya dalam melestarikan, tetapi juga memajukan kebudayaan. Pasal tersebut menyatakan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau setiap orang dapat melakukan pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan.

“Oleh karena itu, saya sangat mengapresiasi dan mengucapkan selamat atas pembentukan Badan Budaya Partai NasDem dalam melindungi kekayaan warisan budaya yang kita miliki dari pusat hingga ke daerah-daerah,” ucap Hilmar.

Selama ini, kata Hilmar, budaya sering dianggap tidak terlalu penting sehingga sejumlah daerah kerap menempatkan tenaga yang kurang berkompeten untuk mengelola sektor budaya, seperti kepala dinas atau kepala museum. “Oleh karena itu, sekali lagi, saya sangat berharap dengan adanya Badan Budaya Partai NasDem ini dapat membantu memperkuat institusi kebudayaan yang ada di daerah. Ditjen Kebudayaan siap bekerja sama untuk menjaga dan merawat kebudayaan Indonesia,” tukasnya. ■



VII

Gerakan Budaya dan Partai Politik



1 Latar Belakang: Perlawanan Melalui Seni-Budaya

KEGIATAN budaya adalah cara paling ampuh dalam melawan kecenderungan fanatisme yang terjadi di masyarakat. Fenomena remaja yang mempertontonkan peragaan busana (*fashion week*) di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, pada 2022 adalah bentuk kegiatan seni yang mendapat perhatian luas. Terlepas dari pro dan kontra yang menyertainya, pertunjukan yang melibatkan keceriaan orang banyak itu sangat efektif.

Kegiatan yang dirayakan oleh berbagai kalangan dalam bentuk aktivitas seni atau budaya sangat penting untuk dirawat dan dikembangkan. Tak hanya menghibur, kegiatan-kegiatan budaya semacam itu dapat mencairkan suasana dan menyatukan masyarakat di tengah polarisasi sosial politik yang terjadi akhir-akhir ini.



MUSMAN ISKANDAR

Seniman Sujiwo Tejo memaparkan konsep dan ide lukisannya saat pembukaan Pameran 60 Tahun Sujiwo Tejo di Ballroom NasDem Tower, Jakarta, Rabu (31/8/2022).

Partai politik perlu lebih memperhatikan pengembangan budaya di Indonesia. Bukan hanya dalam bentuk dukungan penyelenggaraan acara-acara seni dan pertunjukan, tetapi lebih jauh lagi, dalam bentuk kebijakan-kebijakan yang dapat mendorong keberlangsungan kebudayaan. Partai politik perlu lebih aktif

lagi memikirkan pengembangan budaya dan pertunjukan di Indonesia.

Di tengah upaya penyeragaman budaya oleh kelompok tertentu, perlawanan lewat seni dan budaya menjadi penting dan bisa menjadi solusi. ■



**Politik seharusnya
menjadi jembatan
untuk menempatkan
manusia Indonesia pada
kedudukan tertinggi
melalui semangat
kebangsaan yang
berasaskan kebudayaan.”**

Lestari Moerdijat
Wakil Ketua MPR RI

2 Menjadi Jati Diri Bangsa

WAKIL Ketua MPR RI Lestari Moerdijat berpandangan bahwa budaya bukanlah konsep abstrak, melainkan sebuah realitas yang berwujud karena kebudayaan adalah hasil karya manusia yang bisa berupa benda maupun tak benda, bahkan menjadi kekayaan intelektual.

“Budaya merupakan jati diri, identitas, dan ciri khas dari kelompok tertentu yang tidak terpisahkan dari dinamika masyarakat di Negara Kesatuan Republik Indonesia,” kata Lestari dalam diskusi bertajuk Gerakan Budaya dan Partai Politik, yang diselenggarakan oleh Forum Diskusi Denpasar (FDD) 12 pada Rabu, 31 Agustus 2022.

Ia menjelaskan, fondasi pembangunan manusia Indonesia

ialah Pancasila yang mengandung nilai-nilai yang berakar dari budaya bangsa. Pada konteks tertentu, budaya adalah ruang utama perkembangan dinamika sosial yang menjadi bagian tak terpisahkan dalam kehidupan politik dan perpolitikan.

Oleh sebab itulah, FDD 12 secara khusus mengusung tema diskusi sebagaimana disebutkan di atas untuk mengajak semua komponen bangsa, khususnya partai politik, menelaah lebih dalam tentang budaya, kebudayaan, dan gerakan budaya.

“Bagaimana partai politik bisa memahami dan menggunakannya dalam pengambilan kebijakan yang betul-betul berasaskan atau merujuk pada nilai-nilai kebudayaan itu sendiri,” jelas Rerie, sapaan akrab Lestari.

Kita tidak bisa mengingkari bahwa saat ini sedang berhadapan dengan sebuah keadaan di mana partai politik mengalami kemerosotan kepercayaan dari masyarakat. Namun, di sisi lain, keberadaan partai politik sangat penting dalam menghasilkan pemegang kekuasaan yang menjalankan tugas-tugas kenegaraan, baik di eksekutif maupun legislatif.

“Inilah sesungguhnya yang menjadi tantangan kita dan di sinilah budaya dan moral sesungguhnya menjadi kontrol dalam mengendalikan praktik politik yang menanggalkan martabat dan integritas manusia,” tegas Rerie dalam diskusi yang dipandu Luthfi Assyaukanie itu.

Oleh karena itu, perlu ditanamkan kesadaran bahwa selain moral, budaya merupakan representasi utuh dari manusia Indo-

nesia sebagaimana dituangkan dalam butir-butir Pancasila. “Politik seharusnya menjadi jembatan untuk menempatkan manusia Indonesia pada kedudukan tertinggi melalui semangat kebangsaan yang berasaskan kebudayaan.”

Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu berharap diskusi kali ini dapat memperluas wawasan kita sebagai bangsa, khususnya yang berhubungan dengan aspek budaya dan gerakan budaya yang membutuhkan keterlibatan semua komponen dalam memperjuangkan semangat keindonesiaan. ■



Budaya harus memiliki peran yang dapat mencairkan suasana dan menyatukan masyarakat. Ini adalah salah satu ciri penting budaya.”

Muhammad Farhan

Anggota DPR RI dan penggiat kebudayaan

3 Keragaman Budaya Menjadi Kekuatan

MUHAMMAD Farhan, anggota DPR RI dan penggiat kebudayaan, menilai diskusi kali ini sangat relevan untuk merajut kembali nilai-nilai keindonesiaan karena berlangsung di tengah polarisasi politik sebagai konsekuensi sebuah bangsa yang beragam. “Keragaman budaya itu penting untuk dirawat dan dikembangkan,” jelas Farhan.

Ia menilai keragaman budaya yang kita miliki dapat menjadi kekuatan untuk mencairkan suasana dan menyatukan masyarakat di tengah polarisasi politik yang kerap terjadi belakangan ini. Apalagi ada pihak tak bertanggung jawab yang sering menjadikan polarisasi politik sebagai ajang untuk menciptakan perseteruan budaya. “Budaya harus memiliki peran yang dapat mencairkan suasana dan menyatukan masyarakat. Ini adalah salah satu ciri penting budaya,” tegasnya.

Menurutnya, partai politik yang berperan penting, langsung maupun tidak langsung, dan bahkan terlibat dalam polarisasi

politik harus betul-betul memperhatikan pengembangan budaya di Indonesia. Perhatian bukan hanya dalam bentuk penyelenggaraan seni dan pertunjukan, tetapi juga berupa kebijakan-kebijakan yang dapat mendorong kemajuan kebudayaan di Indonesia. “Sebagai anggota partai politik kita perlu lebih aktif memikirkan pengembangan kebudayaan dan nilai-nilainya.”

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, tindakan yang dilakukan terhadap objek pemajuan kebudayaan ialah inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, dan penyelamatan. “Setiap warga negara dapat berperan aktif dalam pemajuan kebudayaan,” kata Farhan.

Terdapat 10 objek pemajuan kebudayaan, yaitu tradisi lisan, manuskrip, adat istiadat, permainan rakyat, olahraga tradisional, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, bahasa, dan ritus. Berikut penjelasan singkat tentang ke-10 objek pemajuan kebudayaan tersebut.

1. Tradisi lisan adalah tuturan yang diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat, seperti sejarah lisan, dongeng, rapalan, pantun, cerita rakyat, atau ekspresi lisan lainnya. Contoh cerita rakyat antara lain Malin Kundang dari Sumatra Barat, Tangkuban Perahu dari Jawa Barat, serta Legenda Si Kembar Sawerigading dan We Tenriyabeng dari Sulawesi.

2. Manuskrip adalah naskah beserta segala informasi yang terkandung di dalamnya yang memiliki nilai budaya dan sejarah, seperti serat, babad, kitab, dan catatan lokal lainnya. Contoh babad

antara lain *Babad Tanah Jawi* yang menceritakan cikal-bakal kerajaan-kerajaan di Jawa beserta mitosnya. Contoh serat antara lain *Serat Dewabuda*, yang merupakan naskah agama yang menyebutkan hal-hal yang khas ajaran Buddha.

3. Adat Istiadat adalah kebiasaan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus-menerus dan diwariskan kepada generasi berikutnya, antara lain, tata kelola lingkungan dan tata cara penyelesaian sengketa.

4. Permainan Rakyat adalah berbagai permainan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan kelompok masyarakat yang bertujuan menghibur diri. Contoh permainan rakyat antara lain permainan kelereng, congklak, gasing, dan gobak sodor.

5. Olahraga tradisional adalah berbagai aktivitas fisik dan/atau mental yang bertujuan menyehatkan diri dan meningkatkan daya tahan tubuh, didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus-menerus dan diwariskan lintas generasi. Contoh olahraga tradisional antara lain bela diri, pasola, lompat batu, dan debus.

6. Pengetahuan tradisional adalah seluruh ide dan gagasan dalam masyarakat yang mengandung nilai-nilai setempat sebagai hasil pengalaman nyata dalam berinteraksi dengan lingkungan, dikembangkan secara terus-menerus dan diwariskan lintas generasi. Pengetahuan tradisional antara lain kerajinan, busana, metode penyehatan, jamu, makanan dan minuman lokal, serta pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta.

7. Teknologi tradisional adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang atau cara yang diperlukan bagi kelangsungan atau kenyamanan hidup manusia dalam bentuk produk, kemahiran, dan keterampilan masyarakat sebagai hasil pengalaman nyata dalam berinteraksi dengan lingkungan, dan dikembangkan secara terus-menerus serta diwariskan lintas generasi. Contoh teknologi tradisional ialah proses membajak sawah dengan menggunakan tenaga kerbau, atau menumbuk padi dengan menggunakan lesung.

8. Seni adalah ekspresi artistik individu, kolektif, atau komunal, yang berbasis warisan budaya maupun berbasis kreativitas penciptaan baru, yang terwujud dalam berbagai bentuk kegiatan dan/atau medium. Seni terdiri atas seni pertunjukan, seni rupa, seni sastra, film, dan seni media. Seni pertunjukan antara lain seni tari, seni teater, dan seni musik. Contoh seni rupa yaitu lukisan, patung, atau keramik.

9. Bahasa adalah sarana komunikasi antarmanusia, baik berbentuk lisan, tulisan, maupun isyarat, misalnya bahasa Indonesia dan bahasa daerah. Di Indonesia terdapat sekitar 700 bahasa daerah yang tersebar di berbagai pulau, dari ujung Sumatra hingga Papua. Bahkan, dalam satu provinsi bisa terdapat berbeda-beda bahasa daerah. Misalnya di Provinsi Aceh terdapat bahasa Aceh dan bahasa Gayo.

10. Ritus adalah tata cara pelaksanaan upacara atau kegiatan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok



MI/USMAN ISKANDAR

Kader Partai NasDem mengikuti Apel Siaga Perubahan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Minggu (16/7/2023). Apel yang digelar sebagai bentuk konsolidasi itu diikuti oleh kader dari seluruh penjuror Tanah Air dan dimeriahkan dengan penampilan berbagai kesenian dan budaya Indonesia.

masyarakat secara terus-menerus serta diwariskan pada generasi berikutnya, antara lain, berbagai perayaan, peringatan kelahiran, upacara perkawinan, upacara kematian, dan ritual kepercayaan beserta perlengkapannya.

Pertanyaan utamanya ialah bagaimana kita mengimplementasikan kebijakan publik yang erat dengan budaya bangsa? Menurut Farhan, implementasi kebijakan publik erat kaitannya dengan ruang publik sebagai ruang ekspresi dan berbagi. Apabila sebuah pemerintahan tidak memperhatikan ruang publik, berarti tidak memberikan ruang ekspresi dan ruang berbagi serta berinteraksi kepada masyarakat.

Ekonomi kreatif, menurutnya, merupakan wujud nilai tam-

bah dari pemberdayaan ekonomi di bidang kebudayaan. Kreatif artinya *to create*, dari tidak ada menjadi ada. Ide-ide kreatif akan membawa kita kepada inovasi-inovasi baru yang memberikan nilai tambah terhadap sesuatu yang sudah ada. “Dari tidak ada menjadi ada itu namanya kreatif. Dari ada dan diberikan nilai tambah itu namanya inovatif,” jelas Farhan.

Tentu saja pemanfaatan media-media publik, baik media konvensional seperti lembaga penyiaran publik maupun media-media yang jauh lebih maju seperti media sosial yang sangat individual pun mutlak diperlukan. Pasalnya, media-media tersebut memiliki peran penting dan menjadi bagian dari implementasi kebijakan publik yang erat kaitannya dengan budaya bangsa, karena apa pun kebijakan publik yang erat dengan budaya bangsa harus memperhatikan *core value*.

Core value dalam setiap lembaga atau organisasi, lanjutnya, adalah suatu hal yang akan selalu dicari dan ditentukan bersama-sama sebagai bentuk konsensus bersama. “Saya kerja di sebuah perusahaan baik BUMN, swasta, atau aktif di sebuah organisasi sosial kemasyarakatan, selalu ada *core value*, dan kebijakan publik yang erat dengan budaya bangsa harus selalu berpegang pada *core value* bangsa Indonesia yaitu Pancasila.”

Sebagai sebuah lembaga yang mengatur pengadministrasian kebijakan, kata dia, sebetulnya Direktorat Jenderal Kebudayaan sudah menjalankan fungsinya, tetapi hingga sekarang kita belum memiliki parameter pengukuran kinerja dan kebijakan lembaga

tersebut. Berbeda, misalnya, Direktorat Jenderal Pajak yang sudah memiliki target pendapatan dari sektor pajak sekitar Rp1.600 triliun per tahun, dan itu berarti parameternya *clear*.

Apa parameter dari kerja budaya? Menurutnya, parameter untuk mengukurnya sangat sulit sehingga tidak bisa dengan mudah memberikan nilai kepada Direktorat Jenderal Kebudayaan di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek).

Meski demikian, salah satu parameter yang bisa menjadi acuan ialah bagaimana keberadaan Direktorat Jenderal Kebudayaan beserta produk-produk kebijakannya akan bisa memengaruhi gaya hidup masyarakat Indonesia. “Tentu kita tidak bisa mengharapkan tiba-tiba Dirjen Pajak ikut-ikutan *ngurusin fashion show*. Tetapi bahwa kemudian Direktorat Jenderal Kebudayaan menangkap itu sebagai sebuah kekayaan atau ekspresi anak-anak zaman sekarang dari sisi kebudayaan busana Indonesia, itu merupakan langkah yang sangat kita harapkan,” papar Farhan.

Ia memberikan contoh, pada 2 Oktober 2009 UNESCO mengakui batik sebagai warisan dunia dari Indonesia, dan sejak saat itu batik mengalami perkembangan yang sangat pesat. “Sebelumnya kita menganggap batik cuma baju untuk ke undangan, tapi setelah 2009 semua berubah. Batik menjadi pakaian sehari-hari dan industri batik pun berkembang pesat. Itu salah satu bentuk bagaimana rekayasa budaya memengaruhi banyak hal dalam kehidupan manusia,” tukas Farhan. ■



Terlalu sederhana bila kebudayaan hanya diurus oleh direktorat jenderal. Inilah masalah serius yang harus segera diatasi di negeri yang kaya akan keragaman budaya ini.”

Christine Hakim
Pekerja seni

4 Perlu Kementerian Kebudayaan

CHRISTINE Hakim selaku pekerja seni menyatakan bahwa berbagai ragam kesenian baik film, musik, seni tari, maupun seni rupa, termasuk ekonomi kreatif, adalah produk budaya. Budaya memiliki cakupan yang sangat luas karena budaya berkaitan erat dengan peradaban manusia, termasuk pendidikan ada di dalamnya.

Namun, yang menjadi keprihatinan kita, kata Christine, Indonesia sebagai negara besar dengan lebih dari 17.000 pulau dan lebih dari 1.000 etnik, sejak negara ini ada tidak punya kementerian kebudayaan yang berdiri sendiri. “Selama ini, kebudayaan kalau enggak *nempel* di pendidikan, *nempel* di pariwisata. Padahal kita

semua tahu bahwa sebagai bangsa dengan penduduk 270 juta jiwa, masalah kebudayaan bukanlah urusan mudah. Terlalu sederhana bila kebudayaan hanya diurus oleh direktorat jenderal. Inilah yang menurut saya masalah serius yang harus segera diatasi di negeri yang kaya akan keragaman budaya ini,” tegas Christine.

Sangat ironis bila *budgeting* menjadi alasan sehingga kebudayaan hanya ditangani oleh sebuah direktorat jenderal. Selain itu, urusan di bidang pengembangan seni budaya kerap tidak efisien karena harus berurusan dengan lebih dari satu kementerian dan lembaga. Ia memberi contoh dalam hal pembuatan film, pihak produser tidak hanya berurusan dengan Kementerian Pariwisata, tetapi juga dengan Direktorat Kebudayaan Kemendikbudristek, Kementerian Perdagangan, serta Kementerian Kominfo. “Ini sungguh tidak efisien dan efektif!” tegas Christine lagi.

Dengan berkaca pada permasalahan dan tantangan yang dihadapi selama ini, ia berharap ke depan harus ada kementerian kebudayaan. “Ini yang perlu sama-sama kita perjuangkan dalam rangka menyelamatkan dan melestarikan kekayaan budaya yang ada di negeri ini.”

Setelah 77 tahun Indonesia merdeka, ia mengaku baru menyadari bahwa bangsa ini kekurangan catatan sejarah sehingga labih banyak menggunakan referensi atau catatan sejarah tentang negeri ini yang ditulis oleh kaum penjajah.

Oleh karena itu, tidak mengherankan bila tulisan tentang kita sebagai bangsa yang dijajah, bangsa inlander, bangsa yang tidak

hebat, terus kita ajarkan kepada generasi muda, dan generasi muda akhirnya tidak merasa bangga menjadi anak Indonesia.

“Contohnya saya pernah mengkritik soal gamis yang sebenarnya tidak ada hubungannya dengan agama tertentu. Saya juga mengkritik masalah drakor dan *K-pop* yang membahayakan generasi muda dan generasi penerus bangsa ini,” kata Christine.

Bila dipandang dari aspek budaya, gamis adalah budaya Arab, *K-pop* dan Drakor adalah budaya Korea. Apakah kita mau melihat anak-anak kita yang laki-laki memakai bedak, *blush on*, *eye-shadow*, dan lipstik? Apakah kita mau membiarkan nilai-nilai keindahan dan kecantikan perempuan Indonesia disingkirkan oleh budaya asing?

Sekarang ini kecantikan tidak lagi dilihat dari *personality* yang kuat dari seseorang. Ukuran kecantikan itu kalau dagunya panjang, sehingga yang dagunya pendek disuntik supaya panjang. “Berapa puluh tahun yang lalu saya ke Korea, saya berpikir wow perempuan Korea adalah *one of the most beautiful woman in the world*. Tapi jangan lupa, perempuan Indonesia juga sangat ayu, sangat manis, sangat cantik,” ungkapnya.

Namun, tahun lalu, ketika diundang ke Korea, ia melihat perempuan di negara itu tidak secantik dulu lagi karena rupanya hampir sama semua, tidak muncul *personality* dan karakter individual yang memikat. “Apakah kita mau seperti itu? Nah ini yang menurut saya amat sangat membahayakan,” Christine mengingatkan.

Dalam pandangannya, budaya adalah benteng pertahanan terakhir sebuah bangsa. Oleh sebab itu, benteng peradaban manusia itu harus dijaga dan dirawat dengan sebaik-baiknya. “Bagaimana menjaga nilai-nilai luhur yang kita miliki dari Sabang sampai Merauke? Menurut saya, kementerian kebudayaan adalah salah satu jawaban untuk menghadapi berbagai tantangan tersebut.” ■



**Strategi kebudayaan
yang paling penting
adalah tidak mengakui
adanya pakem karena
semuanya harus
melalui proses.”**

Sujiwo Tejo
Budayawan

5 **Berpikir Sesuai Perkembangan Zaman**

BUDAYAWAN Sujiwo Tejo mendukung gagasan Christine Hakim tentang keseriusan menggarap dan merawat kebudayaan. Kendati demikian, ia menilai upaya membentuk kementerian kebudayaan justru menyempitkan kebudayaan.

“Saya justru mengusulkan agar ditiadakan karena seluruh kegiatan entah itu keuangan, perdagangan, politik, ekonomi, dan olahraga, sesungguhnya berada di bawah kebudayaan,” jelas Sujiwo.

Kebudayaan adalah setiap aktivitas yang di dalamnya terkandung perencanaan dan pelaksanaan sebagai satu kesatuan. “Setiap kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan lalu dievaluasi, itulah kebudayaan,” kata dia.

Dalam urusan kebudayaan, kita tidak bisa membiarkan ge-

nerasi muda ikut-ikutan tanpa arah, tetapi kita harus mengarahkan. Untuk itu, ia setuju partai-partai melakukan gerakan kebudayaan. Akan tetapi, yang dimaksud gerakan kebudayaan bukan cuma kesenian. Menurutnya, kesenian justru bukan porsinya partai politik. “NasDem kalau mau bangun lembaga kebudayaan atau apa pun namanya, tentu akan menumbuhkan kembali iklim berkebudayaan seperti wayang dan lain-lain sehingga muncul karya-karya baru. Sedangkan karya-karya lama biarkan jadi tugas museum,” ujarnya.

Selama ini banyak keluhan dari pegiat kesenian tradisional karena tidak laku, dan dalam menghadapi keadaan itu mereka cenderung menyalahkan penonton. “Itu yang saya keberatan. Yang salah senimannya karena enggak *update* dengan kebutuhan masyarakat,” katanya.

Bila ingin membentuk lembaga kebudayaan, NasDem harus merangsang para seniman untuk berpikir sesuai dengan zamannya. Anak-anak sekarang tahu bahwa kebenaran tidak polaristik, tetapi ada di mana-mana. “Bahkan ulama pernah mengatakan berlomba-lombalah kamu di dalam kebaikan, jangan berlomba-lombalah kamu di dalam kebenaran,” kata Sujiwo.

Strategi kebudayaan yang paling penting, menurut dia adalah tidak mengakui adanya pakem karena semuanya harus melalui proses.

Dalam kaitan dengan gerakan kebudayaan, Sujiwo berharap partai-partai memberikan pencerahan kepada publik bahwa

tidak ada sumpah pemuda tentang berbahasa satu bahasa Indonesia. Yang benar ialah menjunjung tinggi bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. “Artinya, bahasa daerah memiliki kedudukan yang tinggi walaupun bukan sebagai bahasa persatuan,” jelasnya. ■



Perubahan-perubahan
besar di dunia selalu
dipicu oleh teknologi.
Revolusi industri
dipicu pengembangan
mesin uap. Sementara
transformasi digital
dipicu teknologi
informasi komunikasi.”

Punto A Sidarto

Praktisi permuseuman dan cagar budaya

6 Mengalami Krisis Kebudayaan

PUNTO A Sidarto, praktisi permuseuman dan cagar budaya, mengajak kita untuk mencermati gerakan sosial dan gerakan budaya. Gerakan sosial adalah tindakan sosial oleh sekelompok masyarakat (bisa juga digerakkan oleh negara) untuk mendorong atau menolak suatu perubahan sosial dan umumnya berjangka pendek. Misalnya, gerakan reformasi pada akhir 1990-an.

Adapun gerakan budaya sebenarnya juga sebuah gerakan sosial, karena tidak lazim bila gerakan budaya itu berdiri sendiri. Kategorisasi perubahan kebudayaan nasional muncul seiring tumbuhnya negara-negara Asia-Afrika karena sebelumnya tidak terlalu jelas apa yang dimaksud dengan budaya nasional. Namun, ketika negara-negara Asia-Afrika makin banyak yang merdeka



MILUSMAN ISKANDAR

Penari menampilkan tarian khas daerah saat pawai budaya Nusantara di arena hari bebas kendaraan bermotor, di kawasan Bundaran HI, Jakarta, Minggu (21/7/2024).

pada pertengahan abad ke-20 dan salah satu pemicunya ialah kemerdekaan Indonesia, maka muncullah yang namanya kebudayaan nasional. Dan, itu yang sekarang terjepit di antara budaya global yang tumbuh di tengah proses globalisasi.

Globalisasi tidak harus dilihat semata-mata sebagai gerakan westernisasi karena sebetulnya semua bangsa melakukan globalisasi. “Globalisasi tidak hanya dilakukan oleh kebudayaan Barat, tetapi oleh kebudayaan bangsa-bangsa yang lain juga,” jelas Pun-

to.

Budaya nasional kita sendiri seperti apa? Sebelumnya, yang disebut sebagai kebudayaan Indonesia sebenarnya hanya bahasa Indonesia. Kedua adalah batik. Batik menjadi ciri kuat kebudayaan Indonesia karena orang mana pun, kalau memakai batik, merasa kuat dengan ciri keindonesiaan.

Punto mengingatkan bahwa budaya nasional sedang berhadapan dengan budaya lokal dan budaya global. Budaya global pada dasarnya dikembangkan untuk kepentingan komersial. Pelemahan budaya nasional sebenarnya sudah terjadi dalam beberapa kasus, misalnya terjadi di Uni Eropa, karena terjadi aliansi *supranational* yang merupakan gabungan negara-negara Eropa. Akibatnya, kebudayaan-kebudayaan nasional mulai melemah. Bila melihatnya dari sisi permuseuman, museum-museum kota di Eropa jauh lebih berperan dalam kehidupan masyarakat ketimbang museum nasional.

Ketika kita melakukan gerakan kebudayaan menuju perubahan budaya, sebenarnya kita sudah masuk dalam proses perubahan tersebut. Ketika Sumpah Pemuda ataupun ketika proklamasi kemerdekaan, “Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia dst...”, kita selalu menggunakan istilah ‘kami’.

Namun, sekarang mulai bergeser menggunakan ‘kita’ karena terjadi aliansi antara yang menyatakan dan yang menerima pernyataan. Itu sebenarnya menunjukkan bagaimana perubahan-

perubahan terjadi, interaksi-interaksi terjadi, hubungan-hubungan terjadi, dan itu semua menunjukkan kita sedang dalam keadaan krisis perubahan budaya.

Perubahan budaya yang kita alami sekarang, lanjut Punto, yang paling kuat pengaruhnya ialah transformasi digital yang dipicu teknologi informasi dan komunikasi. “Kalau kita lihat perubahan-perubahan besar di dunia selama ini selalu dipicu oleh teknologi. Revolusi industri dipicu oleh pengembang mesin uap. Sementara transformasi digital dipicu oleh teknologi informasi komunikasi.”

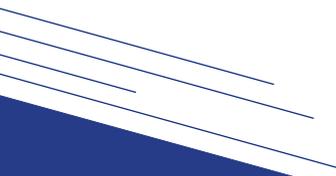
Masalah yang kita hadapi saat ini ialah perubahan budaya yang terjadi dalam akselerasi yang sangat tinggi, jauh lebih tinggi daripada kecepatan revolusi industri, misalnya. Karena itu, kita butuh gerakan budaya menuju perubahan kebudayaan dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya yang kita miliki.

Lalu, apa peran partai politik dalam gerakan budaya dan perubahan budaya? Menurut Punto, peran partai politik secara internal ialah membangun budaya politik sesuai visi-misi dan landasan negara, merumuskan dan memperjuangkan politik kebudayaan. Selain itu, mendukung strategi kebudayaan Indonesia yang telah ditetapkan pada 2018 dalam Kongres Budaya Nasional.

Saat menyampaikan pendapat akhir dalam diskusi tersebut, wartawan senior Saur Hutabarat menyatakan, untuk menghadapi perubahan kebudayaan yang dipacu oleh teknologi komu-

nikasi, maka diperlukan politik kebudayaan. Politik kebudayaan menjadi bagian tak terpisahkan dari berbagai kebijakan negara seperti strategi kebudayaan dan politik anggaran. “Karena itu, dengan ringkas saja, saya setuju akan hadirnya kementerian kebudayaan,” tegas Saur. ■





Biodata Tim Ahli



Arief Adi Wibowo, S.Si., M.T. lahir di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Memegang gelar master teknik dan manajemen industri dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya, sebelumnya lulus sebagai sarjana sains bidang fisika teoretis dari Universitas Airlangga. Sebagai aktivis, Arief aktif sebagai Wakil Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) dan Ketua PP Ikatan Alumni Universitas Airlangga. Memiliki rekam kerja di banyak perusahaan media nasional seperti *TV One*, *Trans TV/7*, *CNN Indonesia*, dan *Metro TV*. Saat ini menjabat staf khusus di Chairman Office Media Group. ■



Dr. Atang Irawan, S.H., M.Hum. lahir di Wonosobo, 10 Juli 1975. Ia merupakan dosen Fakultas Hukum di Universitas Pasundan Bandung, Universitas Parahyangan (2000-2007), dan Dewan Penasihat DPD Kongres Advokat Indonesia Jawa Barat. Bidang kajiannya ialah hukum tata negara. Meraih gelar S-3 ilmu hukum di Universitas Padjadjaran pada 2011 dan mengenyam sejumlah pendidikan keterampilan seperti bidang jurnalistik dan pelatihan *public learning services* (PLS) di Payap University Chiang May, Thailand. Atang juga menjadi dosen luar biasa di Unikom (2003), Universitas Maranata (2010), Staf Ahli DPR RI 2009-2019, Staf Ahli DPD RI 2009-2019, dan staf khusus pimpinan MPR RI (2019-sekarang). ■



Drs. Muchtar Luthfi Mutty, M.Si. lahir di Masamba, 1 September 1956. Pendidikan terakhir S-2 administrasi negara. Pengalaman kerjanya dari Camat Wotu, Kabupaten Luwu (1986-1989), dosen IIP/IPDN (1989-2014), Bupati Luwu Utara (1999-2009), Staf Khusus Wakil Presiden RI (2009-2014), anggota DPR RI (2014-2019), Staf Khusus Wakil Ketua MPR RI Dr. Lestari Moerdijat, S.S., M.M. (2019-sekarang), serta anggota TGUPP Provinsi Sulawesi Selatan (2021-sekarang). Luthfi mendapat tanda penghargaan Bintang Jasa Utama pada 1999, tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya 20 Tahun (2005), dan Satyalancana Karya Satya 30 Tahun (2008). ■



Arimbi Heroepoetri lahir di Jakarta, 19 September 1966. Perempuan ini meraih gelar LL.M. dengan *major* lingkungan hidup di Dalhousie Law School, Halifax, Kanada, 1992. Gelar S.H. juga dalam *major* lingkungan hidup diperoleh di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung.

Dia mengikuti berbagai pendalaman, antara lain pendalaman mengenai transisi menuju demokrasi (Jerman, 1994), hak asasi perempuan (Bangladesh; Sao Paulo, Brasil; dan Tanzania, 2003), transisi keadilan (New York, 2007), dan kepemimpinan inovatif untuk berkelanjutan (IDEAS Indonesia 5.0, Massachusetts Institute of Technology Sloan School of Management, 2015). Arimbi juga merupakan aktivis Walhi, menjadi salah satu komisioner Komnas Perempuan (2007–2014), dan masuk Tenaga Ahli Wakil Ketua MPR RI Dr. Lestari Moerdijat, S.S., M.M. (2019-sekarang). ■



Luthfi Assyaukanie, Ph.D. adalah Tenaga Ahli Wakil Ketua MPR RI Dr. Lestari Moerdijat, S.S., M.M. (2019-sekarang). Ia juga seorang peneliti dan dosen di Universitas Paramadina, Jakarta. Meraih gelar Ph.D. di Universitas Melbourne, Australia, dalam bidang sejarah politik. Ia pernah bekerja sebagai peneliti di Singapura, Belanda, dan Amerika Serikat. Luthfi sudah menulis sejumlah buku dan puluhan artikel yang diterbitkan di media dalam dan luar negeri. Salah satu bukunya, *Islam and the Secular State*, diterbitkan oleh ISEAS, Singapura (2009). Dia pernah menjabat Direktur Freedom Institute dan peneliti di SMRC, Jakarta. ■



Sadyo Kristiarto, S.P. lahir di Jakarta pada 25 Juni 1968, merupakan alumnus Jurusan Agronomi IPB Bogor. Sejak 1996 hingga 2014 menjadi wartawan di *HU Media Indonesia* antara lain menangani Desk Polhukam, Ekonomi, Metropolitan, dan Suplemen. Pada 2014 selama kurang lebih setahun bertugas sebagai Pemimpin Redaksi *Borneo News* di Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Sebelum menjadi jurnalis sempat berkarier sebagai asisten kepala divisi di perkebunan kelapa sawit PT Tania Selatan, Palembang, Sumatra Selatan, dan sebagai supervisor data di PT Pillar, kantor konsultan teknik. Saat ini tergabung dalam Tenaga Ahli Wakil Ketua MPR RI Dr. Lestari Moerdijat, S.S., M.M. (2019-sekarang). ■



Anggiasari Puji Aryatie, S.S. merupakan sosok yang sangat berpengalaman dalam memperjuangkan hak-hak penyandang disabilitas dan kesetaraan gender serta upaya mengentaskan masyarakat dari kemiskinan. Perempuan kelahiran Jakarta itu juga memiliki keahlian dalam pelatihan dan berbicara di depan umum. Keterampilan kepemimpinannya ditopang bakat dalam menganalisis masalah masyarakat, meninjau kebijakan publik, mengembangkan dan menyederhanakan prosedur, serta menemukan solusi yang inovatif.

Sarjana sastra Inggris dari Sekolah Bahasa Asing LIA, Yogyakarta, 2007, itu pada Januari 2016 hingga Oktober 2016 menjadi Koordinator Komunikasi Indonesia dan Filipina untuk Arbeiter-Samariter-Bund (ASB), salah satu organisasi tertua di Jerman yang bergerak di bidang kesejahteraan sosial. Selain itu, sejak September 2019 sampai sekarang ia menjadi konsultan bidang penelitian dan pengumpulan data pandemi yang bekerja sama dengan Asia University, Jepang. Kini, menjadi Tenaga Ahli Wakil Ketua MPR RI Dr. Lestari Moerdijat, S.S., M.M. (2019-sekarang). ■



Dr. Irwansyah, S.Sos., M.A. memperoleh gelar sarjana sosial (S.Sos.) dari Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara (FISIP USU) 1991-1994; *master of arts* (M.A.) dari School of Communication, College of Social Science, University of Hawaii at Manoa (UHM) Honolulu, Amerika Serikat (2003-2004); dan doktor (Dr.) dari Program Pascasarjana Ilmu Komunikasi Departemen Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI) 2007-2010 (*cum laude*).

Pada 2021 menjadi staf pengajar Departemen Ilmu Komunikasi FISIP UI dan Magister Ilmu Komunikasi Universitas Pelita Harapan, anggota Senat Antar-fakultas FISIP UI, asesor Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, dan Ketua Bidang Keilmuan ISKI Pusat, Ketua Litbang *Media Indonesia*, dan Tenaga Ahli Wakil Ketua MPR RI Dr. Lestari Moerdijat, S.S., M.M. (2019-sekarang). ■



Dr. Radityo Fajar Arianto, S.E., M.B.A. lahir di Surabaya pada 4 Juni 1975. Memperoleh gelar sarjana dari Universitas Airlangga Surabaya di bidang manajemen dan menamatkan pendidikan MBA dari University of Hertfordshire Inggris. Radityo aktif mengajar sebagai dosen di Universitas Pelita Harapan (UPH) sejak 2008 dan mendapatkan gelar doktor dari UPH pada 2021, pernah menjabat Direktur Inkubator Bisnis UPH Sparklabs. Saat ini Radityo juga aktif dalam kegiatan FDD12 sebagai Tenaga Ahli Wakil Ketua MPR RI. ■

MEDIA
INDONESIA
PUBLISHING

ISBN 978-623-6165-25-6



9

786236

165256